



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDesa) DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA GUNA  
MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH  
(STUDI PADA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

**DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN**

**BOGOR  
Desember 2018**

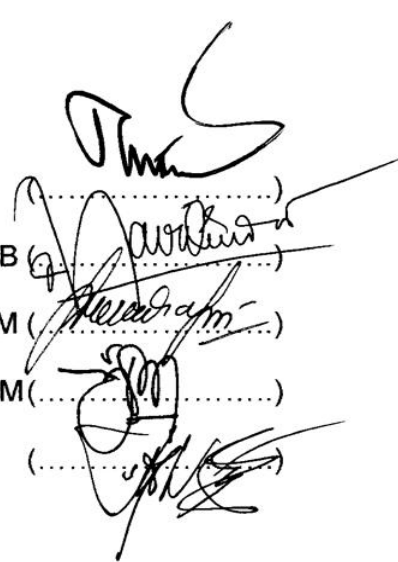
## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dony Setiawan  
NIM : 120170203008  
Program Studi : Ekonomi Pertahanan  
Judul : Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

Pembimbing 1 : Kol. Caj. Dr. Thomas Gabriel J., M.Si (.....)  
Pembimbing 2 : Kol. Arh. Dr. R. Djoko AN, S.IP., M.AB (.....)  
Penguji I : Kol. Chb (K) Dr. Sri Sundari., S.E., M.M (.....)  
Penguji II : Kol. Caj. Dr. Surryanto DW., M.H., M.M (.....)  
Penguji III : Dr. Supandi Halim., S.Sos., M.M (.....)



Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 4 Desember 2018

## PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 4 Desember 2018



DONY SETIAWAN

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dony Setiawan  
NIM : 120170203008  
Program Studi : Ekonomi Pertahanan  
Fakultas : Manajemen Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

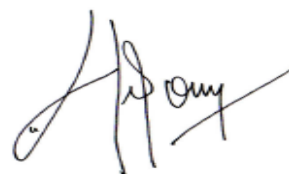
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas ilmiah saya berjudul :

**Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 4 Desember 2018



DONY SETIAWAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pertahanan, Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP,
2. Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan, Laksda TNI Sulistiyanto, S.E.,M.M.,M.Sc.,P.S.C.
3. Dosen Pembimbing I dan II, Kolonel Caj. Dr. Thomas Gabriel J.,M.Si selaku pembimbing I dan Kolonel Arh. Dr. R. Djoko Andreas Navalino, S.IP., M.AB selaku Pembimbing II, atas kesabaran dan keikhlasan beliau dalam membimbing peneliti menyelesaikan tesis ini,
4. Bapak H. Selani Salip, Ibu Rohana Salim, S.Pd.SD, Desi Iswanti, A.Md.Kep, dr. Helmi Agustian, Muhammad Fadillah, Luthfi Eza Setiawan dan Fauzi Al Faqih Setiawan selaku keluarga peneliti,
5. Dr. Supandi, S.Sos., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pertahanan, peneliti mengucapkan terimakasih banyak atas waktu dan tenaganya, serta motivasinya dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan proposal tesis ini,

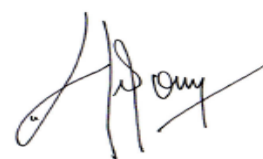
6. Harsilaini, S.Ag selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Widiyanto, ST.,MT selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Efiti Santy, S.Pt selaku Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Prasarana Wilayah, Apri Astiningsih selaku Kepala Seksi Statistik Sosial, Charo Ferizal Sembiring, S.Si selaku Kepala Seksi Pembangunan, Tri Murlina selaku Pendamping Desa, Erwin, Hairudin, Nursyamsi, dan Gurdi F selaku Kepala Desa se-Kecamatan Dendang, Guntur, Drs. Hamdan, Dulhadi dan Zakaria selaku Direktur BUMDesa se-Kecamatan Dendang dan Sumardi, SH selaku Tokoh Masyarakat sebagai narasumber penelitian.
7. Dr. (Cand) Sakum, SE.,MM selaku Staf Program Studi Ekonomi Pertahanan, Alm. Willy Rosali Arnoldi Bei, S.Si., selaku teman penulis sesama perantauan Bangka semoga engkau dalam lindungan Allah selalu serta para sahabat Ekonomi pertahanan Cohort 7, 8 dan 9 serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya implementasi badan usaha milik desa dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah.

Boqor, 4 Desember 2018



Dony Setiawan

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DALAM MENINGKATKAN POTENSI WISATA GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH (STUDI PADA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

DONY SETIAWAN

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan amanah pemerintah pusat dalam mengembangkan perekonomian berbasis pedesaan. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatur pendanaan BUMDesa bersumber dari dana desa sehingga menjadi pemicu pengelolaan potensi wisata serta pengembangan objek lokal setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan potensi wisata serta dampaknya bagi perwujudan ketahanan ekonomi daerah pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus kepada 15 informan yang tersebar di beberapa instansi sebagai pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan BUMDesa telah diterapkan namun belum secara tepat merepresentasikan karakteristik wilayah sementara pengembangan potensi wisata didukung gabungan fungsi bumi dan sumber daya alam, tenaga kerja, prasarana dan manajemen dapat meningkatkan posisi ketahanan wilayah sekaligus ketahanan daerah sehingga pemerintah perlu menetapkan unit wisata Badan Usaha Milik Desa sebagai peta jalan pengembangan pariwisata daerah.

Kata Kunci : **Ketahanan Ekonomi, Potensi Wisata, Badan Usaha Milik Desa, Implementasi Kebijakan**

## **ABSTRACT**

### **POLICY IMPLEMENTATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDesa) IN IMPROVING POTENTIAL TOURISM TO REALIZES REGIONAL ECONOMIC RESISTANCE (STUDY IN DENDANG DISTRICT, BELITUNG TMUR REGENCY, BANGKA BELITUNG PROVINCE)**

DONY SETIAWAN

*The establishment of Village-Owned Enterprise (BUMDesa) is a central government mandate in developing a rural-based economy. Minister of Rural Development and Transmigration Village Regulation No. 4 of 2015 concerning Establishment, Management and Dissolution of Village-Owned Enterprises regulates BUMDesa funding sourced from village funds so that it triggers tourism potential management and local object development. This study aims to analyze the implementation of the Village-Owned Enterprises policy in increasing tourism potential and its impact on the realization of regional economic resilience in Dendang District, East Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. The study used qualitative case study analysis methods to 15 informants spread across several agencies as policymakers and implementors to target groups. The results of the study show that BUMDesa Policy Implementation has been implemented but has not accurately represented the characteristics of the region while the development of tourism potential supported by a combination of functions of the earth and natural resources, labor, infrastructure and management can improve the position of local and regional resilience so that the government needs to establish a village-owned business entity tourism unit as a regional tourism development roadmap.*

**Keywords :** ***Economic Resilience, Tourism Potential, Village-Owned Enterprises, Policy Implementation***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian .....	15
1.3 Rumusan Masalah .....	16
1.4 Tujuan Penelitian .....	16
1.5 Manfaat Penelitian .....	17
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	17
1.5.2 Manfaat Praktis .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK .....</b>	<b>18</b>
2.1 Deskripsi Konseptual .....	18
2.1.1 Kebijakan Publik .....	18
2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	18
2.1.1.2 Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan Publik .....	20
2.1.1.3 Implementasi Kebijakan .....	22
2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) .....	28
2.1.3 Pariwisata .....	34
2.1.4 Ekonomi Pertahanan .....	37
2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat .....	39

2.1.6	Ketahanan Ekonomi Daerah .....	41
2.1.7	Keterkaitan Implementasi Kebijakan BUMDesa Dengan Potensi Wisata .....	47
2.1.8	Keterkaitan Implementasi Kebijakan BUMDesa Dengan Ketahanan Ekonomi Daerah .....	48
2.1.9	Keterkaitan Implementasi Kebijakan BUMDesa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah .....	49
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	51
2.3	Kerangka Pemikiran .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>61</b>
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian .....	61
3.1.1	Tempat Penelitian .....	61
3.1.2	Waktu Penelitian .....	61
3.2	Subyek dan Obyek Penelitian .....	62
3.2.1	Subyek Penelitian .....	62
3.2.2	Obyek Penelitian .....	63
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	65
3.4	Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data .....	68
3.5	Teknik Analisa Data .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>74</b>
4.1	Gambaran Umum .....	74
4.1.1	Kabupaten Belitung Timur .....	74
4.1.2	Kecamatan Dendang .....	89
4.1.3	Desa-Desa Kecamatan Dendang .....	93
4.1.4	Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Dendang ...	97
4.2	Hasil Penelitian .....	100
4.2.1	Implementasi Kebijakan BUMDesa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata.....	100

4.2.2 Dampak BUMDesa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah.....	113
4.3 Pembahasan .....	123
4.3.1 Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata .....	124
4.3.2 Dampak Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah.....	134
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>144</b>
5.1 Kesimpulan .....	144
5.2 Rekomendasi .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
LAMPIRAN 1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN .....	154
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA.....	169
LAMPIRAN 3. PEDOMAN OBSERVASI .....	171
LAMPIRAN 4. DATA SEKUNDER .....	172
LAMPIRAN 5. TRANSKRIP WAWANCARA .....	173
LAMPIRAN 6. TRANSKRIP OBSERVASI.....	214
LAMPIRAN 7. DOKUMEN PENDUKUNG.....	242
 RIWAYAT HIDUP PENELITI .....	 245

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Belitung Timur .....	10
Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik .....	20
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan George C Edwards ..	27
Gambar 2.3 Konfigurasi Ketahanan Nasional (Tannas) .....	42
Gambar 2.4 Model Ketahanan Wilayah .....	43
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif .....	72
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Belitung Timur .....	67
Gambar 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur .....	68
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Belitung Timur .....	70
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur .....	78
Gambar 4.5 Peta Wilayah Kecamatan Dendang .....	83
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Desa Kecamatan Dendang.....	90
Gambar 4.7 Struktur Organisasi BUMDesa Kec. Dendang.....	93

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Perbandingan Jumlah Desa dan BUMDesa Seluruh Indonesia..... 2
Tabel 1.2	Rincian Dana Desa di Kabupaten Belitung Timur ..... 3
Tabel 1.3	Jumlah Desa, Dusun dan RT se-Kecamatan Dendang . 7
Tabel 1.4	Objek Wisata Kecamatan Dendang ..... 7
Tabel 1.5	BUMDesa di Kecamatan Dendang Tahun 2018 ..... 8
Tabel 1.6	Realisasi Penggunaan Dana Desa Kecamatan Dendang Tahun 2017 ..... 9
Tabel 1.7	Jumlah Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... 11
Tabel 1.8	Distribusi PDRB Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 ..... 12
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... 55
Tabel 2.2	Kerangka Pemikiran Penelitian ..... 60
Tabel 3.1	Rencana Jadwal Penelitian ..... 61
Tabel 3.2	Subjek Penelitian..... 62
Tabel 4.1	Kondisi Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017 ..... 69
Tabel 4.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2017 ..... 71
Tabel 4.3	Kontribusi PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017 ..... 71
Tabel 4.4	Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017 ..... 72
Tabel 4.5	Produksi Komoditas Pertambangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017 ..... 73
Tabel 4.6	Jumlah Industri Pengolahan dan IKM Kabupaten

	Belitung Timur Tahun 2015-2017 .....	74
Tabel 4.7	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017 .....	75
Tabel 4.8	Pertumbuhan Sektor Penopang Usaha Jasa dan Pariwisata Kab. Belitung Timur Tahun 2015-2017 .....	76
Tabel 4.9	Perkembangan Sektor Perkebunan, Peternakan, Jasa dan Sarana Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017 .....	84
Tabel 4.10	Rangkuman Hasil Temuan Implementasi Kebijakan BUMDesa dalam meningkatkan Potensi Wisata .....	103
Tabel 4.11	Rangkuman Hasil Temuan Dampak Implementasi Kebijakan BUMDesa dlm meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah .....	114
Tabel 4.12	DPA Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes.....	119
Tabel 4.13	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan .....	121
Tabel 4.14	Data BUMDes dan BUMADES .....	123
Tabel 4.15	Destinasi Wisata Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur .....	126
Tabel 4.16	Pemetaan Wisata Kecamatan Dendang .....	131
Tabel 4.17	Potensi Wisata Kecamatan Dendang .....	132
Tabel 4.18	Tenaga Kerja BUMDesa Kecamatan Dendang.....	133

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Guna semakin memperkuat dan mempertegas kebijakan prioritas pemerintah di pedesaan, pemerintah mengeluarkan strategi dengan memprioritaskan penggunaan dana desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) setiap tahunnya selalu menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.<sup>1</sup> Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yakni dukungan pengembangan basis ekonomi desa melalui pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>2</sup> Prioritas dilakukan guna mendorong pembentukan, penguatan, perluasan dan pengelolaan BUMDesa secara berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi kewilayahan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pasal 1, ayat (14).

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1, ayat (2).

membangun keterkaitan lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan pedesaan.<sup>3</sup>

Menurut data tercatat bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa se Indonesia telah mencapai angka puluhan ribu di seluruh desa. Perbandingan jumlah BUMDesa dengan jumlah Desa ditunjukkan pada tabel berikut :

**TABEL 1.1 PERBANDINGAN JUMLAH DESA DAN BUMDESA SELURUH INDONESIA**

NO	TAHUN	JUMLAH DESA	JUMLAH BUMDesa	PERBANDINGAN (%)
1	2015	74.093	27.607	37,25
2	2018	74.958	28.368	37,84

Sumber : Data Diolah dari Kemenkeu dan Kemendes PDTT.

Jika dibandingkan dengan jumlah desa berdasarkan rincian dana desa yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan maka capaian kepemilikan bumdes bisa dibandingkan dengan jumlah desa sebagai pembagi dari tahun 2015, sejak dana desa pertama kali dikucurkan. Pada tahun 2015 jumlah BUMDesa sebanyak 27.607 unit. Saat ini tahun 2018 jumlah BUMDesa meningkat hingga mencapai 28.368 unit. Jumlah BUMDesa itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Perbandingan jumlah BUMDesa dengan jumlah Desa pada tahun 2015 sebesar 37,25 % sementara pada tahun 2018 sebesar 37,84 %. Angka ini menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki BUMDesa. Tentunya akan sangat ideal jika setiap desa memiliki BUMDesa sehingga dapat dijadikan pembangunan pondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan serta menjadi basis pengembangan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Sejalan dengan penguatan dan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa tersebut, pemerintah juga telah melahirkan beberapa kebijakan baru di bidang kepariwisataan. Kebijakan dan strategi pemerintah terutama diarahkan pada kebijakan penetapan destinasi

<sup>3</sup>Kementerian Sekretariat Negara. "Membangun Indonesia Dari Desa", dalam <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/960.html>, diakses pada 18 Desember 2017.

pariwisata prioritas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik hingga mancanegara serta menggali potensi wisata di berbagai daerah khususnya di pedesaan. Alhasil pemerintah mengembangkan beberapa kebijakan di berbagai bidang pariwisata diantaranya pengembangan destinasi wisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata hingga penetapan Desa Wisata. Penetapan destinasi tersebut tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berupa percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Adapun kesepuluh destinasi tersebut termasuk diantaranya KEK Tanjung Kelayang. Selain itu hasil kesepakatan antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian Pariwisata menetapkan rencana 10 desa pilot pengembangan desa wisata salah satunya Desa Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu wilayah administratif pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 merupakan objek penyaluran prioritas dana desa pada BUMDesa serta berbatasan dengan Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas. Adapun Penyaluran dana desa yang telah dialokasikan kepada Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Besarnya rincian dana desa Kabupaten Belitung Timur ditunjukkan oleh data berikut :

**TABEL 1.2 RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No	Tahun	Jumlah Desa	ALOKASI (Rp)
1	2015	39	5.866.167.817
2	2016	39	27.099.065.000
3	2017	39	34.088.724.000
4	2018	39	35.618.320.000

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2015-2018.

Dari tabel diatas, dapat digambarkan bahwa kebijakan transfer dana desa dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Belitung Timur semakin meningkat dari tahun 2015 hingga 2018 sehingga menjadi perhatian serius terhadap pengelolaan dana desa sesuai arahan dan petunjuk pemerintah pusat. Besarnya dana desa yang telah disalurkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah setempat untuk menerapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Diantaranya kebijakan untuk memprioritaskan pendirian dan pengelolaan BUMDesa melalui skema pendanaan yang bersumber dari dana desa. Namun masih terdapat permasalahan pada penyaluran dan pendampingan dana desa berupa pendirian hingga belum beroperasionalnya BUMDesa pada sebagian desa.

Beberapa Desa sebagian besar telah memiliki BUMDesa yang bergerak pada berbagai bidang usaha namun tetap masih rendah. Jumlah BUMDesa yang dibentuk hanya 19 dari total jumlah 39 desa. Hanya setengah dari jumlah desa yang memprioritaskan pendirian BUMDesa melalui penyertaan modal dari alokasi dana desa. Padahal pendirian BUMDesa dapat memacu pendapatan desa serta masyarakat. Minimnya jumlah BUMDesa diatas juga menunjukkan kebijakan pemerintah desa yang bertentangan dengan prioritas penggunaan dana desa yang didesain untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pendirian dan pengembangan BUMDesa merupakan salah satu program prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kegiatan ekonomi desa melalui implementasi BUMDesa. Pemerintah juga turut menyelenggarakan dukungan program pendampingan oleh pihak pusat terhadap Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2017, Belitung Timur dijadikan *pilot project* Bursa Inovasi Desa Program Inovasi Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Kementerian Desa PDTT. Adapun program ini merupakan sarana fasilitasi penguatan manajemen pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) serta sistem informasi pembangunan desa.

Inovasi yang dilakukan lebih kepada *sharing management knowledge*.<sup>4</sup> Hal ini sebagai upaya pendampingan bagi perencanaan program yang lebih terarah sehingga berorientasi terhadap pencapaian efektifitas dan produktivitas pedesaan.

Kenyataan yang sering dihadapi bahwa pemanfaatan dana desa lebih berorientasi pada pembangunan sarana prasarana fisik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifan Yarid Anbiya (2018) bahwa pengimplementasian dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa dimana penggunaan dana desa lebih besar digunakan untuk pembangunan desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat, padahal pemerintah pusat selalu berupaya mengarahkan penggunaan dana desa pada pengembangan sektor prioritas seperti BUMDesa setiap tahunnya.<sup>5</sup> Beberapa penyebab lainnya adalah kegagalan pemerintah desa dalam menilai potensi desanya sesuai keanekaragaman dan kekhasan desa menurut sumber daya yang dimilikinya. Penyebabnya bahwa pemerintah desa telah lambat menemukannya potensi desa. Perbedaan desa secara geografi dan topografi merupakan peluang guna menumbuhkan perekonomian desa serta meningkatkan daya saing. Hadirnya aspek-aspek tertentu pada program pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa yang rendah juga seiring dengan kurangnya dukungan sisi praktis. Harapan BUMDesa sebagai miniatur yang berfungsi menjadi unit media dan sarana ekonomi produktif pun gagal.

Selain penyaluran dana desa terhadap BUMDesa, Belitung Timur memiliki keterkaitan dengan destinasi wilayah pariwisata prioritas dengan

---

<sup>4</sup> Silanno Romans. "Belitim Jadi Pilot Project Bursa Inovasi Desa", dalam [http://rri.co.id/post/berita/451906/daerah/beltim\\_jadi\\_pilot\\_project\\_bursa\\_inovasi\\_desa.html](http://rri.co.id/post/berita/451906/daerah/beltim_jadi_pilot_project_bursa_inovasi_desa.html), diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 12.51 WIB.

<sup>5</sup> Rifan Yarid Anbiya, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Tahun 2016)", *Tesis Magister*, (Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2018), hlm. 85.

ditunjuknya Tanjung Kelayang sebagai wilayah prioritas pariwisata yang tergabung menjadi 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata sekaligus memacu kegiatan perekonomian. Salah satu arahan presiden agar pemerintah daerah serius dan konkret mendukung dan melaksanakan upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas.<sup>6</sup>

Keterkaitan wilayah Belitung Timur berbatasan langsung dengan KEK Tanjung kelayang yang berada di Kabupaten Belitung. Adapun Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah pengembangan di sekitar destinasi wisata tanjung kelayang karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung. Strategi pengembangan KEK tanjung kelayang melibatkan dukungan pembangunan infrastruktur diantaranya Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Dendang.<sup>7</sup> Kecamatan Dendang sebagai kecamatan hasil pemekaran daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur. Kecamatan Dendang memiliki 4 (empat) Desa dimana 2 (dua) desa tambahan juga merupakan hasil pemekaran desa induk. Adapun jumlah desa dan banyaknya dusun serta RT yang ada di Kecamatan Dendang yaitu :

---

<sup>6</sup> Biro Hukum dan Komunikasi Publik, "Menpar Bersama Gubernur dan Bupati Membahas 10 Destinasi Pariwisata Prioritas", dalam <http://kemenpar.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 15.50 WIB.

<sup>7</sup> Dadang Rizki Ratman, "Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas. Kementerian Pariwisata", 2016, hlm.34., dalam [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id), diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 16.15 WIB.

**TABEL 1.3 JUMLAH DESA, DUSUN DAN RT SE-KECAMATAN DENDANG**

KECAMATAN	DESA	DUSUN	RT
Dendang	Dendang	4	11
	Balok	2	19
	Jangkang	4	27
	Nyuruk	4	22
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>79</b>

Sumber : BPS Belitung Timur, 2017.

Kecamatan Dendang masih merupakan daerah pedesaan yang mana potensi ekonomi sebagian besar masih berada di sektor pertambangan dan pertanian yang masih bersifat tradisional.<sup>8</sup> Namun terdapat potensi wisata yang bisa digali dari beberapa objek wisata di Kecamatan Dendang yakni :

**TABEL 1.4 OBJEK WISATA KECAMATAN DENDANG**

NO	OBJEK WISATA	JARAK DARI IBUKOTA KECAMATAN (Km)
1	Air Terjun Marsila	15
2	Makam Raja Balok Lama	3
3	Makam Raja Balok Baru	4
4	Pemandian Sukma Alam Nyuruk	15

Sumber : BPS Belitung Timur, 2017.

Pengelolaan sumber-sumber bagi pendapatan terutama sektor pariwisata dapat dimungkinkan dengan mendirikan dan mengelola BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa. Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Kuliah Kerja Dalam Negeri Universitas Pertahanan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 Februari sampai dengan 2 Maret 2018 bertempat di Desa Wisata Penting Sari menegaskan bahwa BUMDesa mampu bersinergi dengan Desa Wisata sehingga menghasilkan peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Perputaran uang di desa mencapai 1,5 hingga 2 Milyar rupiah per tahun dengan rata-rata kunjungan tamu sebanyak 30.000

<sup>8</sup>KSK Kecamatan Dendang. *Kecamatan Dendang Dalam Angka 2017*. (Manggar : BPS Kabupaten Belitung Timur). hlm. 73.

orang. Selain itu tumbuhnya kegiatan pendukung kawasan desa wisata berupa ekosistem pariwisata sejalan dengan peningkatan standarisasi pelayanan dan sarana prasarana desa wisata. Manfaat lain yang didapat diantaranya peningkatan kualitas SDM dan produk serta jasa wisata sehingga memberikan kontribusi pada pendapatan desa sekaligus pemasukan bagi masyarakat desa.

Bagi Kecamatan Dendang, beberapa unit usaha BUMDesa yang telah didirikan diantaranya :

**TABEL 1.5 BUMDesa DI KECAMATAN DENDANG TAHUN 2017**

DESA	BUMDESA	BIDANG USAHA	JENIS USAHA	DASAR HUKUM
Dendang	Persada Berkah	Bisnis Penyewaan (Renting) Barang, Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading):	Pengelolaan Aset Desa, Perdagangan Umum , Ekonomi Kreatif	Perdes No. 5 Tahun 2017
Balok	Tebing Tinggi	-	Jasa dan Transportasi	Perdes No. 4 Tahun 2018
Jangkang	Pelinge	Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading), Bisnis Keuangan (Financial Business):	Perdagangan Dan Jasa , Simpan Pinjam	Perdes No. 2 Tahun 2017
Nyuruk	Bina Karya	Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (Trading).	Perdagangan , Pengelolaan Air Bersih Dan Jasa	Perdes No. 3 Tahun 2017

Sumber : DPMPD Kabupaten Belitung Timur, 2017.

Tabel diatas menunjukkan keberadaan BUMDesa yang dibentuk dari total 4 desa dalam satu kecamatan. Namun pembentukan BUMDesa baru bisa diakomodir pada tahun 2017 kecuali Desa Balok pada tahun 2018 sebagai konsekuensi perubahan nama melalui Peraturan Desa (Perdes) pada tahun 2018. Hal ini tidak memenuhi kebijakan pemerintah pusat tentang pendirian BUMDesa yang telah diamanatkan pada tahun 2015. Selain itu terdapat potensi sektor wisata pada unit BUMDesa di Kecamatan Dendang yang belum dimanfaatkan dengan baik sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Jenis usaha BUMDesa terkait jasa,

perdagangan, transportasi serta pengelolaan air bersih diatas merupakan penggerak usaha pariwisata atau ekonomi kreatif yang dapat dibentuk menjadi cikal bakal pengembangan potensi wisata sebagai salah satu unit usaha BUMDesa. Contohnya desa dendang yang telah memiliki unit usaha ekonomi kreatif. Sementara unit usaha lain di beberapa BUMDesa ke depan bisa menjadi pendukung pengembangan sektor wisata.

Kecamatan Dendang merupakan Kecamatan dengan serapan dana desa paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain. Tercatat sebesar 91 % persentase penggunaan dana desa pada tahun 2017. Namun praktek penggunaan dana desa di Kecamatan Dendang memiliki kecenderungan berfokus pada program pelaksanaan pembangunan desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat sementara prioritas penggunaan dana bukan hanya pembangunan infrastruktur tetapi juga pembinaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat ini diantaranya penguatan pengembangan BUMDesa serta penyertaan modal pada usaha ekonomi produktif pedesaan. Pada tahun 2017 desa-desa di Kecamatan Dendang masih memprioritaskan dana desa pada pelaksanaan pembangunan desa seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

**TABEL 1.6 REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA KECAMATAN DENDANG TAHUN 2017**

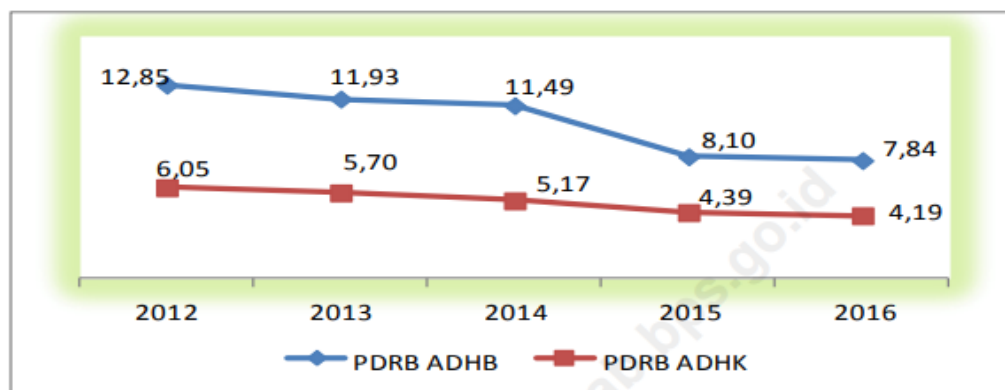
URAIAN	REALISASI DANA DESA (Rupiah)	KET
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar	600.140.000,-	
- Sarana Prasarana Desa	857.219.000,-	
- Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	488.860.000,-	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	30.020.000,-	
TOTAL	1.976.239.000,-	

Sumber : DPMPD Kabupaten Belitung Timur, 2017.

Selain terdapat skema pembagian yang kurang seimbang antara pelaksanaan program pembangunan desa dan program-program lain, pemerintah desa di Kecamatan Dendang hanya berfokus terhadap peningkatan infrastruktur desa selama beberapa tahun. Disadari bahwa peningkatan pembangunan akses pelayanan dasar merupakan salah satu prioritas dana desa namun juga dengan pertimbangan alokasi program

lain. Salah satunya pengelolaan BUMDesa sebagai sebuah entitas ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Permasalahan dari sisi sosial, keberadaan BUMDesa dapat membawa perubahan yang signifikan.

Selama tahun 2011 hingga 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan 5,10 % pertahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur ditunjukkan oleh gambar berikut :



**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur**

Sumber : Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Menurut Lapangan Usaha 2012-2016* (Manggar : BPS Beltim, 2017), hlm. 52.

Dari data tersebut tercatat bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi melambat dari yang sebelumnya 4,39 % di tahun 2015 menjadi 4,19 % di tahun 2016. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang melambat menunjukkan melemahnya perekonomian di Kabupaten Belitung Timur. Melemahnya perekonomian ditenggarai akibat menurunnya nilai ekspor terutama di sektor pertambangan. Berbagai komoditas ekspor unggulan di Kabupaten Belitung Timur seperti bijih timah dan pasir kuarsa mengalami penurunan karena rendahnya harga komoditas di pasar global. Selain itu, ketersediaan lahan pertambangan

yang semakin sempit dan perijinan yang semakin diperketat juga menjadi andil dalam penurunan ekspor komoditas unggulan ini.<sup>9</sup>

Di sisi lain sektor pariwisata yang menggerakkan beberapa lapangan usaha yang merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merangkak naik serta berpotensi semakin meningkat. Beberapa lapangan usaha seperti Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman serta Jasa jika diakumulasikan hampir mencapai 6,88 % atau seperempat dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yakni 25,84 %. Hal ini didorong geliat pariwisata yang menuntut ketersediaan akomodasi serta jasa. Selain itu data yang ditunjukkan BPS yakni jumlah tamu yang menginap pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Januari tercatat sebanyak 32.035 orang dimana Kabupaten belitung memimpin perolehan jumlah tamu menginap seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut :

**TABEL 1.7 JUMLAH TAMU ASING DAN INDONESIA PADA HOTEL BERBINTANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	KABUPATEN/ KOTA	ASING		INA		JUMLAH	
		DES 2017	JAN 2018	DES 2017	JAN 2018	DES 2017	JAN 2018
1	Bangka	11	16	3.298	2.627	3.309	2.643
2	Belitung	648	480	16.650	15.284	17.298	15.764
3	Bangka Tengah	99	88	9.401	6.552	9.500	6.640
4	Pangkal Pinang	8	10	6.363	6.978	6.371	6.988
<b>JUMLAH</b>		<b>766</b>	<b>594</b>	<b>35.712</b>	<b>31.441</b>	<b>36.478</b>	<b>32.035</b>

Sumber : BPS Bangka Belitung, 2018.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memang berkontribusi maksimal terhadap pembentukan PDRB diikuti lapangan usaha pada industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Hal ini menandakan struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur masih

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Menurut Pengeluaran 2012-2016*. (Manggar : BPS Kabupaten Belitung Timur). hlm. 37.

didominasi oleh industri ekstraktif yang menghasilkan barang. Namun dilihat dari laju pertumbuhannya cenderung menurun. Laju pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015 seperti terlihat pada tabel :

**TABEL 1.8 DISTRIBUSI PDRB BELITUNG TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2012-2016**

NO	LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,27	24,86	25,54	25,49	25,84
2	Pertambangan dan Penggalian	20,65	19,45	18,72	18,23	17,21
3	Industri Pengolahan	19,10	19,43	19,76	19,38	19,05
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	2,28	2,29	2,28	2,31
5	Jasa Pendidikan	1,93	2,08	2,12	2,33	2,49
6	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,19	1,19	1,25	1,27
7	Jasa Lainnya	0,46	0,49	0,51	0,52	0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Belitung Timur, 2017.

Adapun laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung meningkat diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa. Hal ini membuktikan bahwa lapangan usaha yang menjadi pemicu ekonomi seperti pertambangan dan penggalian mulai menurun sehingga ada input baru di sektor lain. Peningkatan potensi wisata melalui lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa menjadi peluang bagi BUMDesa sesuai potensi yang dapat dikembangkan masing-masing desa.

Sebagai unit usaha ekonomi di pedesaan, kebermanfaatan dan keberpihakan BUMDesa dapat diarahkan guna menggali dan mengoptimalkan potensi wisata desa. Adapun geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Sehingga dengan memanfaatkan sumber daya pariwisata secara optimal diharapkan penataan ekonomi perdesaan dapat tercapai melalui kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada jangka pendek tentunya menjadi tantangan bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa

melalui tata kelola BUMDesa untuk mencapai ketahanan desa. Namun diharapkan perkembangan ekonomi pedesaan membawa pada suatu ketahanan ekonomi daerah pada jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Puguh Budiono (2015) mengungkapkan bahwa pelaksanaan BUMDes di desa Kedungprimpen telah berkembang dan mendorong pemasukan bagi desa sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi. Dorongan pelaksanaan kebijakan BUMDesa ini ditandai dengan inisiatif pemerintah desa didalam mendorong pembentukan usaha desa tersebut.<sup>10</sup> Memprioritaskan penggunaan Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu komitmen pemerintah saat ini sebagai perwujudan pemerataan. Untuk itu pemerintah senantiasa terus menerus meningkatkan alokasi terhadap dana desa setiap tahunnya. Kebijakan ini mendorong perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Dampak pengalokasian dana desa dirasakan terutama terhadap sosial dan ekonomi desa berupa optimalisasi infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian desa.<sup>11</sup> Namun Dana Desa juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan BUMDesa yang sesuai dengan potensi desa. Adapun potensi tersebut dapat mencakup potensi perkebunan, potensi perikanan, potensi energi baru terbarukan, potensi pertanian, potensi desa wisata dan UMKM.

Di beberapa negara kontribusi BUMDesa mampu menjadi tonggak struktur perekonomian sehingga mendukung ketahanan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Xiaolan Fu dan V N Balasubramanyam (2003) menunjukkan perkembangan ekonomi china melalui reformasi ekonomi pada dekade tahun 1978 menggambarkan produktivitas badan usaha milik desa (*village enterprises*) dalam menopang perekonomian

---

<sup>10</sup>Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)". *Jurnal Politik Muda*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 123.

<sup>11</sup>Kantor Staf Presiden. "Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla : Kerja 3ersama", dalam <http://presidenri.go.id/berita-aktual/laporan-3-tahun-pemerintahan-jokowi-jk.html>, diakses pada 18 Desember 2017.

terutama pada sektor manufaktur dibandingkan dengan badan usaha milik negara (*state-owned enterprises*).<sup>12</sup> Peneliti juga sempat menjumpai bentuk usaha kecil atau usaha yang dikelola masyarakat ketika melakukan Kuliah Kerja Luar Negeri di *Tan Hou Silk Factory* di Kota Shanghai, China yang merupakan pabrik sutera. Kunjungan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Biro Perjalanan Wisata setiap membawa turis. Hal ini menyiratkan dukungan kebijakan pemerintah china terhadap pengembangan sektor usaha kecil dan menengah serta sebagai wujud pelestarian unit usaha ekonomi berbasis masyarakat. Namun tidak seperti di China, pada penelitian yang dilakukan Rifan Yarid Anbiya (2018) seperti telah dijelaskan diatas menemukan bahwa Implementasi dana desa belum mampu meningkatkan ketahanan ekonomi daerah di Indonesia secara signifikan karena porsi penggunaan dana desa lebih besar di bidang pembangunan desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditambah kurangnya inisiasi pemerintah desa dalam merumuskan program berkelanjutan dalam bidang ekonomi serta program peningkatan usaha produktif kepada masyarakat desa.

Penelitian tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa potensi ketahanan ekonomi Indonesia saat ini bersifat dinamis dan cenderung bergeser dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks. Hal ini menyebabkan pemberdayaan potensi ekonomi belum maksimal. Penguatan ketahanan ekonomi diperlukan guna memperkuat ekonomi nasional terutama pada basis hingga kluster berupa pondasi yang kokoh. Penguatan kelembagaan ekonomi domestik dapat dilakukan dengan mempertegas pelaksanaan aturan formal dan non formal yang berlaku secara spesifik di masing-masing daerah.<sup>13</sup> Hal ini mendorong strategi kebijakan pemerintah terhadap unit usaha ekonomi masyarakat desa

---

<sup>12</sup> Xiaolan Fu dan V N Balasubramanyam, "Township and Village Enterprises in China". *Journal of Development Studies Lancaster University Management School*, 2003, hlm. 1.

<sup>13</sup>Purwanto. "Empat Solusi Indonesia Untuk Ketahanan Ekonomi", dalam <http://lipi.go.id/berita/empat-solusi-indonesia-untuk-ketahanan-ekonomi/5722>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 04.51 WIB.

cukup tepat. Penguatan aturan terhadap basis kelembagaan serta pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memperkuat kapasitas ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Harapan terhadap BUMDesa merupakan peluang bagi unit ekonomi desa yang telah ada sebagai perwujudan prioritas penggunaan dana desa dalam mendukung program usaha ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang dihadapi serta dampak yang ditimbulkan atas pendirian dan pengelolaan BUMDesa, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian tesis berjudul **“Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”**.

## **1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menetapkan fokus dan sub fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan objek utama penelitian sekaligus permasalahan utama yang diteliti. Sedangkan secara spesifik penelitian dilakukan terhadap permasalahan yang menjadi subfokus penelitian diantaranya :

1. Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
2. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata guna mewujudkan ketahanan ekonomi daerah di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa pengelolaan BUMDesa merupakan salah satu faktor pendorong pengembangan basis ekonomi daerah. Permasalahan yang terjadi yakni mengenai implementasi BUMDesa dalam mewujudkan ketahanan daerah..

Berdasarkan fokus dan subfokus diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan dijadikan permasalahan utama serta perhatian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata guna mewujudkan ketahanan Ekonomi Daerah pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Menganalisis dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata guna mewujudkan ketahanan ekonomi daerah di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah pada konteks ketahanan daerah. Pengembangan ekonomi daerah akan bermanfaat terhadap tinjauan kesejahteraan sebagai perspektif ekonomi, kedaulatan sebagai perspektif pertahanan dan ketahanan ekonomi sebagai perspektif ekonomi pertahanan. Selain itu diharapkan dapat mengembangkan konsep keilmuan ekonomi pertahanan dilihat dari aspek ekonomi dan ketahanan daerah serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi konsep berupa ide dan gagasan kepada Pemerintah Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur terhadap pemanfaatan BUMDesa sesuai penetapan prioritas dana desa, upaya yang meliputi pendirian, perencanaan dan pengelolaan BUMDesa dalam meningkatkan potensi wisata serta perwujudan ketahanan ekonomi daerah di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur serta sebagai sumbang pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten lain serta pemangku kepentingan terkait.

## **BAB 2**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **2.1 Deskripsi Konseptual**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) banyak sekali tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Menurut Thomas R Dye (1975) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup>

Sementara itu pakar ilmu politik lain Richard Rose (1969) mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Definisi ini memandang kebijakan sebagai arah atau pola kegiatan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Robert Eyestone (1971) mendefinisikan kebijakan

---

<sup>14</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : Buku Seru, 2014), hlm. 20.

publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Carl Friedrich (1963) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Eyestone dan Fredriech ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan publik dapat menyangkut banyak hal dan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Kebijakan publik harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti misalnya kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*), maupun kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). James E Anderson (1979) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.<sup>15</sup> Konsep ini lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya yang dilakukan dan membedakan kebijakan dari keputusan.

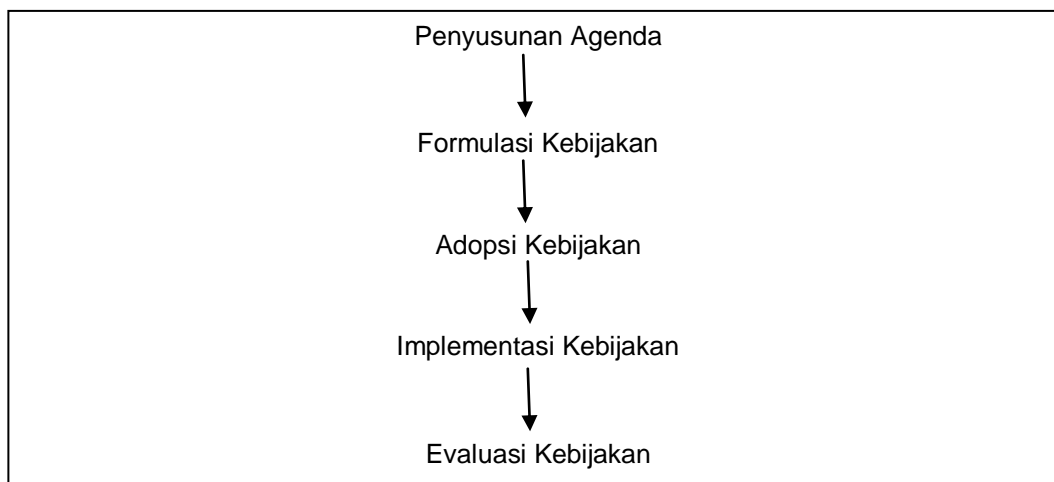
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

---

<sup>15</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analisis*, (Yogyakarta : Gava Media, 2009), hlm. 17.

### 2.1.1.2 Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999) adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :



**Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik**

Sumber : Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : PT Buku Seru, 2014), hlm. 36.

#### a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

<sup>16</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : PT Buku Seru, 2014), hlm. 35.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah memecahkan masalah. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

### 2.1.1.3 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik berupa program atau kegiatan pemerintah yang telah dirumuskan perlu dipahami melalui proses implementasi. Pada tahapan kebijakan publik, implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan. Studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik seperti mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah, mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah, mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain, mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.<sup>17</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk

---

<sup>17</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hlm. 18.

pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan dimaksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Grindle (1980) memberikan pandangannya tentang implementasi secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy sistem delivery*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>18</sup>

Van Meter dan Van Horn (1975) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.<sup>19</sup>

Adapun makna implementasi menurut Warwick (1982), mengatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan program, pelaksanaannya harus terus menerus ditangani melalui tugas, lingkungan, klien antara satu dengan yang lainnya. Formalitas organisasi dan administrasi penting sebagai dasar, sekaligus kunci sukses untuk terus-menerus menerapkan kesadaran dan tanggung jawab. Faktor krusial seperti adaptasi berupa kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan, mengalihkan tujuan dan belajar melakukan. Tidak ada yang lebih penting diimplementasikan pada kesalahan daripada ketekunan. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang ditetapkan atau diidentifikasi oleh

---

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : PT Buku Seru, 2014), hlm. 149.

<sup>19</sup> Ibid.

keputusan-keputusan secara berkelanjutan. Implementasi juga sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengeliminasi kesalahan sehingga pada akhirnya akan didapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari serangkaian pemahaman diatas dapat dipetakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Schneider (1982) menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Sementara itu menurut Sabatier (1986) ada enam variabel utama yang dianggap memberikan kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan para *stakeholder* dan stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Terdapat beberapa model dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya yakni Model Implementasi Kebijakan George C. Edward (1980) Model implementasi kebijakan yang dikemukakan menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Komunikasi yang efektif menentukan tersampainya informasi kepada suatu kelompok dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Barbara Brown (2016) Komunikasi Efektif melibatkan kejelasan,

perkataan langsung, dan aktif mendengarkan (*clear, direct speech, active listening*).<sup>20</sup> Sedangkan menurut Harold Laswell (1960) bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa.<sup>21</sup> Michael Burgoon dan Michael Ruffner (1994) memberi batasan komunikasi sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah,<sup>22</sup>

- b) Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya finansial (keuangan) dilakukan melalui manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan manajemen keuangan (MK). Menurut Mondy (2012), manajemen sumber daya manusia adalah utilisasi dari individu-individu untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Saydam (1996) manajemen sumber daya manusia adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian sampai pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia tadi untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri.<sup>24</sup> Sumber daya manusia dapat juga disebut personil. Tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam

---

<sup>20</sup>Nofrion, *Komunikasi Pendidikan: Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran*, (Jakarta :Kencana, 2016).

<sup>21</sup>Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

<sup>22</sup>Sasa Djuarsa Sendjaja, *Pengantar Komunikasi*.(Jakarta : Universitas Terbuka, 1994).

<sup>23</sup>Mondy dan Noe, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Alih bahasa Marwansyah)*. (Jakarta:Erlangga, 2012).

<sup>24</sup>Saydam Gouzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab)*. (Jakarta:Djambatan, 1996).

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.<sup>25</sup> Sedangkan Riyanto (2001) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen untuk fungsi-fungsi pembelanjaan.<sup>26</sup> Menurut Kasmir (2010) manajemen keuangan adalah seni (*art*) dan ilmu (*science*) untuk mengelola uang yang meliputi proses, lembaga, pasar dan instrument yang terlibat dengan masalah transfer uang diantara individu, bisnis dan pemerintah,<sup>27</sup>

- c) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Karakter akan menimbulkan keyakinan serta komitmen yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Menurut Griek (2011) karakter dapat didefinisikan sebagai panduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Masnur Muslich (2011) karakter yaitu cara berfikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat dan negara.<sup>29</sup> Sedangkan Steers dan Porter (1983) mengemukakan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan individu dimana individu menjadi terikat oleh tindakannya,<sup>30</sup>
- d) Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup

---

<sup>25</sup>Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2011).

<sup>26</sup>Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta:BPFE, 2001).

<sup>27</sup>Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010).

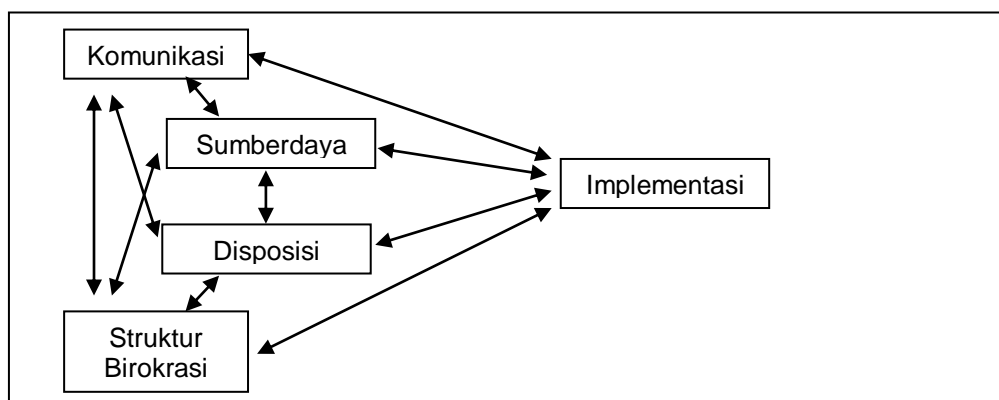
<sup>28</sup>Anita Yus, *Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak*. (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>29</sup>Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

<sup>30</sup>R.M. Steers dan L.W. Porter, *Motivation and Work Behavior*, (New York: Academic Press, 1983).

dua hal penting yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP), sedangkan struktur birokrasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Pandangan Robbins (2007) mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal.<sup>31</sup> Sedangkan Ivancevich (2008) mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerja kerangka jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen.<sup>32</sup> Struktur organisasi memuat mekanisme dan gambaran kerja suatu organisasi. Menurut Poerwadarmita (2003) definisi mekanisme adalah cara kerja dan seluk-beluk suatu alat, perkakas.<sup>33</sup>

Model implementasi Kebijakan George C Edward digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan George C Edwards**

Sumber : Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*, (Yogyakarta : Gava Media, 2009), hlm. 33.

Menurut Edwards, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi

<sup>31</sup> SP Robbins dan Judge, *Perilaku Organisasi*. (Jakarta:Salemba Empat, 2007).

<sup>32</sup> John, M Ivancevich, dkk. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. (Jakarta : Erlangga, 2008).

<sup>33</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2003).

kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Penelitian ini menggunakan teori dari George C Edward yang menyebutkan bahwa kebijakan implementasi dipengaruhi oleh empat indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas diketahui bahwa implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Sesuai pengertian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan dimana Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah diwujudkan sebagai gabungan fungsi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan BUMDesa secara lebih mendalam.

### **2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)**

Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes atau BUMDesa awal mulanya dipayungi secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.<sup>34</sup> Kemudian disinkronisasi

---

<sup>34</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Volume 7, Nomor 3, 2013, hlm. 358.

melalui peraturan pelaksana diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya beberapa peraturan tersebut diharmonisasi guna memperkuat kelembagaan dan kapasitas Desa terutama Badan Usaha Milik Desa melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDesa merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh adanya potensi ekonomi, sehingga sumber daya yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan.<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

---

<sup>35</sup> Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)". *Jurnal Politik Muda*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hlm. 121.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Lembaga ini adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa.<sup>36</sup> Adapun lingkup pengurusan dan pengelolaan BUMDesa yang diatur diantaranya sebagai berikut :

1. Bentuk Organisasi,
2. Modal,
3. Klasifikasi Jenis Usaha,
4. Kerjasama.

Bentuk organisasi BUMDesa diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Pasal 7 ayat (2) yaitu unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Menurut Hasibuan (2013) organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>37</sup> Sedangkan Waldo (2011) menyebutkan bahwa organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.<sup>38</sup> Sondang P Siagian (1985) mendefinisikan organisasi setiap bentuk persekutuan dua orang

---

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa", (Malang : Setara Press, 2015), hal. 237

<sup>37</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

<sup>38</sup> Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).

atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian satu tujuan.<sup>39</sup>

Modal BUMDesa diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Pasal 18 ayat (1) mempertegas bahwa penyertaan modal desa terdiri dari:

- 1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa,
- 2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa,
- 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa,
- 4) Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.

Modal kerja menurut Kasmir (2012) merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan organisasi perusahaan.<sup>40</sup> Mengenai pentingnya modal kerja menurut Djarwanto (2011) bahwa modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan.<sup>41</sup> Modal dicerminkan oleh struktur pembiayaan yang proporsional. Menurut Riyanto (1997) struktur modal adalah pembelanjaan

---

<sup>39</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1985).

<sup>40</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Keenam. (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2012).

<sup>41</sup> Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. (Yogyakarta:BPFE, 2011).

permanen yang mencerminkan pertimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.<sup>42</sup>

Klasifikasi jenis usaha BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- 1) Jenis bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, seperti: air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal, dan teknologi tepat guna lainnya (Pasal 19 ayat (2),
- 2) Jenis bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, seperti: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDesa, barang sewaan lainnya (Pasal 20 ayat (2),
- 3) Jenis usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, seperti: jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya (Pasal 21 ayat (2),
- 4) Jenis bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, seperti: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, kegiatan bisnis produktif lainnya (Pasal 22 ayat (2),
- 5) Jenis bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, seperti: memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa (Pasal 23 ayat (2),
- 6) Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun

---

<sup>42</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. (Yogyakarta:BPFE, 1997).

kawasan pedesaan. Unit usaha tersebut berupa pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya (Pasal 24 ayat (3)).

Adapun bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan dewan komisaris BUMDesa. Selain itu, juga dibahas mengenai menyusun rencana usaha (*business plan*), yakni penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Para pengelola BUMDesa memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDesa. Menurut Abdulsyani (1994) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>43</sup> Sedangkan Purwadarminta (1985) mengartikan kerjasama sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>44</sup> Charles H. Cooley (1930) berpendapat bahwa kerjasama akan timbul jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.<sup>45</sup>

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa perlu mengeluarkan regulasi serta mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan serta hak asal usul desa yang merupakan

---

<sup>43</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

<sup>44</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

<sup>45</sup> C.H Cooley, *Sociological Theory and Social Research*. ( New York: Henry Holt and Company, 1930).

penggalan potensi ekonomi desa serta mekanisme pendirian BUMDesa di tingkat daerah untuk mengatur permodalan serta tata kelola hingga pelibatan aparat dan masyarakat. Di tingkat pemerintahan desa perlu diatur kebijakan kepala desa dan BPD mengenai Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa serta hak asal usul dan kewenangan desa. Pemerintah daerah bersinergi bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa memetakan potensi desa, mengidentifikasi bidang dan jenis usaha BUMDesa melalui inisiasi peraturan daerah.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas diketahui bahwa badan usaha milik desa merupakan lembaga ekonomi yang didirikan unsur masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sebagai upaya penguatan perekonomian. Sesuai pengertian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini sejalan dengan konsep BUMDesa dimana Implementasi Kebijakan diwujudkan bagi penerapan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa.

### **2.1.3 Pariwisata**

Keindahan dan pesona alam merupakan pemberian atas keanekaragaman wilayah yang dapat dimanfaatkan menjadi daya tarik serta potensi wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.<sup>46</sup> Daya tarik wisata menjadi potensi pengembangan wisata yang dapat dimaksimalkan. Potensi wisata dapat diselenggarakan melalui konsep pariwisata. Beberapa definisi maupun pengertian pariwisata diantaranya menurut beberapa ahli. James J Spillane (1987) berpendapat bahwa pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

ilmu.<sup>47</sup> E.Guyer-Freuler (1988) merumuskan pariwisata sebagai berikut : pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*), mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut. Sementara itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pariwisata adalah seluruh kegiatan yang mendayagunakan potensi wisata untuk melalui penyediaan fasilitas dan layanan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 7 menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Adapun lingkup pembangunan kepariwisataan diantaranya :

1. Destinasi Pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan

---

<sup>47</sup> James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Kanisius, 1987).

fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Destinasi menurut Daryanto (1997) adalah tempat atau daerah tujuan.<sup>48</sup> Sementara destinasi wisata menurut Hadinoto (1996) adalah suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, yang mana ia dapat tinggal dan berdomisili selama periode waktu tertentu.<sup>49</sup> Adapun menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan,

2. Pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pemasaran menurut Kertajaya (2004) adalah sebuah konsep bisnis strategis yang bertujuan untuk meraih kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder utama yaitu pelanggan, orang-orang dalam organisasi serta pemegang saham.<sup>50</sup> Selain itu menurut Hasyim (1994), pemasaran juga merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif.<sup>51</sup> Sedangkan pemasaran menurut Kottler (1997) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

---

<sup>48</sup> S.S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. (Surabaya: Apollo, 1997),

<sup>49</sup> Kusdianto Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. ( Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996)

<sup>50</sup> Hermawan Kartajaya, *Positioning, Diferensiasi, dan Brand*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>51</sup> Ali. I. Hasyim, *Tataniaga Pertanian*. Buku Ajar. (Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 1994).

menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain<sup>52</sup>,

3. Kelembagaan Kepariwisata, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Kelembagaan pariwisata menurut Gamal (2002) sebagai susunan organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian.<sup>53</sup> Sementara menurut Kuntowijoyo (2006) mengartikannya sebagai lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan rekreatifnya.<sup>54</sup> Adapun pembangunan kelembagaan kepariwisataan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Berdasarkan pemahaman tentang pariwisata tersebut diatas diketahui bahwa pariwisata merupakan seluruh rangkaian dan aktivitas berwisata yang dikembangkan serta dikelola oleh pemerintah maupun non pemerintah sebagai perwujudan objek wisata kunjungan memanfaatkan potensi wisata lokal. Sesuai pengertian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini sejalan dengan konsep pariwisata dimana Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan potensi wisata lokal.

#### **2.1.4 Ekonomi Pertahanan**

Sebagai suatu disiplin ilmu, Ekonomi Pertahanan bukan hanya melihat bidang ekonomi dari perspektif pertahanan tetapi juga menjadi

---

<sup>52</sup>Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Terjemahan Jaka Wasana. (Jakarta: Salemba Empat, 1997).

<sup>53</sup>Suwantoro Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).

<sup>54</sup>Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*. (Yogyakarta : Andi, 2006).

kajian yang menjelaskan fenomena ekonomi dalam dimensi ketahanan. Sebagai gabungan dari dua buah kajian keilmuan yakni ekonomi dan pertahanan sama-sama memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Pemahaman mengenai ekonomi pertahanan telah banyak disinggung oleh beberapa pendapat. Menurut Yusgiantoro (2014), ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Ekonomi pertahanan sebagai suatu multidisiplin ilmu akan membahas alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik yang diterapkan pada topik-topik yang terkait dengan pertahanan.<sup>55</sup> Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal pertahanan negara.

Pendapat lain mengenai ekonomi pertahanan diantaranya menurut Sapolsky menjelaskan, bahwa sektor pertahanan adalah bisnis<sup>56</sup>. Hal ini berkaitan dengan anggaran pertahanan (*defense budget*). Oleh sebab itu, ekonomi pertahanan tidak akan berjalan, jika tidak ada dukungan keuangan dari pemerintah, untuk membiayai pertahanan negara. Selain itu, ekonomi pertahanan memiliki konsep untuk mendukung sistem pertahanan negara. ada dua syarat utama bila ingin membangun pertahanan negara kuat, yaitu; kesejahteraan dan keamanan<sup>57</sup>. Bila ekonomi masyarakat tercukupi, maka tidak ada konflik serta perselisihan diantara masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tentang ekonomi pertahanan tersebut diatas diketahui bahwa ekonomi pertahanan merupakan suatu disiplin yang mengkaji tentang alokasi sumber daya yang dimiliki guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara demi mencapai

---

<sup>55</sup> Purnomo Yusgiantoro, "Ekonomi Pertahanan : Teori dan Praktik", (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal 5.

<sup>56</sup> Syarifuddin Tippe, "Ilmu Pertahanan", (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hal 73.

<sup>57</sup> Purnomo Yusgiantoro, *op cit.*, hlm 55.

kedaulatan bangsa di bidang ekonomi. Sesuai pengertian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini sejalan dengan teori tersebut diatas, bahwa Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pertahanan negara serta keutuhan dan kedaulatan negara di bidang ekonomi.

### 2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat

Sebagian besar manfaat pengembangan ekonomi diarahkan guna pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan bisa dimaknai dengan memberikan daya upaya disertai kesadaran untuk memperoleh kemampuan dan kekuatan. Pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat dijelaskan oleh beberapa pendapat diantaranya Priyono dan Pranarka (1996) yang menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability or to enable*.<sup>58</sup> Pemaknaan pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang belum berdaya. Sedangkan pemaknaan kedua yakni memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Suparjan dan Hempri (2003) menerangkan pemberdayaan sebagai makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.<sup>59</sup> Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Stewart (2006) mengemukakan konsep pemberdayaan sumber daya manusia sebagai berikut :<sup>60</sup>

1. *Enabling* (membuat mampu) adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki segala sumber daya yang diperlukan untuk dapat

<sup>58</sup> Onny S Priyono, A.M.W. Pranarka, "Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi", (Jakarta : CSIS, 1996), hlm.77.

<sup>59</sup> Suparjan, Hempry Suyatno, "Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan", (Yogyakarta : Aditya Media), hlm. 43.

<sup>60</sup> Aileen Mitchel Stewart, "Empowering People: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia", (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 77.

diberdayakan secara penuh, sumber-sumber daya itu pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan yang disepakati.

2. *Facilitating* (memperlancar) merupakan tugas yang diemban oleh manajemen untuk menghilangkan segala macam rintangan, halangan ataupun penundaan yang menghalangi staf untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Halangan yang ditemui dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan maupun informasi yang tersedia kurang memadai.
3. *Consulting* (berkonsultasi) adalah manajemen yang memberdayakan ingin menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian memanfaatkannya. Komunikasi yang menyeluruh diperlukan tidak hanya pada masalah yang sifatnya rutin akan tetapi hal-hal yang bersifat strategis tetap harus dikomunikasikan dengan baik.
4. *Collaborating* (bekerja sama) adalah kerjasama antara seluruh komponen yang terlibat mulai dari tingkat atas atau pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan menjadi tujuan akhir yang akan membuktikan tidak hanya seberapa besar kecakapan yang dimiliki seorang pemimpin dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga seberapa kuat kemauannya dan diperlukan koordinasi untuk melaksanakannya secara penuh dari setiap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.
5. *Mentoring* (membimbing) adalah bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi bawahan dan rekan kerja merupakan tahap hidup dan sekaligus sebuah teknik manajemen. Merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya dengan bekerja sama dengan orang lain dibandingkan berusaha untuk mengerjaannya sendirian.
6. *Supporting* (mendukung) adalah memberikan dukungan yang tepat jauh lebih utama daripada peran kepemimpinan tradisional ataupun pengendalian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempermudah berkonsultasi, melatih dan membimbing.

Berdasarkan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat tersebut diatas diketahui bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka memperoleh kemampuan serta meningkatkan kekuatan sehingga mampu mencapai kemandirian. Sesuai pengertian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini sejalan dengan pendapat bahwa Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa merupakan keterlibatan serta peran pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa diarahkan menjadi pengembangan pemberdayaan masyarakat.

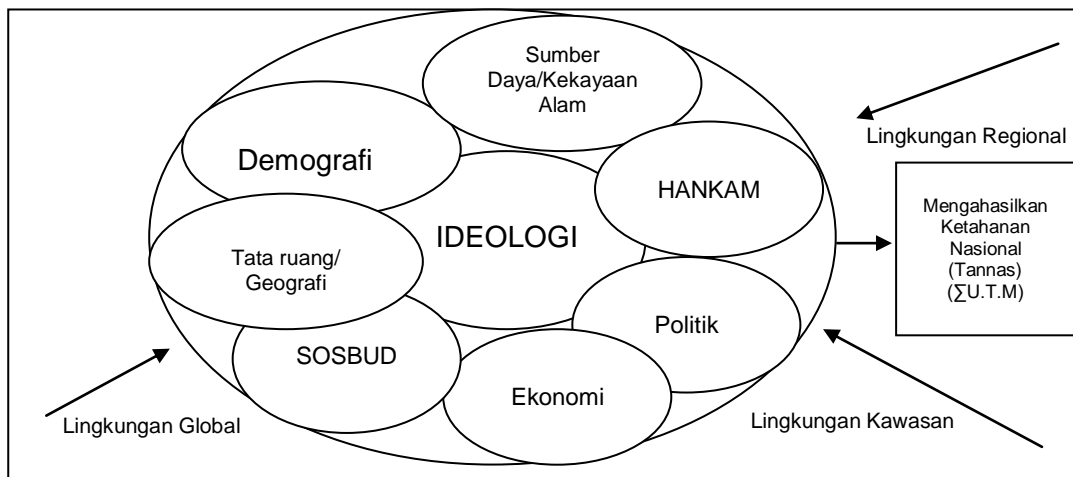
#### **2.1.6 Ketahanan Ekonomi Daerah**

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan negara (NKRI), diperlukan pendekatan pembangunan, yang merefleksikan kebersamaan, yang demokratis, yang interdisipliner. Karena itu pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif integral yang berprinsip interdisipliner, holistik, mengikutsertakan seluruh *stake holders* pembangunan (secara selektif). Keberhasilan sektor-sektor pembangunan yang terintegrasi dengan baik pada akhirnya akan menentukan kelayakan sosial yang dihasilkan, yakni tingkat Ketahanan Nasional. Yang dimaksud dengan Ketahanan Nasional sebagai kondisi, ialah kondisi dinamik bangsa sebagai resultante hasil pembangunan fisik dan non fisik yang ukurannya adalah fungsi-fungsi keuletan, ketangguhan dan kemandirian dihadapkan dengan lingkungan strategis yang dihadapi.<sup>61</sup>

Sebagai sebuah kondisi, Ketahanan Nasional dapat dilukiskan sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Amin Ibrahim, *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hal.18.



**Gambar 2.3 Konfigurasi Ketahanan Nasional (Tannas)**

Sumber : Amin Ibrahim, *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hlm.28.

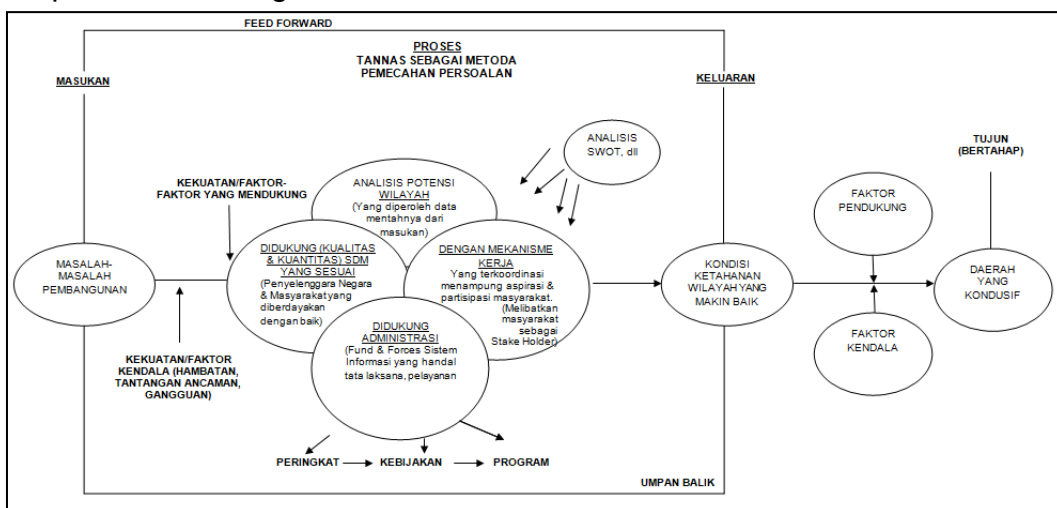
Dari konfigurasi diatas terlihat bahwa tujuan pembangunan bertahap ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang makin ulet, tangguh dan mandiri (UTM) (U = Ulet; T = Tangguh; M = Mandiri) sesuai kondisi yang dihadapi. Karenanya, Ketahanan Nasional bersifat kondisional dan diusahakan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Keuletan – Ketangguhan – Kemandirin bangsa yang bersifat dinamis tersebut diperoleh melalui keserasian interaksi antar aspek pembangunan yang meliputi aspek tata ruang wilayah, sumber daya/kekayaan alam, demografi, ideologi politik, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara.

Ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kehidupan ekonomi bangsa dan negara. Keberhasilan pembangunan pada tahap tertentu akan meningkatkan ketahanan ekonomi, dan ketahanan nasional yang diperoleh merupakan modal utama untuk merancang pembangunan selanjutnya. Amin Ibrahim (2006) memformulasikan konsep ketahanan

nasional sebagai metode pemecahan persoalan pembangunan sebagai berikut :

1. Analisis Potensi Wilayah (APW) meliputi analisis terhadap kondisi tata ruang wilayah/geografi, pemanfaatan/pelestarian sumber daya/kekayaan alam, demografi, ideologi-politik, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara,
2. Mekanisme kerja meliputi dimensi penyaluran aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh penyelenggara negara (terutama oleh badan-badan perencana sebagai intinya),
3. Dukungan sumber daya manusia, terutama penyelenggara negara dan pilar-pilar stake holders pembangunan (baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif),
4. Dukungan administrasi meliputi antara lain anggaran, sistem informasi dan tata laksana.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Tannas berfungsi sebagai kondisi atau merupakan tolok ukur bertahap keberhasilan pembangunan yang dinamis dan sekaligus berfungsi sebagai metode pemecahan permasalahan pembangunan. Adapun pendekatan pembangunan yang diterapkan pada skala daerah (wilayah) tersebut diimplementasikan dan diaplikasikan sebagai berikut :



**Gambar 2.4 Model Ketahanan Wilayah**

Sumber : Amin Ibrahim, *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hlm.35.

Analisis Potensi Wilayah dari masukan, dianalisis lebih lanjut melalui Mekanisme Kerja koordinatif oleh penyelenggara negara, sehingga partisipasi dan aspirasi dari stake holders (LSM, Organisasi Profesi, Para Pakar/Tokoh) secara elektif dapat tersalurkan dengan baik. Agar pembangunan berhasil maka Dukungan Sumber Daya Manusia (terutama penyelenggara negara dan pilar-pilar stake holders pembangunan) harus terus ditingkatkan sejak perencanaan-pelaksanaan-pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah. Diperlukan pula Dukungan Administrasi yang sesuai (dana - daya - sistem informasi - tata laksana yang baik).

Lebih lanjut menurut Pranowo (2010), Ketahanan nasional dalam bidang ekonomi harus dipahami sebagai kondisi dinamis kehidupan bangsa Indonesia yang mengandung keuletan, ketangguhan dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala macam gejolak ekonomi di tingkat domestik, regional, maupun internasional yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>62</sup> Menurut Rose (2004), ketahanan ekonomi, mengacu pada respon masyarakat untuk menghindari beberapa potensi kerugian.<sup>63</sup>

Sementara itu teori dari Lemhannas RI merumuskan parameter ketahanan ekonomi dalam berbagai indikator, yaitu: (a) tingkat kemiskinan, (b) tingkat pengangguran, (c) ketimpangan pendapatan antar penduduk, (d) *purchasing power parity*, (e) tabungan dan investasi

---

<sup>62</sup> Ratih Azka Probovury, "Pengembangan Industri Kreatif Eceng Gondok Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Semarang", *Tesis Magister*, (Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2018), hlm. 11.

<sup>63</sup> Admery Rossie Uli Wanda, "Evaluasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Pilar Warnapersada Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah", *Tesis Magister*, (Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, 2018), hlm. 42.

masyarakat, serta (f) pertumbuhan penerimaan pajak per tahun dan presentase pemasukan pajak terhadap PDRB.<sup>64</sup>

Ketahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi. Dimensi-dimensi itu meliputi :

- a. Stabilitas ekonomi
- b. Tingkat integritas ekonomi
- c. Ketahanan sistem ekonomi terhadap guncangan dari luar sistem ekonomi
- d. *Margin of safety* dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi
- e. Keunggulan kompetitif produk-produk ekonomi nasional
- f. Kemantapan ekonomi dari segi besarnya ekonomi nasional
- g. Tingkat integritas ekonomi nasional dengan ekonomi global

Berikut dibawah ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan di Bidang Ekonomi contohnya negara berkembang seperti Indonesia dalam pengelolaan faktor produksi menjadi barang dan jasa sebagaimana dijelaskan oleh Lemhannas (2015).<sup>65</sup> Adapun ciri-ciri tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Bumi dan Sumber Alam
- b. Tenaga Kerja
- c. Prasarana
- d. Manajemen

Menurut Soerianegara (1977) sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun non hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Katili (1983) mengemukakan bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang

<sup>64</sup>Lemhannas. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/ Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2014).

<sup>65</sup>Samsul Wahidin, *Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>66</sup>Ishemat Soerianegara, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Bagian I*. (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 1977).

nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia.<sup>67</sup> Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Menurut Payaman (1990) tenaga kerja adalah produk yang sudah atau sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain.<sup>68</sup> Sedangkan Eeng Ahman dan Epi Indriani (2007) mendefinisikan tenaga kerja sebagai seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja.<sup>69</sup> Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Darsini (1999) berpendapat bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Hamalik (1980) sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima.<sup>71</sup> Adapun menurut Moenir (1992) sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup>J.A. Katili dan H.M.S. Hartono, *Geodynamics Of The Western Pasific Indonesian Region*, (Geodynamics Series, Volume 11, 1983).

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990).

<sup>69</sup>Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi*. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).

<sup>70</sup> Nanik Darsini, *Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi*, (Malang : Universitas Negeri Malang, 1999).

<sup>71</sup> Hamalik Oemar. *Media Pendidikan*. (Bandung : Transito Alumni, 1980).

<sup>72</sup> A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).

Handoko (1999) berpandangan manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>73</sup> Sedangkan Daft (2002) mendefinisikan manajemen sebagai pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.<sup>74</sup> Adapun Terry (2008) berpendapat manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>75</sup>

Dari teori yang telah disebutkan diatas dapat dituangkan pengertian secara teoritis dari ketahanan ekonomi daerah adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara.

### **2.1.7 Keterkaitan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dengan Potensi Wisata**

Potensi wisata yang dimiliki suatu daerah dapat dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan. Sumber daya alam dapat digali sebagai potensi ekonomi yang pemanfaatannya sangat diperlukan. Pemanfaatan potensi wisata dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan serta upaya pengelolaan potensi wisata melalui BUMDesa. Hal ini dimungkinkan untuk membentuk unit usaha wisata yang khusus

---

<sup>73</sup> T. Hani Handoko. *Manajemen*. (Yogyakarta : BPFE, 1999)

<sup>74</sup> Richard L. Daft, *Manajemen*. Edisi Kelima Jilid Satu. (Jakarta : Erlangga, 2002).

<sup>75</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).

mengembangkan potensi wisata serta memelihara objek wisata yang dimiliki. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 24 menjelaskan bahwa unit usaha BUMDesa dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.

Dukungan dana desa yang memprioritaskan terhadap pendirian serta pengelolaan BUMDesa dapat menarik upaya penggalian potensi wisata, pemeliharaan objek wisata serta pelibatan partisipasi masyarakat guna meningkatkan nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung. Melalui implementasi kebijakan yang meliputi strategi, upaya termasuk penyertaan dana desa diharapkan BUMDesa dapat meningkatkan kebermanfaatan dan keberpihakan kepada masyarakat melalui pemberdayaan potensi wisata.

#### **2.1.8 Keterkaitan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dengan Ketahanan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kesejahteraan berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi dimana dalam salah satu tujuan ketahanan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa diantaranya meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat

dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Dengan demikian pengelolaan BUMDesa mempunyai keterkaitan erat dengan ketahanan ekonomi daerah karena apabila BUMDesa mampu diterapkan secara optimal maka akan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan akan pula berdampak pada peningkatan ketahanan ekonomi daerah.

#### **2.1.9 Keterkaitan Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah**

Seperti halnya dengan sektor industri lainnya, industri pariwisata memberikan pengaruh terhadap perekonomian di daerah atau negara tujuan wisata. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya atau antara suatu negara dengan negara lainnya. Pengunjung yang datang ke daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya menggunakan sumber daya dan fasilitas serta mengeluarkan uang untuk berbagai keperluan. Jika jumlah kunjungan meningkat maka akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perekonomian di lokasi obyek wisata tersebut.

Dampak yang sama ditimbulkan BUMDesa melalui unit usaha wisata terhadap pengembangan ekonomi. Pengelolaan potensi wisata melalui unit usaha bisnis di bidang pariwisata mendorong partisipasi masyarakat sehingga berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan memberikan efek ganda terhadap peningkatan lapangan pekerjaan serta sumber pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti dan Hapsari Wahyuningsih (2016) menjelaskan bahwa pengembangan potensi Desa Wisata Ponggok Kabupaten Klaten

dilakukan oleh BUMDesa Tirta Mandiri sekaligus sebagai pengelola objek wisata. Peran BUMDesa sangat krusial sebagai fasilitator dalam membina serta memberdayakan masyarakat ponggok menjadi pelaku utama (*main actors*) dengan mengedepankan prinsip partisipatif, musyawarah dan mufakat. Kebijakan pembentukan BUMDesa Tirta Mandiri oleh Kepala Desa Ponggok memang diarahkan guna mengoptimalkan potensi sumber daya di Desa Wisata Ponggok. Upaya BUMDesa sukses menciptakan pengaruh ekonomi bagi masyarakat.<sup>76</sup>

Dampak positif ekonomi menurut Leiper (1990) mengemukakan ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>77</sup> :

- 1). Pendapatan dari valuta asing
- 2). Menyehatkan neraca pembayaran luar negeri
- 3). Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata
- 4). Pendapatan pemerintah
- 5). Penyerapan tenaga kerja
- 6). Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal

Menurut WTO mengidentifikasi dampak positifnya sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal
- 2). Memacu pengembangan lahan yang kurang produktif
- 3). Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal bagi suatu daerah atau negara.
- 4). Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut.
- 5). Mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru.
- 6). Menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktifitas ekonomi.
- 7). Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah.

---

<sup>76</sup> Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti dan Hapsari Wahyuningsih, "Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten". *Jurnal Pariwisata Indonesia*, Volume 11, Nomor 2, 2016.

<sup>77</sup> Neil Leiper, *Tourism System: An Interdisciplinary Perspective*, (Palmerston North New Zealand, 1990).

8). Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber *revenue* bagi otoritas lokal.

Seluruh manfaat ekonomi tersebut diatas memberikan dampak terhadap dunia usaha serta bermanfaat bagi masyarakat. Potensi wisata yang dimiliki memberi keuntungan dan pendapatan (*income*). Pengembangan potensi wisata dapat menggali dan meningkatkan kesejahteraan yang digerakkan oleh pendapatan dan keuntungan sehingga berujung pada kondisi ekonomi masyarakat yang semakin kuat serta menciptakan kemandirian dan ketahanan ekonomi.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis dan pembahasan yang sesuai dengan judul serta permasalahan sebelumnya yang dianggap sesuai dengan penelitian yang diangkat. Rujukan ini diharapkan memberikan penjelasan yang lebih terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Xun Wang (2007) dengan judul *One Country Two Systems : China's Economic Policies Towards State and Township/Village Owned Enterprises, 1978-1992*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi cina dipengaruhi oleh peningkatan *Township/Village Owned Enterprises (TVEs)* secara signifikan dibandingkan dengan *State Owned Enterprises (SOEs)*. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam mendukung aktivitas bisnis, memiliki kontrol yang lebih besar pada sumber daya serta memiliki sistem kontrak yang lebih baik;
2. Penelitian yang dilakukan oleh Xiangming Fang dan Rodney B.W. Smith pada tahun (2008) berjudul *Barriers To Efficiency and the Privatisation of Township-Village Enterprises*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas bisnis pada *Township/Village Owned Enterprises (TVEs)* menciptakan efisiensi

pendapatan, tenaga kerja dan keuangan dibandingkan *Private Enterprises (PEs)*. Kebijakan perubahan melalui reformasi institusi dan perlindungan hak intelektual serta hak cipta merupakan strategi pertumbuhan ekonomi cina untuk memperbaiki efisiensi perusahaan melalui investasi modal manusia (*human capital*) ;

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si (2013) dengan judul penelitian Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Hasil penelitian mengemukakan bahwa BUMDes Karangrejek berdampak terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu BUMDesa Karangrejek belum maksimal dalam menjalankan unit usahanya. Tetapi adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDes Karangrejek berjalan lancar;
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dendhi Agung Nugroho (2015) berjudul Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014-April 2015). Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan Bumdes sudah cukup bagus. Hal ini terlihat pada kinerja Bumdes Desa Babadan dalam mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pembangunan unit-unit usaha seperti unit simpan pinjam, unit kredit sepeda motor dan unit sektor riil penyewaan bengkok desa. Unit usaha Bumdes ini berorientasi pada aspek permodalan serta berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan juga membuka lapangan pekerjaan;
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hanny Purnamasari, S.Sos.,M.AP, Eka Yulyana, S.IP, M.Si., M.AP dan Rachmat Ramdani, S.IP (2016) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung Bambu Kecamatan

Karawang Timur Kabupaten Karawang. Hasil penelitian mengemukakan bahwa berdasarkan hasil temuan efektifitas pengelolaan BUMDesa di Desa Warung Bambu masih terkendala sumber daya manusia (SDM) ahli manajerial dan finansial serta kurangnya dukungan sarana prasarana untuk menjalankan kegiatan. Selain itu Pemerintah Desa Warung Bambu kurang melibatkan masyarakat desa secara luas pada forum musyawarah pembentukan BUMDesa sehingga masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas informasi dan tahapan pembentukan serta berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUMDesa;

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti dan Hapsari Wahyuningsih (2016) yang berjudul Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa BUMDesa Tirta Mandiri berhasil melakukan pengembangan potensi desa wisata, pemberdayaan masyarakat setempat, memelihara objek wisata Umbul Ponggok menjadi objek andalan sehingga bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dan bertambahnya lapangan pekerjaan;
7. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Tri Wibawati (2015) yang berjudul Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa mengidentifikasi bahwa Bahwa kapasitas organisasi, kolektivitas masyarakat serta dukungan nilai kearifan lokal pada unit usaha wisata BUMDesa Bleberan berhasil mengangkat potensi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Bleberan;
8. Penelitian yang dilakukan oleh Rivan Yarid Anbiya (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Tahun 2016) menemukan bahwa implementasi dana

desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dimana penggunaan dana desa lebih besar digunakan untuk pembangunan desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, implementasi dana desa belum mampu meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara signifikan karena pembangunan kurang berfokus pada bidang ekonomi sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Dari penelitian tersebut di atas, dibentuk kedalam sebuah matriks perbandingan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

NO	PENELITI	METODE DAN TUJUAN PENELITIAN	HASIL KAJIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Xun Wang, 2007; <i>One Country Two Systems : China's Economic Policies Towards State and Township/Village Owned Enterprises</i> , 1978-1992	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan guna mengetahui secara mendalam terkait kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap peningkatan aktivitas bisnis <i>Township/Village Owned Enterprises (TVEs)</i> dimana <i>State Owned Enterprises (SOEs)</i> cenderung menurun	Analisis yang dilakukan terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah menjelaskan bahwa <i>Township/Village Owned Enterprises (TVEs)</i> memiliki dukungan distribusi kebijakan pemerintah, memiliki kekuatan karena bebas dari kontrol pemerintah serta sistem kontrak yang berorientasi terhadap pasar dibandingkan <i>State Owned Enterprises (SOEs)</i>	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang berfokus pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi TVEs, sedangkan perbedaannya terletak pada strategi adaptif terhadap pasar bagi pengembangan TVEs
2	Xiangming Fang dan Rodney B.W. Smith, 2008; <i>Barriers To Efficiency and the Provatization of Township-Village Enterprises</i>	Kuantitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja ekonomi pada <i>Township/Village Owned Enterprises (TVEs)</i> dan <i>Private Enterprises (PEs)</i>	Bahwa <i>Township/Village Owned Enterprises (TVEs)</i> memberikan pengaruh terhadap efisiensi pendapatan, tenaga kerja dan keuangan dibandingkan <i>Private Enterprises (PEs)</i> . Hal ini dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Cina melalui efisiensi.	Persamaan penelitian berupa pandangan terhadap efisiensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat serta perbedaannya pada dampak simultan terhadap peningkatan ekonomi negara
3	Dantika Ovi Era Tama dan	Kualitatif, Penelitian ini	BUMDes Karangrejek berdampak terhadap	Penelitian sama-sama melihat

	Yanuardi, M.Si, 2013; Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul	bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul	perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa semakin lancar dengan adanya dana yang dihasikan BUMDesa. Ditemukan juga hambatan dalam pengelolaan BUMDes yang belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya. Dari ketujuh unit BUMDES yang ada baru tiga yang telah berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang belum mahir dalam mengolah unit-unit tersebut.	efektivitas dan upaya pendirian serta pengelolaan BUMDesa sementara dibedakan oleh obyek penelitian yang hanya satu unit BUMDesa.
4	Dendhi Agung Nugroho, 2015; Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan program BUMDes dan juga manfaat yang didapat oleh masyarakat penerima bantuan yakni masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	Masyarakat cukup puas terhadap penerapan program dan kinerja BUMDes. Pembangunan unit usaha BUMDes berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terutama pada aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok dan membuka lapangan pekerjaan. Unit usaha ini bertujuan mengatasi permasalahan keuangan masyarakat	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya kebermanfaatan BUMDesa terutama pada pembangunan unit usaha sementara itu perbedaan terletak pada dampak terhadap rumah tangga miskin dibandingkan masyarakat desa secara

	Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)		sehingga merupakan alternatif dalam mengatasi masalah permodalan masyarakat.	keseluruhan.
5	Hanny Purnamasari, S.Sos.,M.AP, Eka Yulyana, S.IP, M.Si., M.AP, Rachmat Ramdani, S.IP, 2016; Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang	Efektivitas pengelolaan BUMDesa belum optimal. Hal ini terlihat jelas pada aspek sumber daya manusia (SDM) belum memiliki kemampuan manajemen dan keuangan serta kurangnya dukungan sarana prasarana. Selain itu forum musyawarah desa kurang melibatkan masyarakat secara luas sehingga informasi dan tahapan pembentukan BUMDesa tidak diketahui dan berdampak pada pengelolaan BUMDesa.	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada permasalahan diantaranya SDM, manajemen serta sarana prasarana yang dimiliki BUMDesa sementara itu perbedaannya pada objek penelitian pada level desa bukan kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik BUMDesa yang berbeda.
6	Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti, Hapsari Wahyuningsih, 2016., Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk	Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan potensi Desa Wisata Ponggok dalam meningkatkan kesejahteraan	BUMDesa Tirta Mandiri berhasil melakukan pengembangan potensi desa wisata, pemberdayaan masyarakat setempat, memelihara objek wisata Umbul Ponggok menjadi objek andalan sehingga bermanfaat	Kesamaan yang ditemukan dengan penelitian yang dilakukan fokus pada pengembangan potensi objek wisata yang dimiliki oleh desa

	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten	masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten	terhadap kesejahteraan masyarakat dan bertambahnya lapangan pekerjaan	namun perbedaan tujuan penelitian pada tingkat kesejahteraan masyarakat dibandingkan ketahanan daerah.
7	Yulia Tri Wibawati, 2015; Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas organisasi BUMDesa Bleberan dalam pengelolaan potensi wisata desa.	Bahwa kapasitas organisasi, kolektivitas masyarakat serta dukungan nilai kearifan lokal pada unit usaha wisata BUMDesa Bleberan berhasil mengangkat potensi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Bleberan	Persamaan terletak pada kapasitas BUMDesa sementara perbedaan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan pada ketahanan daerah yang akan diteliti
8	Rivan Yarid Anbiya, 2018; Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana	Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dana desa dan pendistribusian dana desa dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi	Pengimplementasian dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dimana penggunaan dana desa lebih besar digunakan untuk pembangunan desa dibandingkan pemberdayaan masyarakat.	Kesamaan penelitian meliputi penggunaan dana desa yang lebih diprioritaskan pada pembangunan dibandingkan pemberdayaan sementara perbedaannya terletak pada level kebijakan yang lebih berfokus terhadap pemerintah

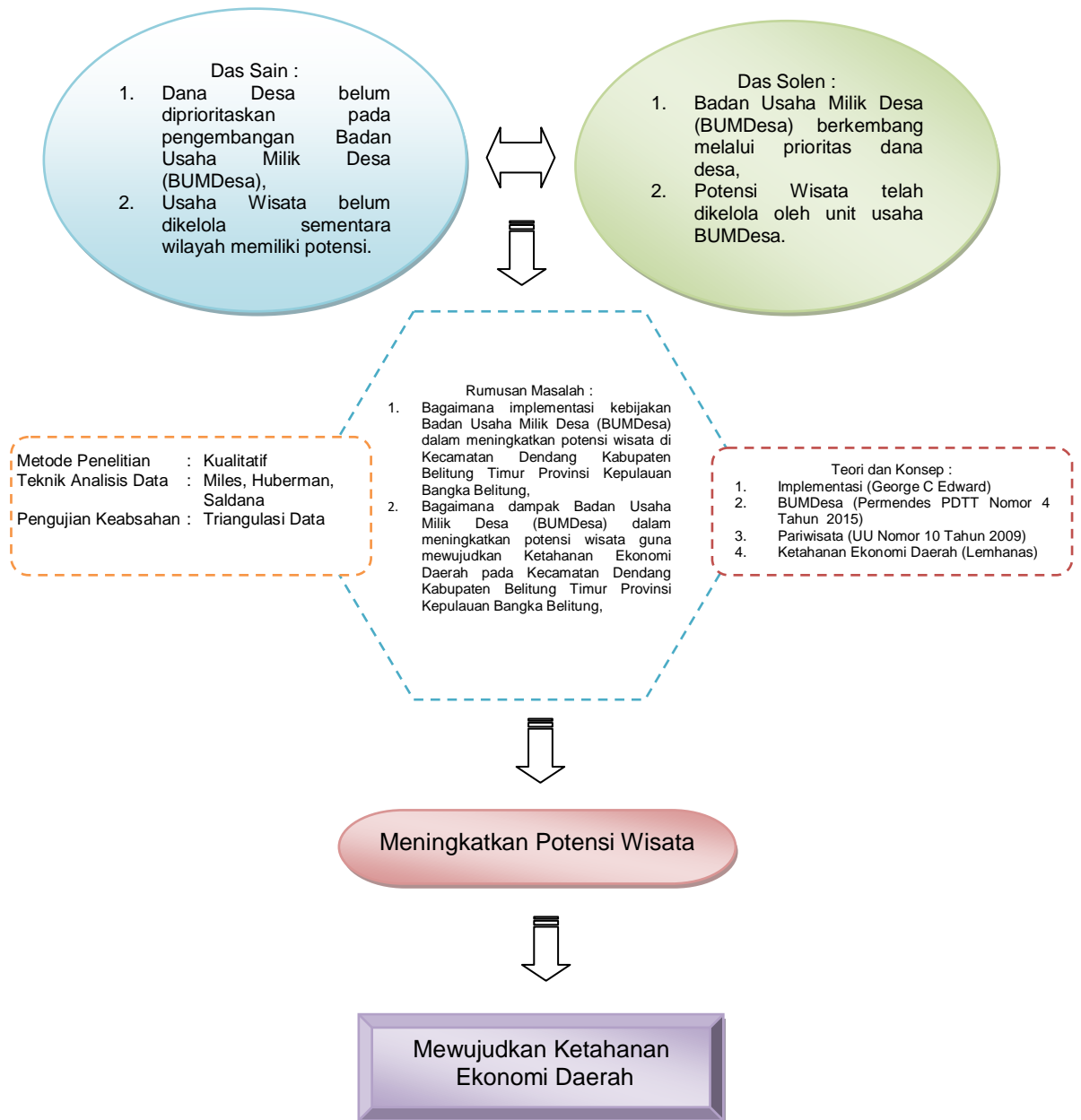
Desa Tahun 2016 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Tahun 2016)	Banten	Selain itu, implementasi dana desa belum mampu meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara signifikan karena pembangunan kurang berfokus pada bidang ekonomi sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal	pusat
--	--------	--	-------

Sumber : Data Diolah, 2018.

Dari tabel diatas penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi kebijakan BUMDesa dalam meningkatkan potensi wisata serta dampak yang ditimbulkan oleh BUMDesa dalam peningkatan wisata bagi ketahanan ekonomi daerah. Sehingga penelitian yang sangat relevan serta memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti, Hapsari Wahyuningsih (2016) yang berjudul Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Hasil penelitian yakni BUMDesa Tirta Mandiri berhasil melakukan pengembangan potensi desa wisata, pemberdayaan masyarakat setempat, memelihara objek wisata Umbul Ponggok menjadi objek andalan sehingga bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dan bertambahnya lapangan pekerjaan. Kesamaan yang ditemukan dengan penelitian yang dilakukan yakni fokus pada pengembangan potensi objek wisata yang dimiliki oleh desa namun perbedaan pada tujuan penelitian pada tingkat kesejahteraan masyarakat dibandingkan ketahanan daerah.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

**Tabel 2.2**  
**KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN**



Sumber : Data Diolah

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan penelitian studi yang menjelaskan tentang kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata guna mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang bertempat di BUMDesa pada Desa-Desa Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan yakni bulan April hingga Oktober 2018 dimulai dari kegiatan penulisan proposal penelitian, pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta seminar hasil penelitian.

**Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian**

No	Tahap Kegiatan	Tahun 2018						
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	Pembuatan Draft Proposal Penelitian							
2	Proses Pembimbingan							
3	Seminar Proposal Penelitian							
4	Perbaikan Proposal Penelitian							
5	Pengumpulan Data							
6	Analisis Data							
7	Penyusunan Laporan Penelitian							
8	Ujian Tesis							
9	Perbaikan Tesis							
10	Penyerahan Tesis							

Sumber : Data Diolah, 2018.

## 3.2 Subyek dan Obyek Penelitian

### 3.2.1 Subyek Penelitian

Subjek Penelitian menurut Arikunto (2007) merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.<sup>78</sup> Dalam sebuah penelitian, subjek berkedudukan sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati. Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>79</sup> Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono (1993) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.<sup>80</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian bahasa sebagai sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti. Subyek dari penelitian ini adalah para pemangku kepentingan terhadap BUMDesa di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada level kabupaten, kecamatan dan desa. Adapun subyek penelitian dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Subjek Penelitian**

NO	JABATAN	INSTANSI	KODE
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur	A1
2	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	A2
3	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah	A3
4	Kepala Seksi	Kecamatan Dendang Kabupaten	B1

<sup>78</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, (Jakarta : Rineka Apta, 2007), hlm. 152.

<sup>79</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 132.

<sup>80</sup> Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 862.

	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belitung Timur	
5	Tenaga Pendamping Desa	Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	B2
6	Kepala Desa	Desa Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	C1
7	Kepala Desa	Desa Balok Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	C2
8	Kepala Desa	Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	C3
9	Kepala Desa	Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur	C4
10	Direktur	BUMDesa Persada Berkah	D1
11	Direktur	BUMDesa Tebing Tinggi	D2
12	Direktur	BUMDesa Peling	D3
13	Direktur	BUMDesa Bina Karya	D4
14	Kepala Seksi Statistik Sosial	Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur	E1
15	Tokoh Masyarakat	-	E2

Sumber : Data Diolah, 2018.

### 3.2.2 Obyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2002) objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian.<sup>81</sup> Sedangkan menurut Husen Umar (2005) objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.<sup>82</sup> Sugiyono (2009) menjelaskan pengertian objek penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>83</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa objek penelitian merupakan suatu sasaran maupun objek berupa keterangan

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfa Beta, 2002).

<sup>82</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 303.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfa Beta, 2009), hlm. 38.

serta konsep yang memiliki informasi ilmiah. Adapun obyek dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan, BUMDesa, Pariwisata dan Ketahanan Ekonomi Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selain objek penelitian, sampel juga ditentukan dalam penelitian ini sehingga tidak menunjukkan keterwakilan populasi. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive (purposive sampling)* yang sengaja dilakukan untuk memenuhi kriteria penelitian. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan bahwa “sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, oleh karena itu spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya”.<sup>84</sup> Ciri-ciri khusus sampel purposive yaitu :

- 1) *Emergent sampling design*/sementara,
- 2) *Serial selection of sample units*/menggelinding seperti bola salju (snowball),
- 3) *Continous adjustment of fucosing of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan,
- 4) *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (*serial selection of sample units*). Unit sampel yang dipilih makin lama makin

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian (*continous adjustment of fucosing of the sample*). Penentuan sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf jenuh (*selection to the point of redundancy*). Besar sampel *purposive* sangat ditentukan oleh pertimbangan informasi. Pertimbangannya lebih pada kemampuan informan untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.

Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sesuai tujuan peneliti yang ingin mengetahui secara mendalam implementasi BUMDesa. Sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan BUMDesa pada Desa-Desa di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 4 unit diantaranya BUMDesa Persada Berkah, BUMDesa Tebing Tinggi, BUMDesa Pelingge dan BUMDesa Bina Karya.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian (*human instrument*), prosedur pengumpulan data sangat tergantung pada diri peneliti. Menurut Sugiyono (2009) bahwa Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>85</sup> Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dalam suatu penelitian ilmiah. Menurut Cresswell (2016) Langkah-langkah pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protocol untuk merekam/mencatat informasi.<sup>86</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode pengumpulan bahan dan data secara ilmiah

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

<sup>86</sup> John W Cresswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-4, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 253.

melalui peran serta dan keterlibatan peneliti. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data primer berasal dari observasi, teknik wawancara dan dokumentasi sementara itu sumber data sekunder berasal dari studi lapangan, literatur/kepuustakaan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen tertulis dari instansi terkait, jurnal nasional, jurnal internasional, media elektronik, internet, dan media cetak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Menurut Nasution (1988), Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Sedangkan Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>87</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka Observasi penelitian merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap obyek di lokasi penelitian. Adapun observasi penelitian dilakukan di BUMDesa pada Desa-Desa Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Teknik Wawancara

Peneliti dapat melakukan teknik wawancara untuk memunculkan pandangan serta opini terhadap penelitian. Menurut Sugiyono (2009) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *op cit.*, hlm. 226.

responden yang lebih mendalam.<sup>88</sup> Menurut Easterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>89</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan hubungan antara peneliti dan responden untuk mengetahui objek penelitian secara lebih mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa instansi diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Desa se-Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, dan BUMDesa se-Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi penelitian berupa pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2009), dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>90</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

Adapun penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mendukung kegiatan peneliti guna melakukan wawancara dan pengamatan terhadap kebijakan BUMDesa pada Desa-Desa di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya Peraturan Bupati dan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ), Laporan Keuangan Desa, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Data Potensi Wisata serta Data Jumlah Kunjungan Wisata.

### 3.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2009), Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).<sup>91</sup> Keempat jenis uji keabsahan data tersebut diantaranya :

#### 1. Uji Kredibilitas (Uji validitas internal)

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Untuk mengetahui kredibilitas data yakni melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan member check. Adapun triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. Uji *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Kriteria *transferability* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability*

Pengujian *dependability* dalam penelitian kualitatif biasanya disebut pengujian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliable* apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam

penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

#### 4. Uji *Confirmability* (obyektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, pengujian konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Uji konfirmabilitas ini digunakan agar jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada yang akan melahirkan kebohongan/pemalsuan data dalam penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, ini peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan metode Triangulasi diantaranya triangulasi sumber, dimana peneliti menguji data yang didapat dari informan dengan membandingkan antara informan lainnya. Triangulasi teknik dimana peneliti juga mengecek data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Terakhir peneliti menggunakan triangulasi waktu yakni melakukan teknik pengumpulan data pada waktu dan situasi berbeda untuk memperoleh data.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Bogdan (1982), analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga sangat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain.<sup>92</sup> Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

dalam proses penelitian kualitatif.<sup>93</sup> Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Menurut Creswell (2016) analisis data dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar.<sup>94</sup> Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya kembali.

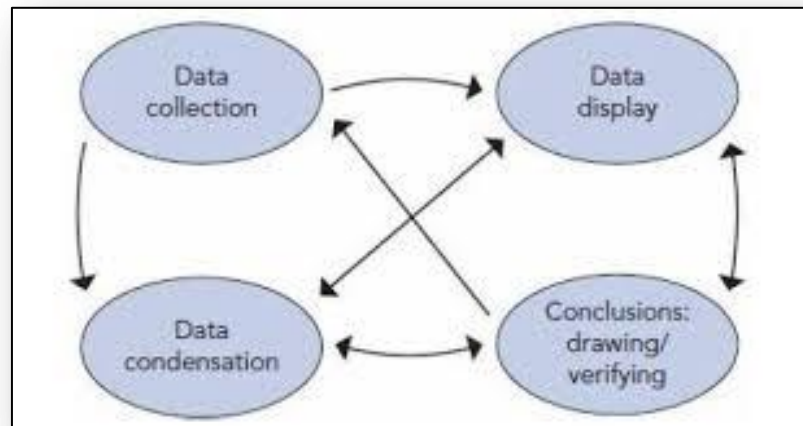
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.<sup>95</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation* dan *conclusion drawing/verification*. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> John W Cresswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi ke-4, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 260.

<sup>95</sup> Sugiyono, *op cit.*, hlm. 246.



**Gambar 3.1**  
**Analisis Data Model Interaktif**

Sumber : Matthew B. Miles,, Huberman, Michael A., Saldana

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. *Data Condensation* (Kondensasi data)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data diharapkan dapat mempermudah peneliti untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya. Pendisplayan data ini dilakukan setelah data dikondensasi terlebih dahulu.

#### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Verifikasi dan Menarik Kesimpulan)

Hal selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan yakni melakukan pengumpulan data primer dan sekunder melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan penyederhanaan data yakni menggambarkan hasil wawancara, pengamatan dan foto kegiatan untuk disajikan melalui pembahasan secara umum hingga menarik kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian.

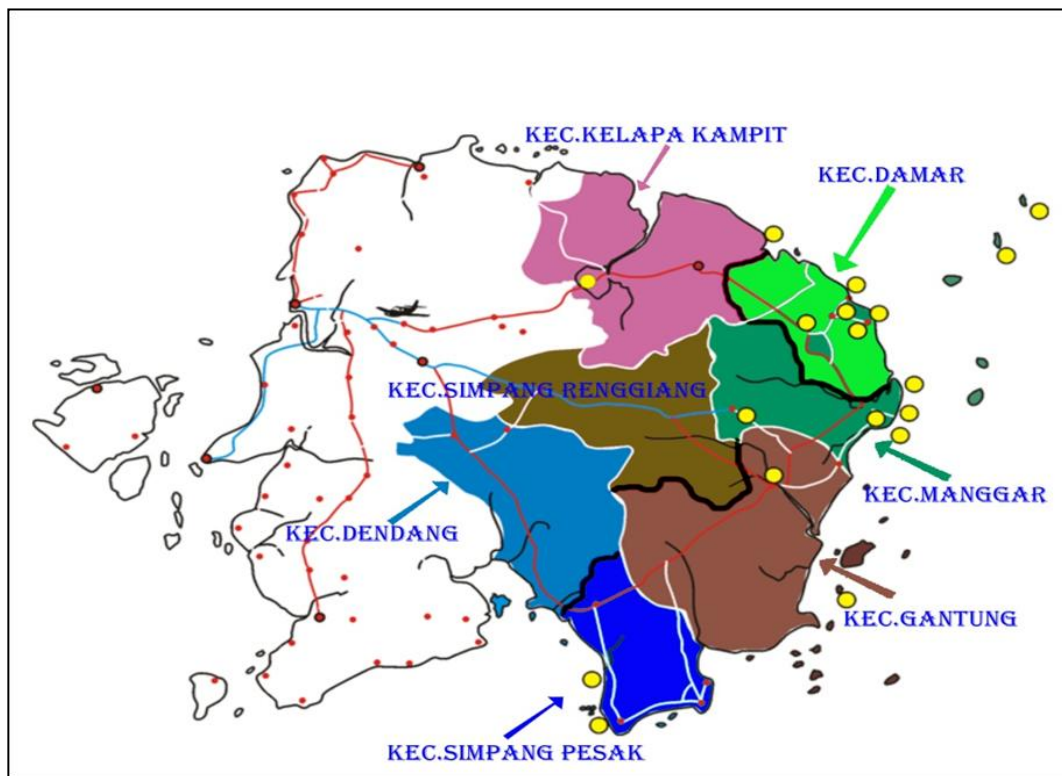
## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Kabupaten Belitung Timur

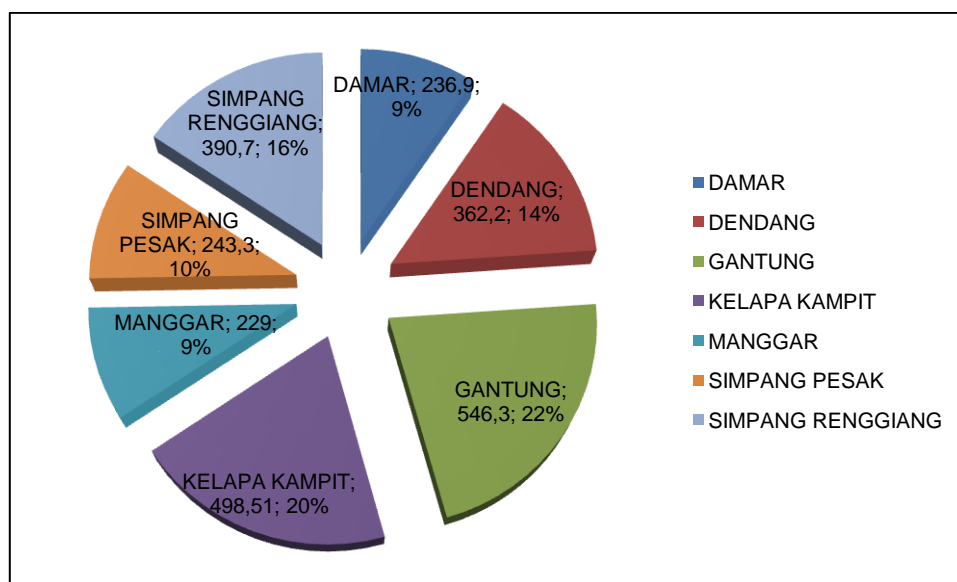
Kabupaten Belitung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 18,56$  meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi  $02^{\circ}30^1-03^{\circ}15^1$  Lintang Selatan, serta  $107^{\circ}45^1-108^{\circ}18^1$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur, adalah berupa daratan seluas  $2.506,91 \text{ km}^2$ . Batas wilayah di sebelah utara berupa laut Cina Selatan, sebelah selatan dengan laut Jawa, sebelah barat dengan kabupaten Belitung serta sebelah timur dengan selat Karimata seperti yang ditunjukkan peta wilayah sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Belitung Timur**  
Sumber : BP4D Kabupaten Belitung Timur

### A. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 wilayah kecamatan dengan luas wilayah terluas hingga terendah diantaranya Kecamatan Gantung (546,30 km<sup>2</sup>), Kecamatan Kelapa Kampit (498,51 km<sup>2</sup>), Kecamatan Simpang Renggiang (390,70 km<sup>2</sup>), Kecamatan Dendang (362,20 km<sup>2</sup>), Kecamatan Simpang Pesak (243,30 km<sup>2</sup>), Kecamatan Damar (236,90 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Manggar (229 km<sup>2</sup>) yang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 4.2**  
**Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur**

Sumber : Data Diolah

Dari luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur Kecamatan Gantung menempati posisi terluas diikuti Kecamatan Kelapa Kampit, Simpang Renggiang dan Dendang dimana 14,45% dari area luas wilayah keseluruhan. Sementara Kecamatan Simpang Pesak, Damar dan Manggar menempati posisi terbawah. Pusat pemerintahan Kabupaten Belitung Timur berada di Kecamatan Manggar sebagai ibukota. Total keseluruhan dengan 7 Kecamatan, 143 dusun dan 732 RT yang berada di seluruh wilayah.

## B. Kondisi Penduduk

Tidak mengherankan jika luas wilayah berbanding lurus dengan peningkatan penduduk Kabupaten Belitung Timur yang tergambar sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Kondisi Penduduk  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

Thn	Jml Pnddk (jiwa)	Laju (%)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )	Angkatan Kerja			Tkt Pndkn Plg Byk	Angka Kemiskinan	
				Kerja	Pengangguran	Usia Kerja		Jml	%
2015	119.394	-	47,63	59.159	1.550	60.709	-	8.710	7,33
2016	121.971	2,16	47,63	61.304	1.438	62.742	SD	8.480	6,99
2017	124.587	2,14	50	62.050	1.667	63.717	SLTA	8.440	6,81

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2018.

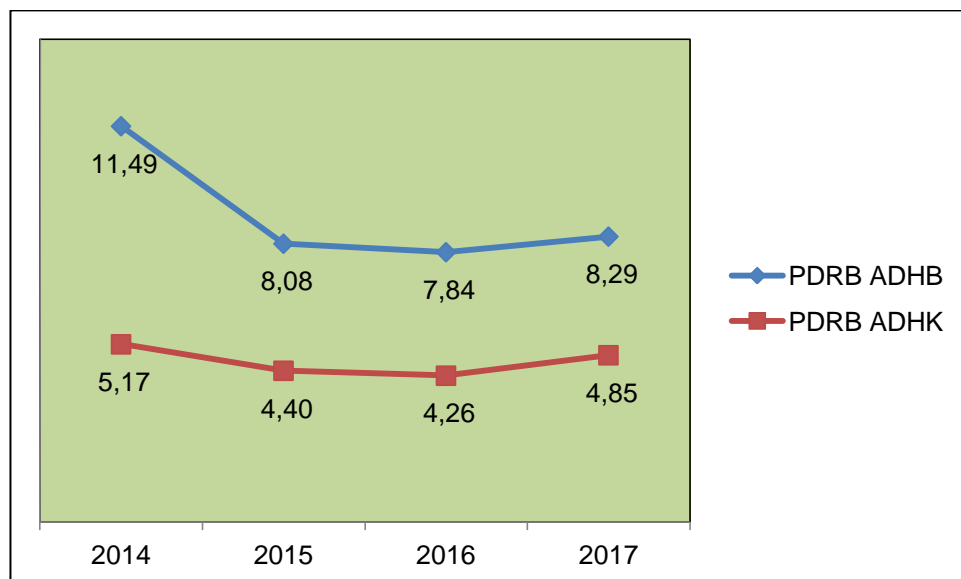
Jumlah penduduk pada tahun 2017 menjadi 124.587 jiwa dibandingkan pada tahun 2016 dan 2015 menjadi 121.971 jiwa dan 119.394 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,14 hingga 2,16 %. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sebagaimana tersebut, diketahui bahwa kepadatan mencapai 50 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2018 jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dipegang oleh Kecamatan Manggar sementara laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin terbesar dimiliki oleh Kecamatan Gantung dan Kecamatan Dendang. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh usia produktif yang berumur 30-34 tahun yang berjumlah 12.068 jiwa sementara paling rendah di usia 70-74 tahun yakni 1.594 jiwa.

Sementara itu kondisi kemiskinan pada tahun 2015-2017 tercatat menurun dari 7,33% menjadi 6,99% dan 6,81% dengan jumlah penduduk miskin 8.710 orang turun jadi 8.480 dan 8.440 orang. Jumlah angkatan kerja pada penduduk pada tahun 2017 yang dikategorikan berumur 15 tahun keatas berjumlah 63.717 orang yang terdiri dari 62.050 orang pada kategori bekerja dan 1.667 orang merupakan pengangguran terbuka, sementara jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja mencapai 29.981 orang dari jumlah 93.698 orang penduduk berusia 15 tahun keatas. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,62 % dengan rincian 1,43%

laki-laki dan 4,97% perempuan. Dari total kategori bekerja tersebut, jumlah tertinggi dipegang oleh level usia 35-39 tahun yang berjumlah 10.990 orang serta didominasi oleh tingkat pendidikan maksimum SLTA berjumlah 17.592 orang.

### C. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Belitung Timur cenderung menurun dan mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh gambaran pertumbuhan ekonomi dibawah :



**Gambar 4.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur**

Sumber : Data Diolah

Tercatat pertumbuhan ekonomi turun dari tahun 2015 pada 4,40 % menjadi 4,26% pada tahun 2016 walau mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 4,85%. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dibentuk atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2017 (dalam milyar rupiah)**

No	Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK
1.	2014	5.666	4.478
2.	2015	6.124	4.675
3.	2016	6.604	4.874
4.	2017	7.151	5.110

Sumber : Data Diolah dari BPS, 2018.

Secara keseluruhan memang terjadi kenaikan PDRB Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun (*year on year*). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 naik dari 2016 dan 2015 senilai 7,15 triliun rupiah dari 6,60 triliun rupiah dan 6,12 triliun rupiah serta atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2017 senilai 5,11 triliun rupiah meningkat dari tahun 2015 senilai 4,67 triliun rupiah dan 4,87 triliun rupiah pada tahun 2016. Namun besaran PDRB yang dihasilkan jika ditinjau dari kontribusi lapangan usaha yang membentuknya dapat mendukung argumen turunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat pada tabel bahwa pembentuk PDRB berdasarkan lapangan usaha sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Kontribusi PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Sektor	Kontribusi PDRB %			Ket
		2015	2016	2017	
	Metode Produksi				
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	25,49	25,84	24,50	
2.	Pertambangan dan penggalian	18,23	17,21	17,60	
3.	Industri Pengolahan	19,38	19,05	20,02	
	Metode Pengeluaran				
1.	Ekspor	62,16	54,78	57,38	
2.	Impor	54,95	52,37	57,21	

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2018.

Dari data diatas terlihat bahwa pembentuk perekonomian yang didapat dari penghitungan PDRB menurut lapangan usaha, beberapa

sektor yang selama ini menjadi primadona terutama sektor tiga terbesar terhadap pembentukan PDRB justru stagnan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selalu tetap berkontribusi di angka 24-25 %, pertambangan dan penggalian hanya pada kisaran 17-18 % sementara industri pengolahan selalu pada digit 19-20 %. Begitu pula jika dilihat penghitungan PDRB menurut metode pengeluaran bahwa nilai ekspor dan impor semakin menurun yakni dari 62,16 % dan 54,95 % menjadi 54,78% dan 52,37 % walau sempat naik pada 57,38% dan 57,21% namun tetap tidak kembali ke posisi semula. Hal ini menandakan bahwa sumbangan sektor lapangan usaha tertinggi dan nilai ekspor dan impor selama tahun 2015 dan 2016 mengalami perlambatan. Struktur ekonomi masih didominasi lapangan usaha yang menghasilkan produk namun semakin tahun kontribusinya semakin rendah sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur cenderung kurang stabil serta sempat mengalami trend penurunan.

#### D. Tinjauan Perekonomian

Sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang didominasi oleh tanaman perkebunan seperti Kelapa Sawit, karet dan Lada masing-masing mengalami penurunan produksi yakni :

**Tabel 4.4 Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Komoditas	Tahun Produksi (ton)			Ket
		2015	2016	2017	
1.	Kelapa Sawit	1.967,60	1.819,53	6.242,19	
2.	Karet	670,12	626,11	2.541,07	
3.	Lada	1.811,56	1.629,69	1.464,65	

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2016-2018.

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa produksi beberapa komoditas tersebut diatas kurang stabil dimana kelapa sawit, karet dan lada dengan produksi senilai 1.967,60 ton, 670,12 ton dan 1.811,56 ton pada tahun 2015 menurun menjadi 1.819,53 ton, 626,11 ton dan 1.629,69 ton pada tahun 2016 walau sempat naik pada tahun 2017 menjadi

6.242,19 ton, 2.541,07 ton dan 1.464,65 ton dibandingkan tanaman lain. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi cuaca, permintaan pasar dan harga komoditas yang digerakkan oleh pengusaha atau pemain besar.

Di sisi lain sektor pertambangan berkontribusi kurang stabil. terutama pertambangan bijih logam diantaranya produksi biji timah yang mengalami penurunan yakni :

**Tabel 4.5 Produksi Komoditas Pertambangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Komoditas	Tahun Produksi (ton)			Ket
		2015	2016	2017	
1.	Bijih Logam Timah	931	790	1.354	

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2016-2018.

Produksi timah cenderung kurang stabil dimana produksi biji timah dari 931 ton di tahun 2015 menjadi 790 ton pada tahun 2016 walau mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 1.354 ton. Sempat mengalami penurunan akibat lesunya pasar ekspor, membaiknya harga logam timah dunia sehingga harga biji timah juga ikut membaik yang membuat produksinya meningkat. Dilihat dari sumbangan nilai ekspor barang yang dikirim ke luar menunjukkan bahwa penerimaan daerah memang masih bergantung pada sejumlah komoditas pertambangan yakni timah batangan sejumlah 3.843,7686 ton, pasir kwarsa 1.320 ton dan batu besi 152 ton pada tahun 2014. Sebagai daerah penghasil timah ekspansi tujuan ekspor masih tetap terbuka terutama meliputi Jakarta, Bangka, Tangerang dan Cikarang namun penurunan jumlah produksi beresiko terhadap nilai ekspor yang sangat mengandalkan komoditas ini. Selain itu ketersediaan lahan tambang yang semakin sempit dan perizinan yang semakin diperketat turut andil dalam kenaikan serta penurunan komoditas ini.

Sejalan dengan sektor-sektor diatas perkembangan industri pengolahan juga berbanding lurus dengan penurunan sejumlah sektor lapangan usaha namun tidak berlaku bagi industri kecil dan menengah

yang cenderung memiliki tren positif jika dilihat dari jenis industri berupa usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang industri kebutuhan dasar serta produksi barang yang menunjukkan keberadaan tumbuhnya unit usaha pada tahun 2015 terhadap 2017 diantaranya :

**Tabel 4.6 Jumlah Industri Pengolahan dan Industri Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Industri	Unit Usaha			Ket
		2015	2016	2017	
	Usaha Pengolahan				
1.	Logam, Mesin dan Elektronika	166	111	85	
2.	Sandang	105	83	89	
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	238	231	208	
No	Usaha Kecil Menengah	2014	2016	2017	
1.	UMKM	1.970	2.257	2.545	
2.	Kontribusi Tenaga Kerja	2.408	3.474	2.170	

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2016-2018.

Total jumlah unit usaha yang bergerak pada logam, mesin dan elektronika turun dari 166 menjadi 111 hingga 85 unit sementara industri sandang dari 105 menjadi 83 dan 89 unit serta industri kimia dan bahan bangunan dari 238 menjadi 231 hingga 208 unit. Secara agregat jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2017 sebanyak 2.545 unit naik dari 1.970 dan 2.257 unit pada tahun 2014 dan 2016 dengan kontribusi tenaga kerja sebanyak 2.408, 3.474 dan 2.170 orang.

Seiring kurang stabil nya sektor agraris dan ekstraktif, sektor dibidang usaha jasa dan pariwisata justru menunjukkan penilaian sebaliknya. Tercatat tingkat kunjungan wisatawan domestik dan asing mengalami peningkatan walau pertumbuhannya melambat dari tahun 2015-2017 yakni 167.680 orang dan 232.871 orang hingga 250.326. Selain itu jumlah tamu menginap selama tahun 2015-2017 pun mengalami peningkatan serupa dari 3.546 orang menjadi 5.694 hingga 7.331 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Kunjungan Wisatawan			Tamu Menginap	
		Domestik	Asing	Jumlah	Kelas Akomodasi	Jumlah
1.	2015	165.630	2.050	167.680	Bintang 1	598
					Melati 2	2.005
					Melati 3	943
					Total	3.546
2.	2016	230.428	2.443	232.871	Bintang 1	1.166
					Melati 2	2.515
					Melati 3	2.013
					Total	5.694
3.	2017	246.714	3.612	250.326	Bintang 1	792
					Melati 1	249
					Melati 2	4.553
					Melati 3	1.737
					Total	7.331

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, 2018.

Sejalan dengan hal tersebut diatas sumbangan sektor jasa terus mengalami peningkatan terhadap produk domestik regional bruto. Secara agregat sumbangan jasa masih sebesar 0,4-2,5% memang masih relatif kecil namun selalu meningkat beberapa tahun. Potensi pariwisata di Kabupaten Belitung Timur dapat digerakkan sektor usaha jasa seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang fokus pada unit usaha perhotelan, penginapan serta rumah makan sehingga akan mampu meningkatkan kontribusi sektor dan beberapa sub sektor seperti sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya. Kontribusi tersebut dapat ditemui pada unit usaha yang bergerak di bidang usaha pangan, usaha kerajinan, usaha pengiriman, usaha akomodasi dan jasa lainnya yang terus naik sebagai penopang sektor usaha jasa dan pariwisata diantaranya :

**Tabel 4.8 Pertumbuhan Sektor Penopang Usaha Jasa dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Kategori	Unit Usaha			Ket
		2015	2016	2017	
1.	Industri Pangan	1.375	1.614	1.924	
2.	Kerajinan	91	238	239	
No	Sektor Usaha Jasa	Kontribusi			
1.	Transportasi dan Pergudangan				
	- Angkutan Darat	40,24	41,53	-	
	- Angkutan, Pos dan Kurir	5,44	5,61	-	
2.	Akomodasi dan Makan Minum	2,28	2,31	-	
3.	Jasa Pendidikan	2,33	2,49	-	
4.	Jasa Kesehatan	1,25	1,27	-	
5.	Jasa Lainnya	0,52	0,54	-	

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2016-2018.

Data diatas juga menunjukkan tumbuhnya industri pangan dan kerajinan masing-masing dari 1.375 hingga 1.614 dan 1.924 unit serta 91 menjadi 238 dan 239 unit pada tahun 2015 hingga 2017. Didominasi oleh sub sektor makanan dan minuman mencapai 73,94% pada tahun 2015 dan 74,85% pada tahun 2016. Sementara itu pada sektor transportasi dan pergudangan terutama sub kategori angkutan darat mengalami peningkatan selama tahun 2015 hingga 2016 yakni menyumbang 40,24 % dan 41,53 % serta sub sektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir ikut terdongkrak menjadi 5,44 hingga 5,61 %. Adapun kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya naik dari 2,28% menjadi 2,31%, 2,33% menjadi 2,49%, 1,25% menjadi 1,27% dan 0,52% menjadi 0,54% pada tahun 2015 ke 2016. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti hotel dan restoran ikut berkontribusi. Tercatat bahwa jumlah hotel serta penginapan dan restoran serta rumah makan di Kabupaten Belitung Timur masing-masing tumbuh sebanyak 15 dan 31 unit. Ditambah 156 unit warung makan dan

71 unit warung kopi sudah cukup menunjang daya tarik serta menambah tingkat kunjungan sekaligus mendukung sarana prasarana di bidang pariwisata.

Sumbangan sektor usaha tersebut membangun geliat pariwisata serta makin tersohornya Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi wisata didukung penyelenggaraan event setingkat lokal, nasional maupun internasional sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan sektor industri, akomodasi dan jasa serta menggerakkan sektor dan sub sektor lain sekaligus menjadi peluang dan modal bagi Kabupaten Belitung Timur untuk memacu perekonomiannya selain usaha agraris dan ekstraktif. Secara garis besar perekonomian Kabupaten Belitung Timur masih menggantungkan pada sumber utama hasil Bumi dan kekayaan sumber daya alam yang sifatnya masih ekstraktif dan agraris. Dari data tersebut diatas jelas bahwa sektor-sektor dan lapangan usaha yang selama ini menjadi primadona serta sumber utama pendapatan justru semakin menurun kontribusi dan hasilnya. Pelambatan ekonomi menjadi cikal bakal menurunnya tingkat ketahanan ekonomi daerah sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan sekaligus memulai peningkatan potensi ekonomi yang muncul dari sektor lain. Sektor pariwisata muncul menjadi harapan dan peluang baru yang berdampak ganda (multiplier effect) serta penggerak sektor industri dan jasa.

#### **E. Struktur Organisasi**

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari organisasi dan perangkat daerah yang tersusun secara struktur dan hierarkis. Susunan organisasi Kabupaten Belitung Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Adapun cakupan susunan organisasi tersebut mencakup 17 Dinas dan 4 Badan diantaranya Dinas

Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Kecamatan Dendang yang merupakan lingkup instansi yang menjadi pengambil kebijakan (implementor). Adapun gambaran struktur organisasi tersebut diantaranya :



**Gambar 4.4**

**Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur**

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, *Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 2*, (Manggar , 2017)

Pemilihan keempat instansi tersebut diatas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan fokus dan subfokus penelitian. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menyelenggarakan salah satu urusan di bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengembangan dimana Kecamatan Dendang sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Adapun tugas dan fungsi bidang dan seksi yang berkaitan dengan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa  
Pembentukan dinas diatur melalui Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Merujuk pada struktur organisasi, salah satu bidang yang mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dan desa yakni Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yakni pengverifikasian bahan kebijakan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dirasikan menggambarkan kajian penelitian terutama subfokus Implementasi Kebijakan BUMDesa yang menyoroti Implementasi Kebijakan berupa Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan menyoroti BUMDesa berupa Bentuk Organisasi.

## 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pembentukan dinas diatur melalui Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merujuk struktur organisasi tersebut terdapat bidang destinasi dan industri pariwisata yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata dan industri pariwisata. Adapun salah satu fungsinya yakni pengelolaan daya tarik wisata. Bidang yang dipimpin oleh seorang kepala berkaitan dengan subfokus penelitian terutama Implementasi Kebijakan BUMDesa yang menyoroti Implementasi Kebijakan berupa Disposisi, menyoroti BUMDesa berupa Klasifikasi Jenis Usaha, Kerjasama dan menyoroti Pariwisata berupa Destinasi Pariwisata serta subfokus penelitian Dampak BUMDesa yang akan menyoroti Pariwisata berupa Pemasaran dan Kelembagaan Kepariwisata.

### 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pembentukan badan diatur melalui Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur berupa Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Menurut struktur organisasi tersebut, maka salah satu bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada lingkup ekonomi dan sumber daya yakni Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Salah satu fungsi bidang meliputi perumusan dan penyusunan kebijakan ekonomi di bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata dan lainnya. Dipimpin oleh seorang kepala, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menggambarkan aspek-aspek penelitian terutama subfokus Implementasi Kebijakan BUMDesa yang menyoroti Implementasi Kebijakan berupa Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta subfokus penelitian Dampak BUMDesa yang akan menyoroti Ketahanan Ekonomi Daerah berupa Bumi dan Sumber Alam, Tenaga Kerja, Prasarana dan Manajemen.

### 4. Kecamatan Dendang

Kecamatan diatur menurut Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Belitung Timur yang memuat Struktur Organisasi Kecamatan Dendang. Salah satu struktur organisasi tersebut diantaranya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan serta memiliki salah satu fungsi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin

oleh seorang kepala seksi sesuai dengan subfokus penelitian Implementasi Kebijakan BUMDesa yang menyoroti Implementasi Kebijakan berupa Komunikasi dan Struktur Birokrasi, menyoroti BUMDesa berupa Bentuk Organisasi, Klasifikasi Jenis Usaha, Kerjasama dan menyoroti Pariwisata berupa Destinasi Pariwisata serta subfokus penelitian Dampak BUMDesa yang akan menyoroti Pariwisata berupa Pemasaran dan Kelembagaan Kepariwisataaan.

#### 5. Tenaga Pendamping Desa

Pendampingan masyarakat desa diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah desa secara berjenjang sesuai kebutuhan. Secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan atau pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dikenal tenaga pendamping profesional yang terdiri atas tenaga pendamping lokal desa (PLD), tenaga pendamping desa (PD), tenaga pendamping teknis (PT) dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TA).

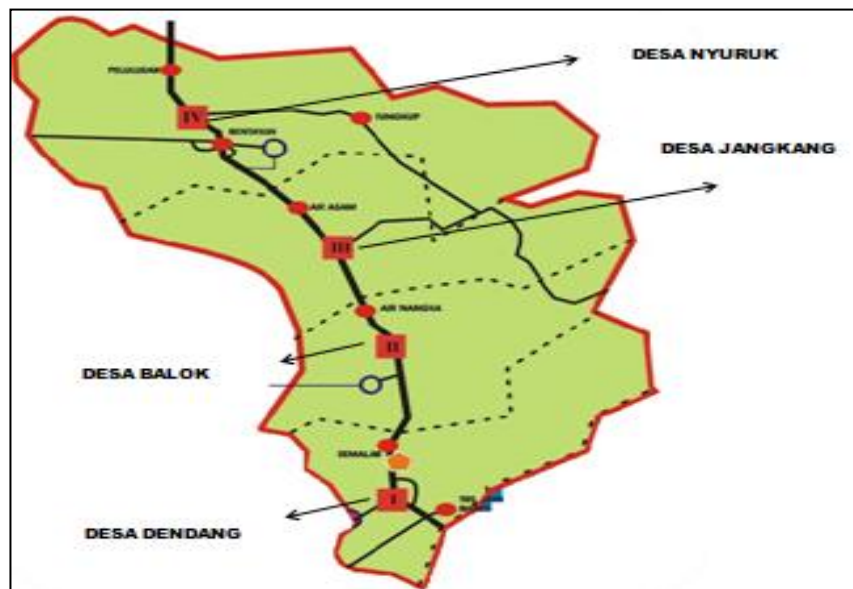
Menurut struktur pendampingan desa dikenal tenaga pendamping desa (PD) yang berkedudukan di Kecamatan. Tugas dan fungsi pendamping desa yakni mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Fungsi Tenaga Pendamping Desa cocok dengan subfokus penelitian Implementasi Kebijakan BUMDesa yang menyoroti Implementasi Kebijakan berupa Komunikasi, menyoroti BUMDesa berupa Bentuk Organisasi, Klasifikasi Jenis Usaha, Kerjasama dan menyoroti Pariwisata berupa Destinasi Pariwisata serta subfokus penelitian Dampak BUMDesa yang akan menyoroti Pariwisata berupa Pemasaran dan Kelembagaan Kepariwisataaan.

## 6. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah diantaranya struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. Menurut struktur organisasi Badan Pusat Statistik, terdapat seksi statistik sosial yang mempunyai tugas melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait. Dipimpin oleh seorang kepala seksi, fungsi seksi statistik sosial cocok dengan subfokus penelitian Dampak BUMDesa yang akan menyoroti Ketahanan Ekonomi Daerah berupa Bumi dan Sumber Alam, Tenaga Kerja, Prasarana dan Manajemen.

### **4.1.2 Kecamatan Dendang**

Kecamatan Dendang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dendang diantaranya sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, sebelah Timur dengan Kecamatan Gantung, sebelah utara dengan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan sebelah selatan dengan Kecamatan Simpang Pesak sebagaimana ditunjukkan oleh peta wilayah sebagai berikut :



**Gambar 4.5**  
**Peta Wilayah Kecamatan Dendang**

Sumber : kcsbeltim.blogspot.com

#### **A. Luas Wilayah**

Kecamatan Dendang terdiri dari 4 desa yakni Desa Dendang, Desa Balok, Desa Jangkang dan Desa Nyuruk. Pusat pemerintahan terletak di Desa Dendang dengan luas keseluruhan 364 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 9.854 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.097 jiwa dan perempuan 4.757 jiwa. Kepadatan penduduk antara luas wilayah dan jumlah penduduk yakni 27,07 jiwa/km<sup>2</sup> dengan total jumlah kepala keluarga 3.209 pada tahun 2017. Partisipasi sekolah di Dendang didukung rasio guru dan murid lumayan baik. Dari TK, SD, SMP dan SMA rasio tersebut masih di rentang 14,17 hingga 27,16. Sementara itu kondisi keamanan dan ketertiban cukup aman dimana jumlah tindak pidana selama tahun 2015 hingga 2017 yakni hanya 2-5 kasus per tahun.

#### **B. Sektor Penggerak Perekonomian**

Sebagian besar penduduk kecamatan Dendang berprofesi sebagai petani. Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mencapai 1.253 orang diikuti sektor lainnya 155 orang. Hal ini menyebabkan sektor pertanian merupakan andalan di Kecamatan

Dendang selain sektor perkebunan dan pertambangan dan beberapa industri rumah tangga seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.9 Perkembangan Sektor Perkebunan, Peternakan, Jasa dan Sarana Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015-2017**

No	Sektor	Produksi (ton)			Luas Areal (Ha)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Perkebunan - Lada	420,39	369,66	552,80	939,44	984,94	1.400,26
2.	Peternakan						
	- Sapi (ekor)	156	175	183	-	-	-
	- Ayam Ras (ekor)	858	-	1.577	-	-	-
3.	Jasa	Jumlah Usaha (unit)			-	-	-
	- Toko dan Kios	-	159	187	-	-	-
	- Rumah Makan	-	13	14	-	-	-
	- Bengkel Motor	-	21	22	-	-	-
	- Bengkel Las	-	8	12	-	-	-
4.	Sarana Transportasi - Motor	3.388	4.162	5.360	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2016-2018.

Lada sebagai komoditi andalan mengalami kenaikan luas lahan maupun produksi. Saat ini lada dengan lahan terluas tercatat menginjak 1.400,26 Ha pada tahun 2017 dari 984,94 Ha pada tahun 2016 dan 939,44 Ha pada tahun 2015 disusul kelapa sawit dan karet. Perkebunan karet dan sawit merupakan komoditi dengan areal terbesar ketiga sedangkan lada merupakan tanaman dengan luasan terbesar di Belitung Timur yang berada di wilayah Kecamatan Dendang. Tercatat dengan luas areal lada mencapai 1.400,26 Ha mampu memproduksi 552,80 ton pada tahun 2017 hasil lada juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 senilai 369,66 ton serta 420,39 ton pada tahun 2015. Selain pertanian dan perkebunan banyak petani yang mengelola kebun sekaligus mengusahakan hewan ternak. Sehingga kebun selain ditanami komoditas lada atau sawit juga di bangun kandang ternak diantaranya ayam dan sapi. Hal ini mengakibatkan hewan ternak yang dipelihara mengalami kenaikan pada ternak sapi dan ternak ayam ras dari 156, 175 menjadi 183 ekor dan 858 ekor menjadi 1.577 ekor pada tahun 2015 hingga 2017.

Usaha pertambangan juga masih menjadi primadona karena dendang memiliki wilayah penghasil timah sehingga pertambangan timah

dusahakan sebanyak 233 usaha pada tahun 2016. Selebihnya berupa usaha pertambangan tanah liat dan batu besi. Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan masih merupakan sektor usaha yang digemari. Jika dilihat potensi pariwisata di dendang cukup besar. Sektor pertanian dan perkebunan dapat dikembangkan menjadi agro wisata, wisata mangrove hingga eduwisata atau ekowisata. Jumlah obyek wisata yang dapat digali misalnya seperti Wisata Wangi Hijau dan Wisata Sejarah Situs Makam Raja Balok yang memang sudah terbangun. Selain juga dapat digali potensi Agrowisata dan Ekowisata yang bersumber dari kebun sawit milik perusahaan sawit PT SMM, PT AKS dan PT Rebinmas yang berlokasi di Kecamatan Dendang. Wisata Mangrove pada pelabuhan rakyat dendang atau dari pelabuhan teluk balok yang sudah dikembangkan menjadi Keretak Nibong. Sedangkan Eduwisata melalui pengembangan Pulau Bayan sebagai lokasi perkemahan atau camping.

Namun perkembangan usaha di bidang jasa dan pariwisata menjadi sektor yang cukup menjanjikan. Perkembangan sektor jasa mengalami kenaikan signifikan. Tercatat jumlah toko dan kios dari 159 menjadi 187 unit, rumah makan dari 13 menjadi 14 unit pada tahun 2015 hingga 2017. Usaha perbengkelan juga naik terutama bengkel motor dan bengkel las dari 21 menjadi 22 unit dan 8 menjadi 12 unit pada tahun 2015 hingga 2017. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sarana transportasi yang dimiliki masyarakat di Kecamatan Dendang yakni angkutan darat seperti kepemilikan motor dari 3.388, 4.162 menjadi 5.360 unit. Sektor usaha jasa sebagai penopang sektor lain di bidang pertanian, perkebunan serta pertambangan terutama pariwisata. Sektor-sektor ini lah yang diharapkan dapat menggerakkan sektor jasa terutama pariwisata dikarenakan Kecamatan Dendang yang terdiri dari wilayah hutan serta sejarah dan acara khas adat yang sering dilakukan seperti Maras Taun sejenis acara syukuran serta atraksi wisata di masing-masing desa seperti Nirok Nanggok dan lain sebagainya sehingga cocok sebagai pengembangan wisata.

### **C. Dukungan**

Didukung sarana prasarana yang menjanjikan maka sektor jasa dan pariwisata bisa menjadi potensi usaha ke depan. Sarana angkutan sudah memadai dikarenakan kepemilikan angkutan darat seperti mobil dan truk merupakan penunjang. Selain itu ketersediaan toko, kios serta rumah makan sudah cukup guna mendukung peningkatan potensi wisata di beberapa tempat. Ditunjang oleh pembangunan rumah peribadatan dan wc di setiap objek, rumah singgah dan restoran atau rumah makan perlu ditambah lagi. Di beberapa objek bahkan perlu dilakukan pemetaan pembangunan sarana prasarana guna meningkatkan potensi wisata yang akan dikembangkan.

#### **4.1.3 Desa-Desa Kecamatan Dendang**

Desa di Kecamatan Dendang lahir setelah terbaginya Kecamatan Dendang menjadi Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Dendang hasil pemekaran. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pembentukan Kecamatan Dendang mencakup wilayah Desa Nyuruk, Desa Balok, Desa Jangkang dan Desa Dendang. Adapun profil Desa di Kecamatan Dendang diantaranya :

##### **1. Desa Dendang**

Luas wilayah desa dendang sebesar 86,40 km<sup>2</sup> dimana merupakan 23,74% dari keseluruhan luas kecamatan. Dengan jumlah penduduk total 1.699 orang yang terdiri dari 848 orang laki-laki dan 851 orang perempuan berupa 612 kepala keluarga. Jumlah ini paling rendah dari seluruh desa di Kecamatan Dendang ditinjau dari kepadatan penduduk yang hanya 19,66 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebagai ibukota kecamatan, desa dendang terdiri dari 4 dusun diantaranya dusun air rotan, dusun jaya bhakti, dusun dendang dan dusun semalar serta 11 RT. Pemerintahan desa dendang dipimpin oleh ERWIN

sebagai Kepala Desa didukung oleh aparat desa berjumlah 13 orang, sementara BPD berjumlah 4 orang dan LPMD berjumlah 11 orang.

Sektor yang menjadi penyokong perekonomian didominasi oleh pertanian, dimana hampir 229 orang bekerja pada sektor ini baik pada kebun masyarakat maupun kebun milik perusahaan diikuti nelayan berjumlah 97 orang. Hal ini dimungkinkan karena lahan perkebunan sawit milik PT. SMM berada di desa dendang sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh maupun pegawai sawit. Selain itu pada usaha jasa tercatat ada 3 unit usaha reparasi bengkel motor serta 45 unit toko, 3 unit rumah makan dan 2 unit KUD yang tersebar di desa dendang. Pada tahun 2017 transfer dana desa yang bersumber dari APBN diestimasikan berjumlah Rp 867.544.158,56 naik menjadi Rp 1.300.000.000 pada tahun 2018.

## 2. Desa Balok

Luas wilayah desa Balok sebesar 54 km<sup>2</sup> dimana 14,84% dari keseluruhan luas kecamatan. Dengan jumlah penduduk total 2.183 orang yang terdiri dari 1.147 orang laki-laki dan 1.036 orang perempuan berupa 701 kepala keluarga. Ditinjau dari kepadatan penduduk balok menempati posisi pertama dengan kepadatan pada 40,43 jiwa/km<sup>2</sup>. Berjarak 9 Km dari desa ke kecamatan, desa balok terdiri dari 2 dusun diantaranya dusun balok dan dusun air angka serta 19 RT. Pemerintahan desa balok dipimpin oleh HAIRUDIN sebagai Kepala Desa didukung oleh aparat pemerintah desa yang berjumlah 12 orang, sementara BPD berjumlah 2 orang dan LPMD berjumlah 19 orang.

Sektor yang menjadi kontribusi terhadap penghasilan masyarakat yakni pertanian berjumlah 217 orang diikuti sektor lainnya 103 orang. Hal ini dimungkinkan karena lahan perkebunan sawit milik PT. SMM berada di desa balok sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh maupun pegawai sawit. Selain itu pada usaha jasa tercatat ada 6 unit usaha reparasi bengkel motor, 1 unit bengkel mobil dan 3 unit bengkel las serta 3 unit toko, 41 unit kios dan 3 unit rumah makan yang tersebar di

desa balok. Sejak tahun 2015 hingga 2018 pada desa balok telah dikucurkan dana desa yang semakin naik. Pada tahun 2015 transfer dana desa yang bersumber dari APBN diestimasikan berjumlah Rp 306.053.316,30 naik menjadi Rp 899.083.308,06 pada tahun 2017 dengan realisasi 100 % hingga menjadi Rp 1.099.083.308,06 pada tahun 2018.

### 3. Desa Jangkang

Luas wilayah desa jangkang sebesar 79,40 km<sup>2</sup> dimana 21,81% dari keseluruhan luas kecamatan. Memiliki jumlah penduduk paling tinggi se-Kecamatan Dendang dengan total 3.008 orang yang terdiri dari 1.557 orang laki-laki dan 1.451 orang perempuan berupa 943 kepala keluarga. Ditinjau dari kepadatan penduduk jangkang terbesar kedua dengan kepadatan pada 37,88 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa jangkang terdiri dari 4 dusun diantaranya dusun jangkang, dusun jangkang barat, dusun jangkang timur dan dusun air asam serta 27 RT yang terbanyak diantara seluruh desa di kecamatan dendang. Pemerintahan desa jangkang dipimpin oleh NURSYAMSI sebagai Kepala Desa didukung oleh aparat pemerintah desa yang berjumlah 12 orang, sementara BPD berjumlah 4 orang dan LPMD berjumlah 27 orang. Penduduk jangkang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dimana 339 orang bekerja pada sektor ini diikuti sektor perdagangan 14 orang.

Sektor ini dimungkinkan karena perusahaan sawit PT. SMM berkedudukan di desa Jangkang sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh maupun pegawai sawit atau sekedar membuka usaha. Usaha tersebut didukung oleh jumlah industri satu-satunya yang berkontribusi di Kecamatan Dendang terdiri dari 6 unit industri makanan dan 1 unit industri non makanan. Selain itu jumlah usaha jasa tercatat ada 7 unit usaha reparasi bengkel motor, 1 unit bengkel mobil dan 8 unit bengkel las serta 1 unit pasar, 42 unit toko dan 7 unit rumah makan serta tersebar di hampir seluruh desa jangkang. Perkembangan dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 di desa jangkang meningkat sangat signifikan. Adapun di tahun 2015 transfer dana desa yang bersumber dari

APBN diestimasikan berjumlah Rp 313.883.314,51 naik menjadi Rp 708.897.969 dan Rp 918.608.964,90 pada tahun 2016 dan 2017 dengan realisasi 100 % hingga menjadi Rp 918.608.964,91 pada tahun 2018.

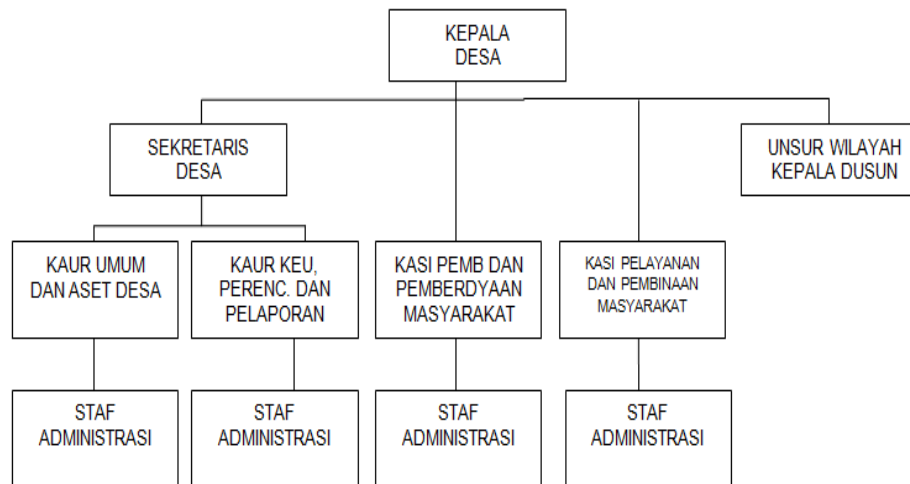
#### 4. Desa Nyuruk

Luas wilayah desa nyuruk paling luas se-Kecamatan Dendang dengan luas 144,20 km<sup>2</sup> dimana berkontribusi 39,61% dari keseluruhan luas kecamatan. Memiliki jumlah penduduk terbesar kedua se-Kecamatan Dendang dengan total 2.964 orang yang terdiri dari 1.545 orang laki-laki dan 1.419 orang perempuan berupa 953 kepala keluarga. Ditinjau dari kepadatan penduduk nyuruk dengan kepadatan 20,55 jiwa/km<sup>2</sup>. Memiliki jarak paling jauh dengan kecamatan yakni 22 km, Desa Nyuruk terdiri dari 4 dusun diantaranya dusun bentaian, dusun nyuruk, dusun pelulusan dan dusun tungkup serta 22 RT.

Pemerintahan desa nyuruk dipimpin oleh GURDI F sebagai penjabat Kepala Desa didukung oleh BPD berjumlah 4 orang, LPMD berjumlah 22 orang dan aparat desa nyuruk. Penduduk nyuruk menggantungkan hidupnya sebagai petani dimana 468 orang bekerja pada sektor ini yang berkontribusi paling tinggi diikuti pekerja pada sektor perdagangan 4 orang. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan sawit PT. AKS berkedudukan di desa Nyuruk serta lahan perkebunan sawit milik PT. SMM dan PT. REBINMAS sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh maupun pegawai sawit atau sekedar membuka usaha.

Selain itu jumlah usaha jasa tercatat ada 6 unit usaha reparasi bengkel motor dan 1 unit bengkel las serta 2 unit koperasi, 47 unit toko, 9 unit kios dan 1 unit rumah makan serta tersebar di hampir seluruh desa nyuruk. Dari tahun 2015 hingga 2018 terjadi kenaikan transfer dana desa dari pemerintah pusat di desa jangkang. Pada tahun 2015 transfer dana desa yang bersumber dari APBN diestimasikan berjumlah Rp 312.162.025,49 naik menjadi Rp 710.993.182,70 dan Rp 923.038.632,79 pada tahun 2016 dan 2017 dengan realisasi hampir 100 % hingga menjadi Rp 923.038.834,79 pada tahun 2018.

Secara umum struktur organisasi pemerintah Desa di Kecamatan Dendang terdiri dari :



**Gambar 4.6**  
**Struktur Organisasi Desa Kecamatan Dendang**  
 Sumber : Pemerintah Desa se-Kecamatan Dendang

#### 4.1.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Masing-masing desa di Kecamatan Dendang telah memiliki BUMDesa yang berdiri dari tahun 2015 hingga 2017. Memiliki karakteristik dan mengembangkan potensi wilayah masing-masing, beberapa BUMDesa membawahi unit usaha yang berbeda. Beberapa BUMDesa tersebut diantaranya :

##### 1. BUMDesa Bina Karya

Didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Nyuruk Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 di Desa Nyuruk Kecamatan Dendang. Adapun kepengurusannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nyuruk Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017. Dipimpin oleh M. ROZALI selaku direktur BUMDesa. Unit usaha BUMDesa Bina Karya terdiri dari usaha perdagangan, pengelolaan air bersih dan jasa dan berstatus aktif. Prioritas dana desa pada BUMDesa baru dimulai belakangan karena dana desa mensyaratkan pendirian bumdesa pada penggunaannya.

Adapun penyertaan modal BUMDesa Bina Karya berasal dari APBDes Desa Nyuruk dimulai pada tahun 2017 sebesar Rp 85.000.000 naik menjadi Rp 100.000.000 pada tahun 2018. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Bina Karya meliputi usaha penyadapan getah karet dan usaha pembelian getah karet. Dari penjualan karet total penerimaan yang diakumulasikan dari bulan april hingga agustus 2018 telah menembus Rp 13.320.000.

## 2. BUMDesa Pelingge

Didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Jangkang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 di Desa Jangkang Kecamatan Dendang. Adapun kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Nomor 39/SK-KADES/JK/VIII/Tahun 2017. Unit usaha BUMDesa Pelingge terdiri dari usaha perdagangan dan jasa. Berstatus aktif BUMDesa Pelingge dipimpin oleh GUNTUR sebagai direktur.

Dana desa yang diprioritaskan pada pendirian BUMDesa di desa jangkang terbilang terlambat. Sejak dikucurkan dari tahun 2015, penyertaan modal BUMDesa Pelingge yang berasal dari APBDes Desa Jangkang baru disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp 278.472.259,76 yang direalisasikan 100% pada dana kas BUMDesa. Unit usaha yang dikelola mencakup unit usaha perdagangan dan unit usaha biro dan jasa. Dari laporan operasional BUMDesa tercatat per Agustus 2018 pendapatan unit usaha perdagangan mencapai Rp 730.000 dan unit usaha biro dan jasa mencapai Rp 15.450.500.

## 3. BUMDesa Persada Berkah

Didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Dendang Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 di Desa Dendang Kecamatan Dendang. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan termasuk kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Adapun

kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dendang Nomor 36 Tahun 2017 selama periode 2017-2019. Unit usaha BUMDesa Persada Berkah terdiri dari usaha Pengelolaan aset desa, perdagangan umum dan ekonomi kreatif. Berstatus aktif BUMDesa Persada Berkah dipimpin oleh Drs. Hamdan sebagai direktur.

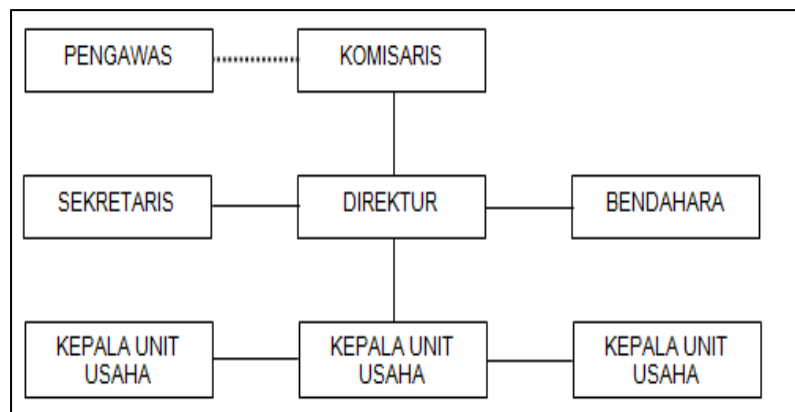
Penyertaan modal BUMDesa Persada Berkah baru dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp 100.000.000 yang berasal dari APBDes Desa Dendang yang bersumber dari dana desa. Kegiatan yang direncanakan akan dikelola diantaranya unit usaha perdagangan umum mencakup penjualan minyak tanah, bensin eceran (pertamini), pulsa listrik dan ponsel, gas dan beras serta pelatihan pembuatan kerupuk udang dan ikan.

#### 4. BUMDesa Tebing Tinggi

Pada awal didirikan BUMDesa Balok yang dahulu bernama Balok Sehati merupakan BUMDesa pertama di Kecamatan Dendang pada tahun 2015. Setelah melakukan reorganisasi yang dimulai pada tahun 2017 hingga 2018 untuk yang kedua kalinya. BUMDesa Balok akhirnya bertransformasi menjadi BUMDesa Tebing Tinggi. Dimulai kembali pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Balok Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 di Desa Balok Kecamatan Dendang. Unit usaha BUMDesa Tebing Tinggi terdiri dari jasa dan transportasi, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Berstatus aktif BUMDesa Tebing Tinggi dipimpin oleh DULHADI sebagai direktur.

Penyertaan modal BUMDesa Balok yang semula bernama Balok Sehati sudah dimulai pada tahun 2015 sebesar Rp 25.000.000 yang berasal dari APBDes Desa Balok hingga disalurkan kepada BUMDesa Tebing Tinggi menjadi Rp 112.928.000 pada tahun 2018.

Sebagian besar struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dendang terdiri dari :



**Gambar 4.7**  
**Struktur Organisasi BUMDesa Kecamatan Dendang**

Sumber : BUMDesa se-Kecamatan Dendang

## 4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian dikembangkanlah beberapa variabel. Masalah Implementasi Kebijakan BUMDesa dalam Meningkatkan Potensi Wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijawab dengan teori Implementasi Kebijakan, konsep BUMDesa dan konsep Pariwisata. Sementara Masalah Dampak BUMDesa dalam Meningkatkan Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijawab dengan teori BUMDesa, konsep Pariwisata dan konsep Ketahanan Ekonomi Daerah. Selanjutnya dipaparkan hasil penelitian berupa data primer melalui wawancara dan observasi yang dianalisis dan dilihat kesesuaiannya.

### 4.2.1 Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata

Adapun Variabel yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Struktur Birokrasi, Bentuk Organisasi, Klasifikasi Jenis Usaha Kerjasama dan Destinasi Pariwisata. Seluruh komponen tersebut merupakan representasi teori Implementasi Kebijakan, konsep Badan Usaha Milik Desa dan konsep Pariwisata yang peneliti pilih sebagai

pengembangan hasil penelitian studi kebijakan ini. Aspek yang dikembangkan dalam penelitian yakni intensitas dan metode, potensi sumber daya, komitmen pengembangan, rentang kendali dan tata kelola, karakteristik, potensi wisata, kerjasama dan kemitraan, serta akses dan layanan kepariwisataan

#### **A. Komunikasi**

Variabel ini berkaitan dengan analisa pola komunikasi yang telah dijalankan oleh pemerintah setempat sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan serta Pendamping Desa Kecamatan (Wawancara, 2018) diketahui bahwa intensitas komunikasi yang efektif telah dijalankan melalui metode sosialisasi yang dilakukan dengan melakukan pembinaan, pendampingan serta pelatihan bagi seluruh kepeguruan Manajemen BUMDesa.

Upaya pembinaan dilakukan oleh tim perintisan, pembentukan dan pendampingan BUMDesa yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu sosialisasi dijalankan oleh pemerintah Kabupaten baik dari dinas maupun oleh pemerintah pusat dari Kemendes PDTT menyangkut manajemen dan pengelolaan BUMDesa. Proses pendampingan dilaksanakan secara berkala oleh instansi pusat dan daerah dalam meningkatkan pemahaman bagi pengembangan BUMDesa walaupun tidak semua aspek terakomodir namun secara intensitas dan metode komunikasi BUMDesa sudah diterapkan melalui upaya pendirian, perintisan, pembinaan dan pendampingan.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi serta pengamatan secara langsung maka intensitas dan sosialisasi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan pengelolaan dan pemahaman terhadap BUMDesa telah dilakukan. Intensitas melalui pendampingan dilakukan secara berkala sedangkan sosialisasi melalui pembinaan dijadwalkan secara bertahap baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Pembinaan dan pendampingan kepada para pengurus BUMDesa merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan komunikasi yang efektif sehingga implementasi kebijakan BUMDesa terealisasi dan terlaksana.

## **B. Sumber Daya**

Variabel ini berkaitan dengan analisa potensi sumber daya guna mendukung realisasi BUMDesa. Aspek yang diukur mencakup potensi alam, manusia dan modal. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Wawancara, 2018) diketahui bahwa sinergi antara karakteristik sumber alam, aparatur daerah dan pembiayaan mendorong upaya sumber-sumber daya yang efektif untuk meningkatkan penataan dan pengelolaan BUMDesa.

Dukungan yang efektif seperti keahlian sumber daya manusia dan penganggaran yang tepat merupakan penguatan bagi pelaksanaan pembinaan dan pendampingan BUMDesa. Kekuatan keahlian mendorong BUMDesa untuk memetakan potensi dan peluang yang berkembang di desa sementara kekuatan penganggaran untuk memperkuat pembiayaan serta mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kepemilikan sumber daya potensial penting sekaligus modal awal untuk penguatan badan usaha milik desa. Kemampuan aparat daerah didukung pembiayaan yang efektif menggerakkan peran pemerintah yang lebih efektif dalam meningkatkan tata kelola unit ekonomi desa. Esensi sumber daya penting dalam penguatan BUMDesa diantaranya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung BUMDesa diantaranya monitoring dan evaluasi realisasi APBDes.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan pejabat yang membidangi serta pengamatan yang dilakukan bahwa sumber daya yang digunakan dalam mendukung BUMDesa secara efektif telah

diimplementasikan. Terutama sumber daya potensial yang menyangkut keanekaragaman, keahlian dan kompetensi serta pembiayaan dan penganggaran. Ketiga potensi sumber daya ini merupakan aspek yang ikut berperan penting karena sebagai modal awal dalam pengembangan BUMDesa serta mewujudkan implementasi BUMDesa lebih terarah dan tepat sasaran.

### **C. Disposisi**

Variabel ini berkaitan dengan analisa komitmen serta upaya yang dilakukan dalam mendukung pengembangan BUMDesa. Aspek yang diukur mencakup upaya peningkatan dan tugas pokok dan fungsi instansi lintas sektor. Menurut Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Wawancara, 2018) diketahui bahwa komitmen dan upaya berperan penting dalam usaha meningkatkan pengembangan BUMDesa.

Kebijakan pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu *masterplan* pengembangan perekonomian daerah. Dalam merumuskan kebijakan perekonomian daerah upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan perencanaan, pengorganisasian serta mendorong setiap instansi yang membidangi (*leading sector*) lebih berfokus pada program kegiatan peningkatan kapasitas atau pendampingan secara langsung yang ditujukan bagi pengembangan ekonomi desa. Terkait dengan pengembangan BUMDesa upaya yang dilakukan diantaranya merumuskan inovasi sekaligus menghadirkan keberhasilan BUMDesa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif guna diadopsi dan direplikasi.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi serta pengamatan yang dilakukan bahwa upaya yang dilakukan oleh instansi daerah menunjukkan upaya peningkatan sekaligus komitmen mendorong peningkatan pengembangan BUMDesa. Upaya peningkatan diwujudkan melalui keberpihakan dengan membangun kepanitiaan lintas

sektor yang diarahkan guna merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan BUMDesa. Sementara itu komitmen menunjukkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi yang melekat. dengan mendorong inovasi desa serta upaya agar BUMDesa mengakomodasi usaha produktif dan kreatif yang berkembang. Usaha ini menggambarkan upaya peningkatan dan komitmen bagi tumbuhkembang BUMDesa di daerah.

#### **D. Struktur Birokrasi**

Variabel ini berkaitan dengan analisa kewenangan serta organisasi. Aspek yang diukur mencakup rentang kendali dan tata kelola BUMDesa. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Wawancara, 2018) diketahui bahwa kendali dan tata kelola merupakan upaya penataan dan pengelolaan BUMDesa.

Pembentukan tim perintisan, pembentukan dan pendampingan BUMDesa beranggotakan instansi kabupaten hingga kecamatan. Tim perintisan, pembentukan dan pendampingan BUMDesa memiliki kedudukan yang disesuaikan dengan bidang atau sektor yang dikuasai. Dinas pariwisata merupakan instansi yang dilibatkan dalam tim perintisan, pembentukan dan pembinaan BUMDesa di Kabupaten Belitung Timur melalui metode pembinaan terjadwal. Sesuai kewenangan dan tugas fungsi di bidang kepariwisataan, dinas pariwisata menetapkan dan memberikan fatwa teknis terkait pengembangan pariwisata daerah sekaligus mendorong peningkatan potensi wisata sebagai salah satu pengembangan usaha BUMDesa.

Selain itu BP4D selalu mengarahkan instansi untuk berperan aktif dalam memberdayakan dan meningkatkan potensinya untuk berkontribusi bagi pengembangan unit ekonomi desa. Sehingga kendali terhadap

pengelolaan BUMDesa diarahkan sesuai porsi kewenangan yang menyangkut fasilitasi, monitoring dan evaluasi tata kelola BUMDesa sesuai kebijakan daerah. Adapun pelaksanaan rentang kendali dan kewenangan instansi diarahkan guna penguatan pengelolaan BUMDesa. Upaya yang dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan sesuai kewenangan dan lingkup bidang yang dikelola.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi serta pengamatan yang dilakukan bahwa upaya yang dilakukan oleh instansi daerah menunjukkan bahwa masing-masing instansi sudah memiliki rentang kendali dan kewenangan masing-masing sesuai dengan struktur dan tata kelola pengembangan BUMDesa. Kendali dan kewenangan ditunjukkan melalui tanggung jawab masing-masing instansi berdasarkan penataan potensi BUMDesa melalui pembinaan dan pendampingan yang telah diarahkan sedangkan tata kelola ditunjukkan melalui keterlibatan dalam kepanitiaan Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa yang menempatkan dinas atau badan hingga kecamatan sesuai struktur masing-masing. Kedua hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang diwujudkan melalui rentang kendali, kewenangan, struktur dan tata kelola telah mendukung penataan dan pengelolaan BUMDesa.

#### **E. Bentuk Organisasi**

Variabel ini berkaitan dengan analisa organisasi BUMDesa. Aspek yang diukur mencakup potensi dan karakteristik BUMDesa. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan (Wawancara, 2018) diketahui bahwa organisasi BUMDesa belum mencerminkan karakteristik dan potensi wilayah.

Saat ini pendirian unit usaha BUMDesa belum sesuai dengan karakteristik wilayah. Setiap wilayah memiliki identitas dan keidentikan masing-masing sesuai karakteristik wilayah seperti unit usaha pertanian,

perkebunan, peternakan atau pariwisata yang cocok dengan kondisi wilayah di Belitung Timur. Pendirian Organisasi BUMDesa di Kecamatan Dendang yang terdiri dari beberapa unit usaha atau unit bisnis belum berorientasi pada potensi wilayah atau prioritas pengembangan usaha tiap desa serta belum bergerak sesuai karakteristik wilayah yang sebagian besar masih bergantung pada sektor non produktif tanpa melihat perkembangan serta kemajuan sektor tertentu di desa.

Bentuk organisasi BUMDesa di Kecamatan Dendang telah dikategorikan sesuai karakteristik dan potensi wilayah serta diarahkan untuk menyesuaikan kategori usaha yang menjadi karakteristik masing-masing desa. Namun tidak semua desa mengakomodasi konsentrasi usaha tersebut sehingga beberapa BUMDesa mendirikan unit usahanya masing-masing yang belum tentu cocok dengan karakter wilayahnya. Hal ini menyebabkan bentuk organisasi BUMDesa bertolak belakang dengan karakteristik dan potensi wilayah. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya pelaksanaan kegiatan Studi Banding yang dilakukan untuk memetakan lebih lanjut usaha bisnisnya.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi serta pengamatan yang dilakukan bahwa setiap BUMDesa di Kecamatan Dendang belum memiliki konsep dan gagasan yang jelas terkait pengembangan unit usahanya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap unit usaha yang didirikan belum merepresentasikan karakteristik wilayah dan potensi usaha yang berkembang di desa. Karakteristik wilayah diperlukan untuk menentukan intensifikasi dan ekstensifikasi jenis usaha yang dikembangkan. Sementara potensi wilayah dibutuhkan bagi diversifikasi unit usaha. Hal ini diperlukan guna membentuk organisasi BUMDesa sesuai karakteristik wilayah dan potensi desa.

#### **F. Klasifikasi Jenis Usaha**

Variabel ini berkaitan dengan analisa jenis usaha BUMDesa. Aspek yang diukur mencakup potensi unit wisata. Menurut Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dendang dan Pendamping Desa Kecamatan Dendang (Wawancara, 2018) diketahui bahwa unit BUMDesa berpotensi mengembangkan usaha wisata.

Potensi wilayah merupakan modal bagi penguatan pemberdayaan melalui organisasi lokal tingkat desa seperti BUMDesa. Potensi tersebut berupa kealamian alam, kearifan lokal hingga situs sejarah atau objek menarik lainnya yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Hal ini mendorong unit usaha wisata sebagai salah satu unit bisnis BUMDesa merupakan keniscayaan mengingat potensi lokal sekaligus sebagai peluang bisnis bagi BUMDesa setempat. Unit usaha wisata diharapkan memainkan peranan penting bagi pondasi pengembangan BUMDesa.

Unit wisata yang saat ini akan dikembangkan berpotensi menjadi unit bisnis yang mandiri di bawah struktur BUMDesa jika mampu dikelola dengan baik. Namun perlu dorongan dari segenap pihak serta inisiatif dan kreativitas BUMDesa dalam mewujudkan realisasi unit usaha wisata apalagi potensi wisata Kecamatan Dendang menunjukkan aneka lokasi yang dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi bahwa potensi wisata mampu diwujudkan jika pemanfaatannya disertai pengelolaan dan penguatan baik oleh individu, masyarakat maupun organisasi. Unit usaha BUMDesa sebagai salah satu unit organisasi di tingkat desa mampu mewujudkan peluang bisnis yang berfokus pada pengembangan wisata. Melalui penataan dan pengelolaan unit wisata oleh BUMDesa maka pengembangan potensi wisata dapat didorong dengan memanfaatkan keberpihakan dan kebermanfaatan dana desa.

#### **G. Kerjasama**

Variabel ini berkaitan dengan analisa kemitraan badan usaha. Aspek yang diukur mencakup upaya kerjasama BUMDesa. Menurut Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan, Pendamping Desa Kecamatan (Wawancara, 2018) diketahui bahwa BUMDesa didorong untuk bermitra dan bekerja sama dengan individu, masyarakat dan perusahaan guna mengelola potensi wisata.

Pengelolaan potensi wisata dapat melalui skema kerjasama melibatkan individu, kelompok, komunitas dan perusahaan. Pemerintah selalu mengupayakan agar pengembangan lokasi dan objek tidak selalu bergantung dengan belanja pemerintah tapi dapat dengan swadaya masyarakat atau memanfaatkan CSR perusahaan. Upaya ini merupakan opsi melalui skema kerjasama komunitas atau perusahaan dengan badan usaha milik desa. Sementara itu peluang pengembangan potensi wisata terbuka lebar bagi BUMDesa melalui unit usaha wisatanya dengan komunitas masyarakat.

Potensi wisata dapat dimanfaatkan melalui kerjasama pengelolaan sehingga objek wisata potensial yang telah dikembangkan sebelumnya menjadi lebih baik dengan masuknya BUMDesa. Tentunya pengelolaan wisata akan menjadi lebih baik melalui kerja sama dan kemitraan badan usaha milik desa dengan pihak ketiga.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi bahwa keyakinan melalui skema kerja sama dan kemitraan dapat mendorong pengelolaan objek wisata potensial dapat lebih baik. Kemitraan diharapkan terwujud antara perusahaan dan BUMDesa sementara kerjasama dapat terealisasi antara kelompok atau komunitas dengan BUMDesa. Keyakinan ini didasari bahwa upaya BUMDesa bermitra dan bekerja sama dengan individu, masyarakat dan perusahaan guna mengelola potensi wisata dapat mendorong pengembangan potensi wisata menjadi lebih maju.

#### **H. Destinasi Pariwisata**

Variabel ini berkaitan dengan analisa strategi dan pengembangan wisata. Aspek yang diukur mencakup akses dan layanan serta potensi kepariwisataan. Menurut Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Seksi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan (Wawancara, 2018) diketahui bahwa dukungan penyediaan sarana prasarana kepariwisataan sangat berguna bagi pengembangan potensi wisata.

Selama ini keterlibatan Pemerintah mensupport pengembangan potensi wisata sangat terbatas di tiap wilayah sehingga diperlukan dukungan pembangunan sarana prasarana oleh pemerintah lokal setempat. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi inisiatif BUMDesa melalui unit usahanya sebagai bentuk pengembangan objek destinasi wisata lokal memanfaatkan daya tarik wilayah sekaligus kearifan lokal sebagai wujud pengembangan wisata lokal. Aksesibilitas objek wisata masih sederhana dan belum dikembangkan. Dengan gelontoran dana desa, swadaya komunitas maupun CSR perusahaan maka dapat mejadi opsi penyediaan sarana prasarana selain pemerintah daerah. Selain itu pariwisata merupakan aset dan andalan bagi pengembangan usaha bagi BUMdesa kedepan sehingga BUMDesa memerlukan prioritas dan diversifikasi jenis usaha guna mendorong pentahapan pengembangan kepariwisataan.

Guna mempercepat penyediaan akses dan layanan, strategi pengembangan sarana prasarana harus tetap dilanjutkan dengan dukungan maupun tanpa pemerintah daerah. Hal ini juga dimaksudkan guna menumbuhkan kemandirian setempat. Pemanfaatan kerjasama antara desa dan BUMDesa berupa dukungan komunitas dalam mengembangkan wisata. Sehingga dari ketiga sumber informan tersebut sepakat bahwa BUMDesa dapat berperan mempercepat penyediaan akses dan layanan kepariwisataan.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi bahwa pemerintah melakukan upaya penyediaan sarana prasarana kepariwisataan baik melalui pemerintah maupun non pemerintah. Keterlibatan tersebut membuka ruang partisipasi bagi pemerintah desa, komunitas atau kelompok serta perusahaan. Hal ini efektif guna

mempercepat penyediaan akses dan layanan bagi pengembangan potensi wisata. Perwujudan unit usaha wisata BUMDesa diharapkan dapat menelusuri peran non pemerintah serta membuka keran keterlibatan bagi penyediaan sarana prasarana meliputi aksesibilitas dan layanan kepariwisataan sekaligus pengembangan destinasi wisata lokal.

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa dan Pariwisata, peneliti berusaha menginterpretasikan hasil temuan yang terangkum sebagai berikut :

**Tabel 4.10 Rangkuman Hasil Temuan Implementasi Kebijakan BUMDesa dalam Meningkatkan Potensi Wisata**

NO	ASPEK	RANGKUMAN HASIL TEMUAN
1.	Komunikasi	Intensitas dan sosialisasi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan pengelolaan BUMDesa telah dilakukan secara berkala Pembinaan dan pendampingan kepada para pengurus BUMDesa merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan komunikasi yang efektif sehingga implementasi kebijakan BUMDesa terealisasi.
2.	Sumber Daya	Sumber daya potensial yang menyangkut keahlian, kompetensi dan penganggaran telah dikerahkan guna mengimplementasikan BUMDesa secara efektif. Ketiga potensi sumber daya ini merupakan aspek yang berperan penting sebagai modal awal dalam mengembangkan sekaligus mewujudkan implementasi BUMDesa tepat sasaran.
3.	Disposisi	Usaha yang dilakukan oleh instansi daerah menunjukkan upaya peningkatan sekaligus komitmen dalam rangka mendorong peningkatan pengembangan BUMDesa. Upaya peningkatan diwujudkan melalui keberpihakan sementara komitmen menunjukkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi.

4.	Struktur Birokrasi	Setiap instansi memiliki rentang kendali dan kewenangan masing-masing sesuai dengan struktur dan tata kelola pengembangan BUMDesa. Kendali dan kewenangan ditunjukkan melalui tanggung jawab sedangkan tata kelola ditunjukkan melalui keterlibatan dalam kepanitiaan.
5.	Bentuk Organisasi	Organisasi BUMDesa di Kecamatan Dendang belum mencerminkan konsep dan gagasan yang jelas terkait pengembangan unit usaha sehingga karakteristik wilayah dan potensi usaha yang berkembang di desa belum terepresentasikan. Sangat penting membentuk organisasi BUMDesa sesuai karakteristik wilayah dan potensi desa.
6.	Klasifikasi Jenis Usaha	Unit usaha BUMDesa sebagai salah satu unit organisasi di tingkat desa dianggap mampu mewujudkan peluang bisnis yang berfokus pada pengembangan wisata. Melalui penataan dan pengelolaan unit wisata oleh BUMDesa maka pengembangan potensi wisata dapat didorong dengan memanfaatkan keberpihakan dan kebermanfaatannya dana desa.
7.	Kerjasama	Skema kerja sama dan kemitraan dapat mendorong pengelolaan objek wisata potensial lebih baik. Upaya BUMDesa bermitra dan bekerja sama dengan individu, masyarakat dan perusahaan guna penguatan potensi wisata.
8.	Destinasi Pariwisata	Pemerintah telah mendorong penyediaan sarana prasarana kepariwisataan melalui keterlibatan pemerintah dan non pemerintah. Keterlibatan membuka ruang partisipasi bagi pemerintah desa, komunitas atau kelompok serta perusahaan. BUMDesa diharapkan membuka keran keterlibatan penyediaan sarana prasarana meliputi aksesibilitas dan layanan kepariwisataan sekaligus pengembangan destinasi lokal.

Sumber : Data Diolah

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa telah diterapkan mulai dari instansi daerah sebagai pengambil kebijakan diantaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga pelaksana kebijakan diantaranya Kecamatan Dendang hingga Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada BUMDesa se Kecamatan Dendang. Komunikasi yang tergambarkan melalui aspek intensitas dan sosialisasi terhadap BUMDesa telah diwujudkan. Potensi sumber daya juga telah dikerahkan guna mengimplementasikan BUMDesa. Disposisi yang menerangkan upaya pengembangan sekaligus komitmen mendorong peningkatan pengembangan BUMDesa serta dukungan Struktur Birokrasi yang menunjukkan rentang kendali dan kewenangan masing-masing sesuai dengan struktur dan tata kelola pengembangan BUMDesa.

Namun Badan Usaha Milik Desa yang telah didirikan dan sekarang dijalankan di Kecamatan Dendang belum secara tepat merepresentasikan karakteristik wilayah. Padahal daya tarik beberapa objek jika dikembangkan oleh BUMDesa berpotensi menjadi unit usaha wisata melalui upaya kerjasama. Adapun skema kerjasama dapat bermitra dengan individu, komunitas atau kelompok masyarakat serta perusahaan. Hal ini dapat mendorong penyediaan akses dan layanan wisata secara jelas melalui keterlibatan non pemerintah sehingga kesadaran yang diupayakan terbangun dari level terbawah atas prakarsa masyarakat. Lembaga pariwisata BUMDesa unit wisata diharapkan menjembatani serta merangkul komunitas atau kelompok masyarakat sehingga mendorong percepatan akses dan layanan kepariwisataan. Percepatan sarana prasarana penting sehingga pemanfaatannya dapat dilokalisir bagi pemasaran pada media sosial dan elektronik sebagai wujud kemajuan pengembangan objek wisata.

#### **4.2.2 Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah**

Adapun variabel yang digunakan diantaranya Modal, Pemasaran, Kelembagaan Kepariwisata, Bumi dan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja, Prasarana serta Manajemen. Komponen tersebut dikembangkan peneliti sebagai parameter Badan Usaha Milik Desa, Pariwisata dan Ketahanan Ekonomi Daerah dalam penelitian studi kebijakan ini. Adapun aspek yang diukur meliputi pendanaan, akses dan layanan kepariwisataan, metode pemasaran, bentuk lembaga pariwisata, kekayaan alam, perluasan kesempatan kerja, kondisi sarana prasarana dan kapabilitas pengelola.

##### **A. Modal**

Variabel ini berkaitan dengan analisa penyertaan modal BUMDesa. Aspek yang diukur mencakup pendanaan, bagi hasil dan keberlanjutan usaha. Menurut Direktur BUMDesa Peling, Direktur BUMDesa Persada Berkah, Direktur BUMDesa Tebing Tinggi dan Direktur BUMDesa Bina Karya serta Kepala Desa Dendang, Kepala Desa Balok, Kepala Desa Jangkang dan Kepala Desa Nyuruk (Wawancara, 2018) diketahui bahwa pendanaan BUMDesa sudah disertakan berdasarkan skema pembagian hasil dan analisis kelayakan usaha.

Penyertaan modal BUMDesa yang bersumber dari dana desa sudah dialokasikan oleh masing-masing desa. Pendanaan disisihkan dari SILPA APBDes yang baru mulai dibiayai pada tahun 2017 semenjak BUMDesa berdiri. Adapun besarnya beragam tergantung pengajuan proposal dari BUMDesa dari 85 hingga 100 juta. Dukungan dana desa dianggap berkontribusi positif bagi penyertaan modal karena sudah direalisasikan dari dana desa. Hal ini merupakan dukungan bagi operasional BUMDesa serta upaya menginisiasi jenis usaha desa sesuai karakteristik dan potensi desa.

Penyisihan penyertaan modal tersebut diatas nilainya variatif. Hal ini mendukung komitmen desa bagi penataan dan pengelolaan BUMDesa. Sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah diberikan pihak desa pada saat penyertaan modal usaha, telah disepakati bahwa ada pembagian atau setoran dari keuntungan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa. Untuk mencapai keberlanjutan usaha diperlukan pemetaan dan prioritas usaha BUMDesa pada tahapan jangka pendek dan menengah hingga panjang. Namun upaya BUMDesa di jangka pendek hingga panjang perlu didukung oleh lingkup pemerintah yang lebih tinggi sehingga capaian dan kelayakan serta prioritas bisnis akan lebih diutamakan.

Pendanaan BUMDesa bersumber dari dana desa direalisasikan sesuai peruntukan. Komitmen pendanaan terhadap BUMDesa bersumber dana desa sudah cukup baik. Upaya yang telah dilakukan diantaranya asistensi APBDes oleh Tim Asistensi Kecamatan dan Pendamping Desa guna mendorong anggaran penyertaan modal bagi BUMDesa. Anggaran penyertaan modal dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan BUMDesa dalam mendukung operasional serta unit usahanya.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat yang membidangi dibuktikan hasil observasi bahwa pendanaan, bagi hasil dan keberlanjutan usaha sudah cukup memadai. Pendanaan BUMDesa bersumber dari penyertaan modal dana desa sudah dialokasikan namun penyisihannya tidak rutin serta dilakukan per tahap. Sehingga aktivitas BUMDesa masih terbatas pada operasional belum pengelolaan unit usaha. Adapun pembagian hasil BUMDesa yang telah dilaksanakan sesuai perjanjian dan kontrak berdasarkan pengelolaan yang telah disepakati akan tetapi belum berkontribusi akibat keterbatasan manajemen dan kemampuan pengurus. Selain itu analisis kelayakan usaha penting guna mendorong pemetaan potensi usaha berdasarkan modal yang telah disertakan sehingga BUMDesa harus menetapkan prioritas bisnisnya. Pendanaan yang rutin dan bertahap disertai manajemen bagi hasil yang lebih baik serta

keberlanjutan berupa prioritas dan analisa bisnis diharapkan dapat menunjang keberhasilan pengelolaan BUMDesa.

## **B. Pemasaran**

Variabel ini berkaitan dengan analisa media pemasaran. Aspek yang diukur mencakup metode pemasaran. Menurut Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan (Wawancara, 2018) diketahui bahwa kemajuan teknologi dan informasi membentuk pemasaran bagi potensi wisata di berbagai media tidak terbatas.

Pemasaran merupakan lingkup dimana wisata yang potensial dapat dipublikasikan di berbagai media. Dari media cetak hingga elektronik atau media sosial sebagai sarana promosi bagi masyarakat maupun media massa terhadap objek wisata. Bentuk promosi inilah yang menjadi saluran pemasaran yang sangat berkontribusi bagi objek kunjungan. Kecepatan teknologi informasi memberikan ruang bagi upaya pemasaran seperti media sosial sehingga informasi dan potensi wisata menarik kian tersebar dan tergambar dengan jelas tanpa menghilangkan keunikan objek. Bagi masyarakat potensi ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian setempat serta mendatangkan pendapatan.

Kehadiran pengunjung objek wisata menarik penggunaan sosial media seperti facebook dan media cetak seperti koran. Selain itu upaya pemerintah tidak terlepas pula dalam memasarkan objek wisata. Dukungan tersebut dapat berupa promosi objek wisata potensial di Koran Lokal atau Nasional. Dengan demikian penggunaan media merupakan saluran pemasaran efektif bagi pengembangan objek wisata.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat tersebut diatas bahwa metode pemasaran memanfaatkan bentuk media kian tak terbatas. Kemajuan teknologi informasi menjadi pemicu media informasi seperti media sosial atau media elektronik sebagai media pemasaran objek wisata. Terpenuhinya akses dan layanan kepariwisataan melahirkan

inisiatif bagi masyarakat untuk mempromosikan objek sekaligus upaya pemerintah di media cetak maupun elektronik. Promosi menjadi metode pemasaran yang baik bagi pengembangan objek wisata sehingga berdampak bagi kemajuan daerah.

### **C. Kelembagaan Kepariwisata**

Variabel ini berkaitan dengan analisa kelembagaan. Aspek yang diukur mencakup bentuk lembaga pariwisata. Menurut Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan (Wawancara, 2018) diketahui bahwa unit wisata sebagai salah satu jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa memanfaatkan potensi objek wisata.

Kehadiran usaha pariwisata pada manajemen BUMDesa menambah unit atau lembaga yang proaktif mengembangkan wisata selain komunitas masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. Sehingga sebagai salah satu prospek bisnis atau unit usaha, sektor wisata di Kecamatan Dendang berpotensi menjadi primadona baru. Untuk itu, kehadiran BUMDesa dapat menawarkan kerjasama dalam hal pengelolaan atau permodalannya sehingga sarana prasarana atau pembiayaan bisa ditingkatkan. Dengan demikian keberadaan BUMDesa bisa berkontribusi terhadap kelembagaan kepariwisataan.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat tersebut diatas bahwa unit wisata BUMDesa berpotensi sebagai pelembagaan objek wisata sehingga penataan dan pengelolaan wisata menjadi lebih kuat. Sebagai lembaga lokal, BUMDesa diharapkan mampu merangkul komunitas atau kelompok masyarakat serta menjadi motor penggerak pengembangan wisata lokal. Skema yang muncul baik melalui kerjasama atau kemitraan. Hal ini bermanfaat menumbuhkan inisiatif dan kreativitas yang terbangun dari level terbawah. Pemanfaatan dana desa selain swadaya masyarakat menjadi opsi bagi percepatan pengembangan wisata sekaligus pendorong ekonomi daerah.

#### **D. Bumi dan Sumber Daya Alam**

Variabel ini berkaitan dengan analisa kekayaan alam. Aspek yang diukur mencakup kondisi alam bagi BUMDesa wisata. Menurut Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS dan Tokoh Masyarakat (Wawancara, 2018) diketahui bahwa sumber daya alam merupakan modal utama pengembangan BUMDesa wisata dalam mewujudkan ketahanan daerah.

Pemerintah menyadari kekayaan alam merupakan anugerah dan berkah bagi daerah. Kehadiran BUMDesa dianggap mewakili pemanfaatan sumber kekayaan alam. Kekayaan alam sebagai modal ketahanan wilayah sehingga keindahan, kearifan yang menjadi ciri khas lokal dapat dimanfaatkan sebagai usaha wisata serta direalisasikan sebagai objek wisata oleh BUMDesa. Kekayaan alam merupakan modal awal pengembangan wilayah. Kondisi dan bentang alam Kecamatan Dendang yang terdiri dari hutan memenuhi syarat sebagai objek wisata. Dengan kondisi geografis tersebut, keanekaragaman serta kondisi hutan bisa menjadi tumpuan. Dendang bisa mewujudkan implementasi wisata berbasis ekowisata karena kaya akan hutan atau wisata mangrove dibawah pengelolaan BUMDesa.

Kekayaan alam merupakan potensi terbesar di Kecamatan Dendang. Pada berbagai kesempatan organisasi di tingkat desa telah memiliki konsep, ide serta gagasan terkait pemanfaatan sumber daya alam setempat bagi potensi alam yang dimiliki oleh Kecamatan Dendang. Hadirnya BUMDesa unit usaha wisata diharapkan semakin menambah lingkup organisasi di tingkat desa guna melengkapi pengelolaan potensi wisata di Kecamatan Dendang. Sehingga kekayaan alam sebagai modal penting bagi BUMDesa sebagai perwujudan ketahanan wilayah. Upaya yang telah dilakukan diantaranya menggali potensi wisata Kecamatan Dendang di beberapa objek yang menyimpan sejarah serta situs milik salah satu warga.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat tersebut diatas serta pengamatan yang dilakukan bahwa kondisi dan bentang alam Kecamatan Dendang merupakan modal sekaligus peluang bagi pengembangan objek wisata. Objek berupa hutan, tambang serta situs sejarah hingga kearifan lokal dapat dikembangkan sebagai ekowisata, eduwisata maupun agrowisata. BUMDesa unit usaha wisata dapat mewujudkan kebermanfaatannya tersebut. Melalui pemanfaatan serta dukungan yang tepat sehingga sumber kekayaan alam sebagai modal sekaligus peluang bagi BUMDesa untuk mewujudkan pengembangan wisata setempat sekaligus ketahanan daerah.

#### **E. Tenaga Kerja**

Variabel ini berkaitan dengan analisa kesempatan kerja. Aspek yang diukur mencakup perluasan kesempatan kerja oleh BUMDesa. Menurut Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS dan Tokoh Masyarakat (Wawancara, 2018) diketahui bahwa pengembangan BUMDesa wisata dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat sehingga memperkuat ketahanan ekonomi.

Pengembangan usaha yang dilakukan BUMDesa akan memberi efek positif terhadap kesempatan berusaha. Tiap unit akan memerlukan tenaga sehingga berdampak bagi masyarakat sekitar. Selain dari pengembangan usaha, kerjasama yang diupayakan oleh BUMDesa membuka keran lapangan kerja. Kebutuhan akan keahlian tertentu pada usaha BUMDesa akan mendorong masyarakat sekitar membuka diri terhadap pemenuhan tenaga tersebut. Serapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor perkebunan. Dalam hal ini BUMDesa bisa mengembangkan potensi pada sektor ini.

Memfaatkan sektor pertanian sekaligus perkebunan fasilitasi dan akomodasi peluang bisa bermanfaat bagi perluasan tenaga lokal. Pengembangan usaha BUMDesa otomatis memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Perluasan kesempatan tenaga kerja sejalan

dengan perkembangan usaha BUMDesa. Efek positif peningkatan usaha BUMDesa salah satunya perluasan tenaga kerja. Sehingga didapat bahwa pengembangan BUMDesa dapat memperluas kesempatan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat tersebut diatas bahwa perluasan kesempatan kerja sejalan dengan peningkatan pengembangan BUMDesa. Peningkatan tenaga kerja menjadi efek domino dari peningkatan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa. Peningkatan sektor pertanian perkebunan serta potensi sektor wisata menjadi peluang unit usaha sekaligus bagi masyarakat setempat. Selain pendapatan BUMDesa meningkat, kebutuhan masyarakat terpenuhi juga kesempatan kerja bagi tenaga lokal semakin terbuka.

#### **F. Prasarana**

Variabel ini berkaitan dengan analisa sarana wisata. Aspek yang diukur meliputi kondisi sarana prasarana wisata. Menurut Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS dan Tokoh Masyarakat (Wawancara, 2018) diketahui bahwa sarana prasarana sebagai salah satu penunjang pengembangan wisata.

Sekitar 50-70 persen sarana yang dimiliki mempengaruhi tingkat kunjungan wisata. Selain dukungan pemerintah, sarana prasarana diupayakan dapat terbangun melalui peran swasta melalui program pengembangan prasarana melalui CSR. Ketersediaan sarana penting bagi kemajuan wisata. Inisiatif lokal memang perlu dilakukan yakni dengan memanfaatkan objek wisata serta menginisiasi pembangunan sarana melalui swadaya masyarakat. Namun dengan dukungan serta kerja sama antar pemerintah daerah, desa dan BUMDesa maka pengembangan wisata akan lebih kuat.

Upaya pengembangan sarana prasarana merupakan prasyarat pengelolaan potensi desa. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang sekarang banyak dialokasikan bersumber dari dana desa

diharapkan mendukung pengembangan potensi wisata. Peningkatan sarana dapat didorong untuk meningkatkan pemenuhan prasarana melalui APBDes. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan asistensi APBDes terhadap pemerintah desa untuk mengalokasikan dananya bagi pemenuhan fasilitas di tiap lokasi yang direncanakan. Realisasi pemenuhan fasilitas mendukung peningkatan penunjang potensi wisata.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat tersebut diatas bahwa urgensi pengembangan sarana prasarana sudah disepakati bersama, sehingga pemerintah selalu mendorong keterlibatan pihak diluar pemerintahan seperti individu, kelompok masyarakat dan perusahaan untuk terlibat aktif mendukung pembangunan sarana prasarana wisata. Individu dapat mengembangkan melalui investasi, masyarakat melalui swadaya, perusahaan melalui CSR. Kontribusi dana desa yang sekarang digelontorkan menjadi fokus peningkatan sarana prasarana wisata selain peran dan keterlibatan pihak non pemerintah.

### **G. Manajemen**

Variabel ini berkaitan dengan analisa manajemen. Aspek yang diukur meliputi kapabilitas pengelola BUMDesa. Menurut Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BP4D, Kepala Seksi Statistik Sosial BPS dan Tokoh Masyarakat (Wawancara, 2018) diketahui bahwa ada upaya peningkatan skill dan kemampuan pengurus BUMDesa.

Bentuk manajemen yang solid merupakan nilai tambah bagi pengelolaan organisasi. Sebagai sebuah unit, BUMDesa diupayakan agar membuka ruang bagi peningkatan kapabilitas personil baik melalui keterlibatan instansi maupun desa sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia BUMDesa. Adaapun kapabilitas manajemen menggambarkan kemampuan dan tata kelola organisasi. Pengelolaan manajemen kepengelolaan menunjukkan dukungan terhadap pengembangan BUMDesa. Keberpihakan terhadap peningkatan kapasitas BUMDesa melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan terhadap pengurus memungkinkan keberlanjutan usaha dan ekspansi bisnis.

Kemampuan pengurus sangat mempengaruhi tata kelola organisasi BUMDesa. Dukungan pemerintah desa disertai peningkatan kapasitas akan meningkatkan skill dan manajerial. Organisasi seperti BUMDesa dan harus memiliki dukungan aktif pemerintah desa terutama dari sisi pendanaan sehingga tata kelola organisasi serta upaya kapabilitas dan tata kelola berjalan dengan baik. Sehingga peningkatan kapabilitas pengelola urgen bagi pengembangan BUMDesa. Upaya yang telah dilakukan diantaranya membangun kapabilitas dan manajerial melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan kelembagaan.

Berdasarkan analisis wawancara dengan pejabat tersebut diatas serta observasi yang telah dilakukan bahwa upaya peningkatan skill dan kemampuan pengurus menunjukkan keseriusan manajemen dalam tata kelola BUMDesa. Upaya desa dalam mendukung manajemen meliputi dukungan permodalan serta peningkatan kapasitas bagi BUMDesa. Dukungan permodalan dan peningkatan kapasitas menggambarkan upaya manajemen baik BUMDesa maupun pemerintah desa agar kapabilitas pengelola dan kepengurusan berjalan dengan baik sesuai harapan.

Dari hasil analisis yang peneliti terhadap Badan Usaha Milik Desa, Pariwisata dan Ketahanan Ekonomi Daerah, peneliti berusaha menginterpretasikan hasil temuan yang terangkum sebagai berikut :

**Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Temuan Dampak Implementasi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah**

NO	Aspek	RANGKUMAN HASIL TEMUAN
1.	Modal	Pendanaan, bagi hasil dan keberlanjutan usaha sudah cukup memadai. Pendanaan yang rutin dan bertahap disertai manajemen bagi hasil yang baik serta keberlanjutan proritas dan analisa bisnis diharapkan dapat menunjang keberhasilan BUMDesa.

2.	Pemasaran	Metode pemasaran memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui media kian tak terbatas seperti media sosial atau media elektronik. Promosi menjadi metode pemasaran yang sangat baik bagi pengembangan objek wisata.
3.	Kelembagaan Kepariwisataaan	Unit wisata BUMDesa berpotensi mendorong penataan dan pengelolaan wisata jadi lebih kuat. Hal ini bermanfaat menumbuhkan inisiatif dan kreativitas yang terbangun dari level terbawah. Pemanfaatan dana desa selain swadaya masyarakat menjadi opsi bagi percepatan pengembangan wisata sekaligus pendorong ekonomi daerah.
4.	Bumi dan Sumber Daya Alam	Kondisi bentang alam bermanfaat bagi pengembangan objek wisata. BUMDesa unit usaha wisata dapat mewujudkan kebermanfaatannya tersebut melalui dukungan terhadap sumber kekayaan alam sebagai modal sekaligus peluang mewujudkan pengembangan wisata.
5.	Tenaga Kerja	Perluasan kesempatan kerja sejalan dengan peningkatan pengembangan BUMDesa. Peningkatan tenaga kerja menjadi efek peningkatan usaha BUMDesa. Selain pendapatan BUMDesa meningkat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, kesempatan bagi tenaga lokal semakin terbuka.
6.	Prasarana	Urgensi pengembangan sarana prasarana didorong melalui keterlibatan pihak diluar pemerintah untuk aktif mendukung pembangunan wisata. Melalui skema investasi, swadaya masyarakat atau CSR perusahaan dorongan terhadap peningkatan wisata juga melalui penyertaan dan pemanfaatan dana desa.
7.	Manajemen	Upaya peningkatan kemampuan pengurus menunjukkan keseriusan manajemen tata kelola BUMDesa. Dukungan permodalan dan peningkatan kapasitas menggambarkan upaya manajemen BUMDesa sehingga kapabilitas pengelola dan kepengurusan berjalan dengan baik sesuai harapan.

Sumber : Data Diolah

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari dana desa disertai manajemen bagi hasil dan analisa keberlanjutan usaha mendorong potensi wisata yang dimiliki dapat dikembangkan oleh BUMDesa. Selain mendorong pengembangan serta kemajuan wisata juga menciptakan tata kelola BUMDesa yang efektif. Selain itu akses dan layanan wisata didorong melalui keterlibatan non pemerintah sehingga kesadaran yang diupayakan terbangun dari level terbawah atas prakarsa masyarakat. Lembaga pariwisata BUMDesa unit wisata diharapkan menjembatani serta merangkul komunitas atau kelompok masyarakat sehingga mendorong percepatan akses dan layanan kepariwisataan. Percepatan sarana prasarana penting sehingga pemanfaatannya dapat dilokalisir bagi pemasaran pada media sosial dan elektronik sebagai wujud kemajuan pengembangan objek wisata.

Gabungan aspek kekayaan alam, perluasan kesempatan kerja, kondisi sarana prasarana dan kapabilitas pengelola menunjukkan upaya mendorong ketangguhan ekonomi daerah. Kondisi kekayaan alam sebagai modal awal ditambah kesempatan tenaga kerja didukung sarana dan prasarana serta pengelolaan yang baik seiring dengan peningkatan usaha BUMDesa memperlihatkan jaminan kelangsungan perekonomian. Tentunya kesemua fungsi bumi dan sumber daya alam, tenaga kerja, prasarana dan manajemen dapat meningkatkan posisi ketahanan wilayah sekaligus ketahanan daerah.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas serta dikembangkan menurut variabel dan aspek dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dipaparkan pembahasan penelitian sesuai teori dan pendapat para ahli yang dianalisis, diinterpretasikan dan dilihat kesesuaiannya dengan data sekunder yang didapat selama proses penelitian.

#### **4.3.1 Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata**

Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, efektivitas dan efisiensi komunikasi menentukan tersampainya informasi dan kebijakan. Komunikasi efektif penting dalam implementasi kebijakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan serta tersampaikan dengan baik. Merujuk pendapat Barbara Brown (2016), komunikasi efektif melibatkan kejelasan, perkataan langsung, dan aktif mendengarkan (*clear, direct speech, active listening*). Komunikasi yang efektif ditandai dengan upaya untuk mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan hingga menimbulkan suatu tindakan melalui intensitas dan metode tertentu.

Menurut Edward (1980) setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Beberapa upaya pendistribusian komunikasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan Kebijakan BUMDesa yakni komunikasi melalui sosialisasi serta pembinaan dan pendampingan kepada para pengurus BUMDesa. Harold Laswell (1960) menjelaskan bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa. Komunikasi sebagai suatu proses telah dijalankan melalui sosialisasi yang diupayakan oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai bentuk komunikasi kepada pengurus BUMDesa sekaligus wujud implementasi pengelolaan BUMDesa melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur.

Sedangkan batasan komunikasi menurut Michael Burgoon dan Michael Ruffner (1994) sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah. Batasan komunikasi dilakukan melalui pembentukan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur kepada seluruh Desa di Kecamatan Dendang yang telah dijadwalkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur. Intensitas sosialisasi serta pembinaan dan pendampingan dilakukan secara rutin dan tatap muka langsung. Sosialisasi dilakukan sekali kegiatan per tahun sedangkan pembinaan dan pendampingan dilakukan kegiatan terjadwal sekali persemester.

Implementasi kebijakan juga harus didukung sumber daya potensial yang memadai. Pemanfaatan sumber daya potensial menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya finansial (keuangan) dilakukan melalui manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan manajemen keuangan (MK). Hal ini sesuai dengan pandangan Edward (1980) dimana setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia berupa keahlian dan kompetensi sedangkan sumber daya finansial berupa alokasi anggaran dan pembiayaan.

Menurut Mondy (2012), manajemen sumber daya manusia adalah utilisasi dari individu-individu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Saydam (1996) manajemen sumber daya manusia adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian sampai pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia tadi untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Menurut Nawawi (2011) Sumber daya manusia dapat juga disebut personil. Tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan

berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Efektivitas pengerahan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dendang dilakukan melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Dendang.

Pemahaman tentang manajemen keuangan menurut Kasmir (2010) berupa seni (*art*) dan ilmu (*science*) untuk mengelola uang yang meliputi proses, lembaga, pasar dan instrument yang terlibat dengan masalah transfer uang diantara individu, bisnis dan pemerintah. Sedangkan Riyanto (2001) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen untuk fungsi-fungsi pembelanjaan. Adapun efisiensi pengerahan sumber daya keuangan dilakukan melalui penataan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dendang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur melalui Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa belanja pegawai dan belanja barang jasa diantaranya sebagai berikut :

**Tabel 4.12 DPA Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	
5.2	Belanja Langsung				8.000.000
5.2.1	Belanja Pegawai				5.060.000
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.360.000
5.2.1.01.05	Honorarium PNS Lainnya Belanja Honorarium Tim Asistensi Penyusunan APBDes				4.360.000
	- Ketua	4	Org/Hari	200.000	800.000
	- Sekretaris	4	Org/Hari	190.000	760.000
	- Anggota	16	Org/Hari	175.000	2.800.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				700.000
5.2.1.02.03	Honorarium Non PNS Lainnya Honorarium Tim Asistensi Penyusunan APBDes				700.000
	- Anggota	4	Org/Hari	175.000	700.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2.940.000	2.940.000

Sumber : Kecamatan Dendang, 2018.

Implementasi BUMDesa yang ditentukan oleh pemanfaatan sumber daya sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hanny Purnamasari, Eka Yulyana dan Rachmat Ramdani pada tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang bahwa integrasi dan adaptasi sumber daya manusia serta manajemen sangat menentukan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Hal ini diperkuat manajemen keuangan serta sarana prasarana yang secara luas berdampak pada pengelolaan BUMDesa. Implikasi kebijakan pengelolaan BUMDesa melalui pemanfaatan sumber daya potensial juga diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada BUMDesa di Kecamatan Dendang.

Kebijakan yang diambil dalam menerapkan implementasi Badan Usaha Milik Desa juga memerlukan disposisi berupa karakter dan komitmen pengembangan dari para pengambil kebijakan serta dicerminkan oleh struktur birokrasi berupa penataan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dimana setiap instansi di lingkup daerah hingga kecamatan terlibat pada pembinaan dan pendampingan sesuai struktur kendali dan mekanisme kewenangannya. Hal ini merujuk pada pendapat Edward (1980) yang mengemukakan bahwa karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis serta struktur birokrasi yang ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) dan struktur birokrasi pelaksana

Menurut Griek (2011) karakter dapat didefinisikan sebagai panduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Masnur Muslich (2011) karakter yaitu cara berfikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat dan negara. Adapun Steers dan Porter (1983) mengemukakan bahwa komitmen

merupakan suatu keadaan individu dimana individu menjadi terikat oleh tindakannya. Melalui tindakan ini akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya.

Karakter pengambil kebijakan yang memprioritaskan BUMDesa tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 memuat indikasi program pembangunan prioritas dan pendanaan berdasarkan urusan sebagai berikut :

**Tabel 4.13 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**

TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	PD Pg Jawab
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi	Meningkatnya nilai investasi daerah, laju pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa (BUMDes)	28 %	100 %	DSPMPD

Sumber : BP4D Kab Belitung Timur, 2016.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 menjelaskan tentang salah satu misi daerah diantaranya Diversifikasi Lapangan Usaha dan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. Implementasi kebijakan tersebut direalisasikan berupa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan indikator persentase usaha ekonomi desa (BUMDes). Dari misi tersebut diatas terlihat jelas karakter kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi desa. Sedangkan komitmen ditunjukkan pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dan kreativitas melalui pelaksanaan bursa inovasi Desa se-Kabupaten Belitung Timur guna mendorong Kepala Desa dan Ketua BPD memprioritaskan usaha ekonomi lokal serta memanfaatkan BUMDesa oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.

Struktur birokrasi tercermin dari pembentukan Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur. Hal ini sesuai dengan pandangan Robbins (2007) yang mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan Ivancevich (2008) mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerja kerangka jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Sedangkan mekanisme sebagai sebuah proses dinyatakan pada Surat Keputusan dimana Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi pendampingan kepada pemerintah desa dalam perintisan, pembentukan dan pengembangan kepada Badan Usaha Milik Desa. Definisi mekanisme menurut Poerwadarmita (2003) adalah cara kerja dan seluk-beluk suatu alat, perkakas.

Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dendang terdiri dari berbagai struktur, namun belum mencirikan potensi dan karakteristik wilayah setempat yang saling terkoordinir walau jenis usaha sudah mencerminkan potensi usaha berdasarkan peluang bisnis yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, klasifikasi jenis usaha BUMDesa terdiri dari jenis bisnis sosial sederhana, jenis bisnis penyewaan barang, jenis usaha perantara, jenis bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang, jenis bisnis keuangan serta usaha bersama (*holding*). Kegiatan usaha bersama diantaranya adalah desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.

Organisasi badan usaha milik desa tentunya menyesuaikan dengan potensi yang ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan musyawarah

pembentukan. Menurut Hasibuan (2013) organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Waldo (2011) menyebutkan bahwa organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Sondang P Siagian (1985) mendefinisikan organisasi setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian satu tujuan Adapun bentuk organisasi BUMDesa yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Dendang, Desa Balok, Desa Jangkang, dan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang memiliki unit usaha yang masing-masing berbeda dengan potensi dan karakteristik wilayah yang digolongkan menjadi 4 (empat) bidang pokok meliputi produksi primer, pengelolaan, perdagangan dan jasa menurut Peraturan Bupati.<sup>96</sup> Diantara data Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/BUMADES ada beberapa unit usaha yang telah dikembangkan oleh BUMDesa Kecamatan Dendang meliputi :

**Tabel 4.14 Data BUMDES dan BUMADES**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	UNIT USAHA	PERDES/SK PEMBENTUKAN BUMDES
1.	Dendang	Dendang	Persada Berkah	Pengelolaan Aset Desa, Perdagangan Umum, Ekonomi Kreatif	Perdes Nomor 5 Tahun 2017
2.	Dendang	Balok	Tebing Tinggi	Jasa dan Transportasi, Pertanian dan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata	Perdes Nomor 4 Tahun 2018
3.	Dendang	Jangkang	Pelinge	Perdagangan dan Jasa	Perdes Nomor 2 Tahun 2017

<sup>96</sup> Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

4.	Dendang	Nyuruk	Bina Karya	Perdagangan, Pengelolaan Air Bersih dan Jasa	Perdes Nomor 3 Tahun 2017
----	---------	--------	------------	--	---------------------------

Sumber : DSPMPD Kab Belitung Timur, 2018.

Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tersebut diatas diketahui bahwa hanya BUMDesa Tebing Tinggi Desa Balok yang memiliki unit usaha pariwisata. Hal ini merupakan peluang bagi BUMDesa lainnya di Kecamatan Dendang untuk mengembangkan desa wisata sehingga pengelolaan usaha wisata oleh kelompok masyarakat, swasta dan pemerintah lebih terorganisir. Upaya kerjasama dapat didorong bagi BUMDesa di Kecamatan Dendang sebagai solusi untuk mempercepat tujuan pengembangan wisata.

Kerjasama dilandasi oleh kepentingan dan kesadaran yang sama. Menurut Abdulsyani (1994) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Sedangkan Purwadarminta (1985) mengartikan kerjasama sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Adapun Cooley (1930) berpendapat bahwa kerjasama akan timbul jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Upaya mendorong kerjasama teridentifikasi oleh usaha pihak perusahaan melalui program *Social Mapping* yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Kecamatan Dendang. Bersama dengan Karang Taruna Desa Dendang, pihak perusahaan memetakan kondisi sosial. Kegiatan *Social Mapping* (Pemetaan Sosial) merupakan pemetaan tentang operasional sosial perusahaan. Kesempatan ini merupakan peluang bagi BUMDesa memanfaatkan

sinergi dengan perusahaan dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan wisata.

Pengembangan kerjasama oleh badan Usaha Milik Desa dan pihak ketiga juga dapat mempercepat pengembangan akses dan layanan kepariwisataan termasuk destinasi wisata. Destinasi menurut Daryanto (1997) adalah tempat atau daerah tujuan. Sedangkan destinasi pariwisata menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Adapun menurut Hadinoto (1996) destinasi adalah suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, yang mana ia dapat tinggal dan berdomisili selama periode waktu tertentu. Kebermanfaatan upaya bersama oleh badan usaha milik desa dapat meliputi peningkatan aksesibilitas serta layanan kepariwisataan sehingga fasilitas dan daya tarik objek wisata menarik untuk dikunjungi.

Pengembangan potensi wisata melalui BUMDesa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Tri Wibawati pada tahun 2015 yang berjudul Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa. Melalui kapasitas organisasi, BUMDesa Bleberan berhasil mendorong pengelolaan potensi wisata desa. Selain kapasitas organisasi dukungan kerjasama melalui kolektivitas masyarakat dan nilai kearifan lokal pada unit usaha wisata BUMDesa Bleberan berhasil mengangkat potensi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Bleberan. Keberhasilan pengembangan potensi wisata oleh BUMDesa Bleberan diharapkan diadopsi oleh BUMDesa Kecamatan Dendang dalam mengelola potensi serupa.

Adapun potensi dan objek wilayah Kabupaten Belitung Timur yang telah dikembangkan ditunjukkan oleh destinasi wisata sebagai berikut :

**Tabel 4.15 Destinasi Wisata Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur**

NO	DESA/ KECAMATAN	NAMA OBJEK WISATA	OBJEK/ POTENSI	PENGELOLA	KLASIFIKASI WISATA
1.	Nyuruk Dendang	Agro Wisata Wangi Hijau / Vihara San Sak Miaw	Objek	Swasta	Alam
2.	Nyuruk Dendang	Galeri dan Kampung Seni	Objek	Disbudpar	Buatan
3.	Balok Dendang	Situs Balok Lama	Objek	Disbudpar	Buatan
4.	Balok Dendang	Situs Balok Baru (Sisilan)	Objek	Disbudpar	Buatan
5.	Balok Dendang	Keretak Nibong	Objek	Pokdarwis	Buatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur, 2018.

Berdasarkan data tersebut diatas ada 4 (empat) objek wisata di Kecamatan Dendang diantaranya yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah diantaranya Air Terjun Wangi Hijau, Situs Balok Lama, Situs Balok Baru (Keramat Sisilan) serta Galeri dan Kampung Seni. Hal ini menunjukkan keterbukaan pengelolaan destinasi wisata oleh swasta dan pemerintah sekaligus peluang bagi badan usaha milik desa di Kecamatan Dendang untuk terlibat dalam penataan dan pengelolaannya.

Dari beberapa pandangan diatas didukung data dan fakta bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menggambarkan implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kecamatan Dendang namun belum mendorong peningkatan unit usaha wisata memanfaatkan potensi dan karakteristik wilayah Kecamatan Dendang. Implementasi Badan Usaha Milik Desa sudah cukup baik tercermin dari komunikasi efektif serta efisiensi dan efektivitas sumber daya didukung disposisi serta struktur birokrasi yang diwujudkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policymakers*) sekaligus pelaksana kebijakan (*implementor*) kepada kelompok sasaran (*target groups*). Untuk itu keterlibatan BUMDesa dan pihak ketiga berwujud kerja sama dan kemitraan diharapkan mendorong pengelolaan objek wisata lebih baik sehingga lebih merepresentasikan karakter dan potensi wilayah

tersebut. Selain itu unit usaha wisata BUMDesa berpotensi mewujudkan peluang bisnis yang berfokus pada pengembangan wisata. Melalui penataan dan pengelolaan unit wisata oleh BUMDesa maka pengembangan potensi wisata dapat diperkuat dengan memanfaatkan keberpihakan dan kebermanfaatan dana desa.

#### **4.3.2 Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah**

Penyertaan modal bersumber dari dana desa di Kecamatan Dendang sudah diprioritaskan bagi Badan Usaha Milik Desa. APBDes telah mencerminkan permodalan bagi BUMDesa sehingga dapat digunakan sebagai pembiayaan operasional hingga pembentukan unit usaha. Modal merupakan faktor yang sangat penting untuk operasional usaha. Modal BUMDesa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Adapun penyertaan modal dana desa terdiri dari hibah, bantuan pemerintah, kerjasama usaha serta aset desa.

Modal kerja menurut Kasmir (2012) merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan organisasi perusahaan. Mengenai pentingnya modal kerja menurut Djarwanto (2011) bahwa modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Modal dicerminkan oleh struktur pembiayaan yang proporsional. Menurut Riyanto (1997) struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan pertimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa-desa di Kecamatan Dendang menggambarkan permodalan bagi Badan Usaha Milik Desa melalui pos

pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Desa Balok menyertakan Rp 25.000.000 pada tahun 2015.<sup>97</sup> Kemudian menganggarkan Rp 112.928.000 pada tahun 2018 kepada BUMDesa Tebing Tinggi Desa Balok.<sup>98</sup> Adapun Desa Jangkang menyertakan Rp 278.472.259,76 kepada BUMDesa Pelinge Desa Jangkang<sup>99</sup> sedangkan Desa Nyuruk telah menganggarkan Rp 85.000.000<sup>100</sup> pada tahun 2017 serta sebesar Rp 100.000.000 pada tahun 2018 kepada BUMDesa Bina Karya Desa Nyuruk.<sup>101</sup> Sementara itu Desa Dendang merealisasikan pembiayaan sebesar Rp 100.000.000 kepada BUMDesa Persada Berkah Desa Dendang.<sup>102</sup> Sehingga dari sisi pendanaan dukungan terhadap pemanfaatan potensi usaha wisata dianggap cukup sebagai modal baik penataan maupun pengelolaan objek wisata.

Selain permodalan, metode pemasaran menjadi opsi bagi potensi-potensi sebagai pengenalan sekaligus objek kunjungan wisata. Media promosi menjadi saluran pemasaran yang paling efektif untuk menawarkan wisata. Melalui promosi, strategi pemasaran dapat mendukung kelancaran arus serta daya saing barang dan jasa kepada pengguna. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana pembangunan pemasaran mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

---

<sup>97</sup>Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan APBDes Desa Balok Tahun 2015

<sup>98</sup>Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Balok Tahun 2018.

<sup>99</sup>Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Jangkang Tahun 2017.

<sup>100</sup>Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Nyuruk Tahun 2017.

<sup>101</sup>Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Nyuruk Tahun 2018.

<sup>102</sup>Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Dendang Tahun 2018.

Sesuai dengan definisi pemasaran menurut Kertajaya (2004) adalah sebuah konsep bisnis strategis yang bertujuan untuk meraih kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder utama yaitu pelanggan, orang-orang dalam organisasi serta pemegang saham. Selain itu menurut Hasyim (1994) pemasaran juga merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif. Sedangkan pemasaran menurut Kotler (1997) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Penggunaan media cetak dan media sosial paling efisien dalam memasarkan potensi wisata di Kecamatan Dendang. Beberapa penerbitan artikel tentang beberapa objek wisata di Kecamatan Dendang seperti pada objek wisata keretak nibong dan objek wisata wangi hijau yang banyak diliput oleh media lokal setempat terbukti turut meningkatkan animo masyarakat akan kesadaran wisata. Pemberitaan tentang Objek Wisata Wangi Hijau dan Keretak Nibong yang dipublikasikan oleh Belitung Pos pada tanggal 9 Februari 2018 dan 13 Juli 2018 melalui judul artikel "Wangi Hijau Objek Wisata Baru di Belitung Timur"<sup>103</sup> dan "Indahnya Wisata Alam Keretak Nibong di Sungai Balok" menjadi media promosi yang sangat bagus bagi pemasaran objek wisata Kecamatan Dendang<sup>104</sup>.

Penting disadari keberadaan lembaga pariwisata berupa Unit Usaha Wisata di Kecamatan Dendang berpotensi mendorong pengelolaan wisata menjadi lebih kuat. Dukungan dana desa menjadi penguat tumbuhnya inisiatif dan kreativitas yang terbangun. Kelembagaan maupun

---

<sup>103</sup>"Wangi Hijau Objek Wisata Baru di Belitung Timur", dalam <http://belitung.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.04 WIB.

<sup>104</sup>"Indahnya Wisata Alam Keretak Nibong", dalam <http://belitung.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.06 WIB.

organisasi pariwisata dapat meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Sehingga selain permodalan serta metode pemasaran yang tepat, keberadaan lembaga kepariwisataan setipe BUMDesa sebagai *homebase* pengembangan potensi wisata cukup penting. Pembentukan sinergi antara lembaga Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan melahirkan terciptanya perumusan kebijakan wisata sehingga secara kelembagaan harus diperkuat. Pemahaman tentang kelembagaan pariwisata menurut Gamal (2002) sebagai susunan organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian. Sementara menurut Kuntowijoyo (2006) mengartikannya sebagai lembaga yang dibentuk sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan rekreatifnya.

Dampak BUMDesa secara kelembagaan dalam meningkatkan potensi wisata Kecamatan Dendang didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti dan Hapsari Wahyuningsih pada tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Sumber mata air (umbul) yang melimpah di desa Ponggok berhasil dikembangkan oleh BUMDesa Tirta Mandiri sebagai potensi desa wisata air. Hal ini mendorong keterlibatan serta percepatan peningkatan potensi wisata Umbul Ponggok melalui pendanaan dan kelembagaan objek wisata. Disini jelas terlihat bahwa keberadaan BUMDesa berdampak bagi pengembangan potensi wisata sehingga diharapkan dampak BUMDesa Tirta Mandiri bagi peningkatan potensi wisata juga direplikasi oleh BUMDesa Kecamatan Dendang.

Upaya perkuatan usaha Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Dendang sebagai salah satu lembaga pengelola potensi wisata telah dilakukan seperti upaya pemetaan potensi usaha Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Dendang yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan bersama pihak desa. Fasilitas tersebut merumuskan pemetaan potensi wisata yang akan dikembangkan oleh BUMDesa sebagai wujud perumusan bersama pihak Kecamatan dan desa diantaranya :

**Tabel 4.16 Pemetaan Wisata Kecamatan Dendang**

NO	DESA	NAMA OBJEK WISATA	OBJEK/POTENSI	PENGELOLAAN
1.	Dendang	Pelabuhan Tanjung Rising	Potensi	Kemitraan dengan BUMDesa
2.	Dendang	Pelabuhan Rakyat Dendang	Potensi	Kemitraan dengan BUMDesa
3.	Dendang	Pulau Bayan	Potensi	BUMDesa
4.	Balok	Keretak Nibong	Objek	Kemitraan dengan BUMDesa
5.	Jangkang	Toko Kerajinan	Potensi	BUMDesa
6.	Nyuruk	Kampung Seni	Objek	Kemitraan dengan BUMDesa
7.	Nyuruk	Wangi Hijau	Objek	Kemitraan dengan BUMDesa

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data tersebut diatas perumusan antara BUMDesa dengan desa dan kecamatan melahirkan pemetaan Paket Wisata Kecamatan Dendang sebagai paket wilayah Belitung Selatan sesuai letak geografis Kecamatan Dendang yang berada di sebelah selatan pulau Belitung. Pemetaan wisata menjadikan lebih terkoordinirnya kelembagaan BUMDesa sebagai pusat pengembangan potensi wisata. Hal ini sekaligus menunjukkan keberadaan BUMDesa justru memperkuat pengembangan potensi wisata.

Ketahanan ekonomi menurut Lemhanas (2015) dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kekayaan alam, tenaga kerja, sarana prasarana serta manajemen. Keempat faktor ini menjadi keniscayaan dalam mendukung pengembangan potensi wisata sekaligus mewujudkan

ketahanan ekonomi daerah. Secara nyata kondisi alam menentukan daya dukung terhadap wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kecamatan Dendang yang secara geografis terdiri dari hutan yang sangat luas serta didominasi sektor perkebunan dan pertanian berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi objek wisata menjadi dikembangkan atas kepemilikan sumber daya alam. Menurut Katili (1983), sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai faktor yang menentukan keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun hewan, daya tarik alam Kecamatan Dendang dapat dimanfaatkan sebagai potensi wisata. Kepemilikan unsur sumber daya pun dapat dimaksimalkan menjadi potensi. Hal ini menurut Soerianegara (1977) menjelaskan sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun non hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan.

Keanekaragaman kekayaan alam Kecamatan Dendang jika disesuaikan berdasarkan Data BPS yang memuat Potensi Wisata Kecamatan Dendang sudah sangat mendukung diantaranya :

**TABEL 4.17 Potensi Wisata Kecamatan Dendang**

<b>NO</b>	<b>OBJEK WISATA</b>	<b>ASAL DESA</b>
1	Air Terjun Marsila	Nyuruk
2	Makam Raja Balok Lama	Balok
3	Makam Raja Balok Baru	Balok
4	Pemandian Sukma Alam Nyuruk	Nyuruk

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, 2018.

Selain wujud kekayaan, ketahanan ekonomi juga diperluas dengan kesempatan tenaga kerja yang lebih baik. Adapun ketersediaan tenaga kerja bisa menjadi penggerak pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan kekayaan alam yang sedemikian besar serta perluasan kesempatan yang ditawarkan oleh BUMDesa tentunya meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam sekaligus pembukaan unit usaha sesuai potensi BUMDesa membuka peluang penggunaan tenaga kerja lokal. Menurut Payaman (1990) tenaga kerja adalah produk yang sudah atau sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Sedangkan Eeng Ahman dan Epi Indriani (2007) mendefinisikan tenaga kerja sebagai seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Kontribusi BUMDesa bagi tenaga lokal didukung oleh data jumlah tenaga kerja yang terlibat pada unit usaha BUMDesa Kecamatan Dendang sebagai berikut :

**Tabel 4.18 Tenaga Kerja BUMDesa Kecamatan Dendang**

NO	BUMDESA	JUMLAH	JABATAN	KET
1.	Persada Berkah	6 orang	direktur, sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha	
2.	Bina Karya	4 orang	direktur, sekretaris, bendahara dan anggota	
3.	Pelinge	10 orang	direktur, sekretaris, bendahara dan ketua serta anggota unit usaha	

Sumber : BUMDesa se-Kecamatan Dendang, 2018.

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yakni 6 orang yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha. Sedangkan BUMDesa Bina Karya Desa Nyuruk berjumlah 4 orang yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara dan anggota. Adapun BUMDesa Pelingge Desa Jangkang total tenaga kerja 10 orang yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara dan ketua serta

anggota unit usaha. Dengan estimasi total tenaga kerja sedemikian maka dapat dinilai keberadaan BUMDesa sebagai penyumbang lapangan kerja bagi masyarakat lokal setempat cukup besar. Sumbangan ini belum termasuk tenaga yang dilibatkan atau kerja sama yang dilakukan bersama masyarakat untuk mengembangkan unit usaha BUMDesa.

Selain itu dorongan sarana dan manajemen berperan dalam mendukung pemanfaatan terhadap kekayaan dan tenaga kerja. Menurut Hamalik (1980) sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di Kecamatan Dendang telah terbangun melalui keterlibatan non pemerintah seperti komunitas nelayan, perusahaan dan swasta. Menurut Moenir (1992) sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Prasarana menjadi alat penunjang demi mempercepat peningkatan potensi objek wisata. Hal ini sesuai dengan pengertian sarana dan prasarana seperti dikemukakan Darsini (1999) bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses.

Sarana prasarana juga terkait fungsi dan tujuan yang merepresentasi kapabilitas dan tata kelola yang baik sehingga mencerminkan manajemen yang cakap. Terry (1994) berpendapat manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun penataan manajemen BUMDesa Kecamatan Dendang terus menerus didorong sehingga terjadi perbaikan pada kapabilitas pengelola dan kepengurusan baik melalui bimbingan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas untuk mencapai tujuan usaha BUMDesa

secara ekonomi sekaligus sosial. Handoko (1999) berpandangan manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Kesadaran penataan manajemen dan tata kelola oleh pemerintah desa setempat melalui pendidikan dan pelatihan guna pencapaian tujuan dan sasaran dengan mudah tercapai. Hal ini sesuai pendapat Daft (2002) dimana manajemen sebagai pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi. Perbaikan kapabilitas melalui Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Badan Usaha Milik Desa Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Balok terutama bagi kepengurusan Lembaga BUMDesa Tahun 2018 terhadap Direktur, Sekretaris dan Bendahara serta Kepala Unit Usaha. Untuk itu disadari bahwa peluang dan kesempatan pemanfaatan kekayaan alam terbuka lebar jika dikembangkan BUMDesa Kecamatan Dendang sehingga berguna bagi perluasan kesempatan serta peningkatan kapasitas. Dukungan sarana dan manajemen yang modern juga disadari semakin memperkuat kepemilikan kekayaan serta perluasan kerja terutama oleh BUMDesa dalam mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Dampak BUMDesa terhadap ketahanan ekonomi daerah juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dendhi Agung Nugroho pada tahun 2015 yang berjudul Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung serta oleh Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si pada tahun 2013 yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Bahwa

pembangunan unit usaha BUMDesa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terutama pada aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok dan membuka lapangan pekerjaan yang diketahui merupakan indikator ketahanan ekonomi. BUMDesa juga berdampak terhadap perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat dimana sarana prasarana melalui pembangunan desa semakin lancar dengan adanya dana yang dihasikan BUMDesa. Hal ini juga merupakan implikasi bahwa pengelolaan potensi desa oleh BUMDesa berdampak terhadap ketahanan ekonomi daerah yang bisa diterapkan oleh BUMDesa Kecamatan Dendang.

Dari beberapa pandangan diatas didukung data dan fakta bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kecamatan Dendang belum diupayakan bagi perkuatan pengembangan wisata melalui pendanaan, pemasaran dan kelembagaan. Namun jika usaha kepariwisataan mengelola dan memanfaatkan potensi lokal berupa kekayaan alam didukung pendanaan, pemasaran dan manajemen tata kelola yang baik oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kecamatan Dendang secara maksimal dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga berdampak positif bagi perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti serta disajikan secara mendalam maka dikemukakanlah beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan diharapkan dapat bermanfaat bagi implementasi Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan potensi wisata guna mewujudkan ketahanan ekonomi daerah pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun kesimpulan tersebut peneliti paparkan secara sistematis sebagai berikut :

1. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah telah menggambarkan upaya merealisasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kecamatan Dendang namun belum mendorong peningkatan unit usaha wisata memanfaatkan potensi wilayah Kecamatan Dendang. Hal ini disebabkan unit usaha BUMDesa belum merepresentasikan karakteristik serta daya tarik lokal namun implementasi Badan Usaha Milik Desa sudah cukup baik yang tercermin dari komunikasi efektif serta efisiensi dan efektivitas sumber daya didukung disposisi serta struktur birokrasi yang diwujudkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*polycymakers*) sekaligus pelaksana kebijakan (*implementor*) kepada kelompok sasaran (*target groups*),
2. Usaha kepariwisataan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kecamatan Dendang berdampak positif bagi peningkatan potensi wisata sekaligus perwujudan ketahanan ekonomi daerah. Keterlibatan BUMDesa belum diupayakan secara pendanaan, kelembagaan dan pemasaran namun pemanfaatan sumber kekayaan alam sejalan dengan peningkatan tenaga kerja serta dukungan prasarana dan manajemen yang tepat dapat memperkuat

pengembangan usaha kepariwisataan sekaligus berdampak positif bagi peningkatan posisi ketahanan daerah.

## 5.2 Rekomendasi

Sebagai penutup dari penelitian ini disajikan rekomendasi terutama bagi pemerintah daerah serta peneliti selanjutnya sebagai upaya perbaikan sekaligus pengembangan penelitian selanjutnya. Rekomendasi diantaranya sebagai berikut :

### 1. Teoritis

Secara teoritis menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengklasifikasikan desa wisata yang merupakan pengembangan wisata sebagai salah satu *domain* BUMDesa, sehingga pemerintah daerah diharapkan segera menetapkan kebijakan *roadmap* program usaha kepariwisataan bagi seluruh badan usaha milik desa sehingga implementasinya membentuk sinergi antara pemerintah dan pihak ketiga melalui skema kerja sama dan kemitraan guna memaksimalkan potensi dan karakter wilayah,

### 2. Praktis

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dikarenakan penelitian yang dilakukan menjumpai beberapa keterbatasan diantaranya waktu serta pembiasan sehingga temuan karakteristik wilayah yang belum dimanfaatkan oleh BUMDesa sebagai potensi wisata terlalu dibatasi di lingkup Kecamatan Dendang, sehingga diharapkan penelitian berikutnya meningkatkan cakupan pada BUMDesa di lingkup Kecamatan lain atau skala Kabupaten serta Provinsi sehingga memperlihatkan keseluruhan dampaknya bagi ketahanan ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahman, Eeng.,Indriani Epi. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung : Grafindo Media Pratama.
- Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta : Rineka Apta.
- Cooley, C.H. 1930. *Sociological Theory and Social Research*. New York : Henry Holt and Company.
- Cresswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*. Edisi Kelima Jilid Satu. Jakarta : Erlangga.
- Darsini,Nanik. 1999. *Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Daryanto, S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo.
- Djarwanto. 2011. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE.
- Gamal, Suwanto. 2002. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Gouzali, Saydam. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) Suatu Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab)*. Jakarta : Djambatan.
- Hadinoto, Kusdianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Hariadi, Bambang. 2003. *Strategi Manajemen*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasyim, Ali. I. 1994. *Tataniaga Pertanian*. Buku Ajar. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Huda, Ni'matul. 2015. "*Hukum Pemerintahan Desa*". Malang : Setara Press.
- Ibrahim, Amin. 2006. *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ivancevich, John M., dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. Jakarta : Erlangga.
- Kartajaya, Hermawan. 2004. *Positioning, Diferensiasi, dan Brand*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Katili, J.A., Hartono, H.M.S. 1983. *Geodynamics Of The Western Pasific Indonesian Region*. Geodynamics Series, Volume 11.
- Kottler, Philip. 1997. *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Terjemahan Jaka Wasana. Jakarta: Salemba Empat.
- Leiper, Neil. *Tourism System: An Interdisciplinary Perspective*. Palmerston North New Zealand : Massey University.

- Lemhannas. 2014. *Konsepsi Ketahanan Nasional – Modul Bidang Studi/ Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moeliono. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moenir, A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mondy.,Noe. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Alih bahasa Marwansyah)*. Jakarta : Erlangga.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Nawawi. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Nofrion. 2016. *Komunikasi Pendidikan:Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran*. Jakarta : Kencana.
- Oemar, Hamalik. 1980. *Media Pendidikan*. Bandung : Transito Alumni.
- Prijono Onny S.,Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Riyanto, Bambang. 1997. *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, Edisi 4. Yogyakarta : BPFE.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE.

- Robbins, SP., Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1994. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi, Uber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerianegara, Ishemat. 1977. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Bagian I*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Steers, R.M., Porter, L.W. 1983. *Motivation and Work Behavior*. New York : Academic Press.
- Stewart, Aileen Mitchel. 2006. *Empowering People : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfa Beta.
- Suyatno, Hempry., Suparjan. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Terry, George R., Rue, Leslie W. 2008 *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tippe, Syarifuddin. 2016. *Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta : Andi.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Buku Seru.

W.J.S. Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Yus, Anita. 2011. *Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak*. Jakarta : Kencana.

Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **Dokumen**

BPS Kabupaten Belitung Timur. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur Menurut Pengeluaran 2012-2016*. Manggar : BPS Kabupaten Belitung Timur.

KSK Kecamatan Dendang. *Kecamatan Dendang Dalam Angka 2017*. Manggar : BPS Kabupaten Belitung Timur.

### **Jurnal**

Budiono, Puguh. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)". *Jurnal Politik Muda*, Volume 4, Nomor 1.

Fang, Xiangming and Rodney B.W. Smith. 2008. "Barriers to Efficiency and the Privatisation of Township-Village Enterprises". *Journal of Development Studies*, Volume 44, Nomor 3.

Fatmawati, Nur Eko., Emmelia Nadira Satiti dan Hapsari Wahyuningsih. 2016. "Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pongok Kabupaten Klaten". *Jurnal Pariwisata Indonesia*, Volume 11, Nomor 2.

Fu, Xiaolan and V N Balasubramanyam. 2003. "Township and Village Enterprises in China". *Journal of Development Studies Lancaster University Management School*.

Nugroho, Dendhi Agung. 2015. "Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode

Mei 2014–April 2015)”. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Volume 7, Nomor 2.

Purnamasari, Hanny, Eka Yulyana dan Rachmat Ramdani. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Volume 1, Nomor 2.

Ridlwani, Zulkarnain. 2013. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Volume 7, Nomor 3.

Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.

Xun Wang. 2007. “One Country, Two Systems : China’s Economic Policies Towards State & Township/Village-Owned Enterprises, 1978-1992”. *Journal Of Third World Studies*, Volume 24, Nomor 2.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan APBDes Desa Balok Tahun 2015

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Nyuruk Tahun 2017.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes Desa Jangkang Tahun 2017.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Nyuruk Tahun 2018.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Balok Tahun 2018.

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Dendang Tahun 2018.

### **Tesis**

Anbiya, Rifan Yarid. 2018. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Tahun 2016)". *Tesis Magister*. Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Probovury, Ratih Azka. 2018. "Pengembangan Industri Kreatif Eceng Gondok Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Semarang". *Tesis Magister*. Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Wanda, Admery Rossie Uli. 2018. "Evaluasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Pilar Warnapersada Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah". *Tesis Magister*. Bogor : Program Magister Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Wibawati, Yulia Tri. 2015. "Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa". *Tesis Magister*. Yogyakarta : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

### **Website**

Biro Hukum dan Komunikasi Publik. "Menpar Bersama Gubernur dan Bupati Membahas 10 Destinasi Pariwisata Prioritas", dalam <http://kemenpar.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

Dadang Rizki Ratman. "Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas. Kementerian Pariwisata", 2016, dalam [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id), diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

"Indahnya Wisata Alam Keratak Nibong", dalam <http://belitung.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.06 WIB.

Kantor Staf Presiden. "Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla : Kerja 3ersama", dalam <http://presidenri.go.id/berita-aktual/laporan-3-tahun-pemerintahan-jokowi-jk.html>, diakses pada 18 Desember 2017.

Kementerian Sekretariat Negara. "Membangun Indonesia Dari Desa", dalam <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/960.html>, diakses pada 18 Desember 2017.

Purwanto. "Empat Solusi Indonesia Untuk Ketahanan Ekonomi", dalam <http://lipi.go.id/berita/empat-solusi-indonesia-untuk-ketahanan-ekonomi/5722>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 04.51 WIB.

Silanno Romans. "Beltim Jadi Pilot Project Bursa Inovasi Desa", dalam [http://rri.co.id/post/berita/451906/daerah/beltim\\_jadi\\_pilot\\_project\\_bursa\\_inovasi\\_desa.html](http://rri.co.id/post/berita/451906/daerah/beltim_jadi_pilot_project_bursa_inovasi_desa.html), diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 12.51 WIB.

Wangi Hijau Objek Wisata Baru di Belitung Timur", dalam <http://belitung.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.04 WIB.

## LAMPIRAN 1

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widiyanto, ST., MT.  
Jabatan : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008  
Program Studi : Ekonomi Pertahanan  
Fakultas : Manajemen Pertahanan

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Manggar, 10 September 2018  
Yang Memberi Dukungan



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHARO FERIAL SEMBIRINT

Jabatan : Kasi PEMBANGUNAN & PM

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

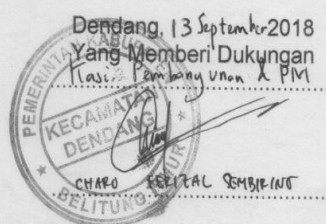
Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sumardi, S.H.*

Jabatan : *Tokoh masyarakat*

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : Ekonomi Pertahanan

Fakultas : Manajemen Pertahanan

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul **"Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)"** guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Manggar, *13 sept.* 2018  
Yang Memberi Dukungan

  
.....  
*Sumardi, S.H.*

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

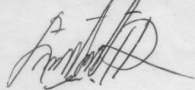
Nama : GUNTUR BUMDES PELINGE  
Jabatan : DIRKETA.

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008  
Program Studi : Ekonomi Pertahanan  
Fakultas : Manajemen Pertahanan

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Manggar, 11 / 09 / 2018  
Yang Memberi Dukungan

  
GUNTUR

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GURDI F

Jabatan : KEPALA DESA NYURUK

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul **"Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)"** guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 13 September 2018  
Yang Memberi Dukungan  
Kepala Desa Nyuruk,



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TETI MURUNA

Jabatan : PDI

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN


NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 13 September 2018  
Yang Memberi Dukungan

.....  
  
.....  
( TETI MURUNA )

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURSYAMSI

Jabatan : KEPALA DESA JANGKANG

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 14 September 2018  
Yang Memberi Dukungan  
Kepala Desa Jangkang,



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAIRUDIN  
Jabatan : KEPALA DESA BALOK

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008  
Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN  
Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 14 September 2018  
Yang Memberi Dukungan  
Kepala Desa Balok,



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. K. M. P. R. Y.

Jabatan : KETUA

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 14 - 09 2018  
Yang Memberi Dukungan

Drs. H. K. M. P. R. Y.

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : DULHADI  
Jabatan : DIREKTUR BUMDes BALOK

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008  
Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN  
Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 15 September 2018  
Yang Memberi Dukungan

  
.....  
DUL HADI, S.Pd.1

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERWIN  
Jabatan : KEPALA DESA DENDANG

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008  
Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN  
Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul **"Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)"** guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 2018  
Yang Memberi Dukungan  
Kepala Desa Dendang,  
  
ERWIN

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARSILAINI

Jabatan : KABID PEMBEDAJAAN KEMASYARAKATAN

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 2018  
Yang Memberi Dukungan



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRI ASTININGSIH  
Jabatan : KASI STATISTIK SOSIAL

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN  
NIM : 120170203008  
Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN  
Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 2018  
Yang Memberi Dukungan  
  
A

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAKARIA

Jabatan : DIREKTUR BUMDESA BINA KARYA

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : Ekonomi Pertahanan

Fakultas : Manajemen Pertahanan

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Manggar, 11 Sep 2018  
Yang Memberi Dukungan



ZAKARIA

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EPITA SANTY .

Jabatan : KABID PEREKONOMIAN, SOA, PRASUCL.

Dengan ini memberikan dukungan kepada :

Nama : DONY SETIAWAN

NIM : 120170203008

Program Studi : EKONOMI PERTAHANAN

Fakultas : MANAJEMEN PERTAHANAN

Untuk melaksanakan penulisan tesis dengan judul "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)" guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan Gelar Magister Pertahanan pada Universitas Pertahanan.

Dendang, 2018

Yang Memberi Dukungan



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

RUMUSAN MASALAH	TEORI	VARIABEL / PERTANYAAN	SUMBER DATA														
			A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	E1	E2
Bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Implementasi Kebijakan (George C Edwards)	<p>Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana intensitas dan metode sosialisasi yang dilakukan instansi daerah untuk meningkatkan pemahaman BUMDesa</li> </ul> <p>Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejauh mana potensi alam, manusia dan modal dapat mendukung implementasi BUMDesa</li> </ul> <p>Disposisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya apa saja yang dilakukan instansi daerah dalam meningkatkan pengembangan BUMDesa</li> <li>- Bagaimana keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi instansi dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan BUMDesa</li> </ul> <p>Struktur Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana rentang kendali dan kewenangan instansi daerah terhadap BUMDesa</li> <li>- Bagaimana struktur dan tata kelola instansi daerah terhadap BUMDesa</li> </ul>	√			√	√										
	BUMDesa (Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015)	<p>Bentuk Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut anda bentuk organisasi BUMDesa telah sesuai dengan karakteristik dan potensi kewilayahan daerah</li> </ul> <p>Klasifikasi Jenis Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana potensi wisata mampu dikembangkan menjadi unit usaha BUMDesa</li> </ul> <p>Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana upaya BUMDesa dalam mengelola objek wisata yang potensial</li> </ul>	√			√	√										
	Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009)	<p>Destinasi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana strategi pemerintah dalam menyediakan akses dan layanan kepariwisataan</li> <li>- Salah satu unit usaha BUMDesa adalah pengembangan potensi wisata, bagaimana menurut anda</li> </ul>		√		√	√										

Bagaimana dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan wisata guna mewujudkan ketahanan Ekonomi Daerah pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BUMDesa (Permendes PDPT Nomor 4 Tahun 2015)	Modal - Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa - Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola - Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa							√	√	√	√	√	√	√			
	Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009)	Pemasaran - Bagaimana upaya pemasaran wisata yang potensial bagi kemajuan perekonomian daerah Kelembagaan Kepariwisata - Salah satu bentuk kelembagaan pariwisata adalah BUMDesa unit usaha wisata, bagaimana menurut anda		√		√	√											
	Ketahanan Ekonomi Daerah (Lemhanas)	Bumi dan Sumber Alam - Bagaimana kondisi kekayaan alam menjadi faktor penentu implementasi BUMDesa wisata Tenaga Kerja - Bagaimana pengaruh BUMDesa terhadap perluasan kesempatan kerja Prasarana - Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana urgen terhadap pengembangan potensi wisata Manajemen - Upaya manajemen menunjukkan kapabilitas pengelola BUMDesa sesuai harapan			√											√	√	

**Keterangan :**

- A1 = Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur  
A2 = Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur  
A3 = Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur  
B1 = Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur  
B2 = Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur  
C1 = Kepala Desa Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur  
C2 = Kepala Desa Balok Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur  
C3 = Kepala Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur  
C4 = Kepala Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur  
D1 = Direktur BUMDesa Persada Berkah  
D2 = Direktur BUMDesa Tebing Tinggi  
D3 = Direktur BUMDesa Pelingge  
D4 = Direktur BUMDesa Bina Karya  
E1 = Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur  
E2 = Tokoh Masyarakat

## LAMPIRAN 3

## PEDOMAN OBSERVASI

No	Rumusan Masalah	Teori	Aspek yang diminati	Kegiatan	Hasil Pengamatan	
					Ada	Tidak Ada
1.	Bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Implementasi Kebijakan (George C Edwards)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensitas dan Metode</li> <li>- Potensi Sumber Daya</li> <li>- Komitmen Pengembangan</li> <li>- Rentang Kendali dan Tata Kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Pengelolaan BUMDesa</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi BUMDesa</li> <li>- Inovasi BUMDesa</li> <li>- Pendampingan dan Pembinaan BUMDesa</li> </ul>		
		BUMDesa (Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik</li> <li>- Potensi Wisata</li> <li>- Kerjasama dan Kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Studi Kelayakan/Banding</li> <li>- Menggali Wisata</li> </ul>		
		Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses dan Layanan Kepariwisata</li> </ul>			
2.	Bagaimana dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan wisata guna mewujudkan ketahanan Ekonomi Daerah pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BUMDesa (Permendes PD TT Nomor 4 Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistensi APBDes</li> </ul>		
		Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Pemasaran</li> <li>- Bentuk Lembaga Pariwisata</li> </ul>			
		Ketahanan Ekonomi Daerah (Lemhanas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekayaan Alam</li> <li>- Perluasan Kesempatan Kerja</li> <li>- Kondisi Sarana Prasarana</li> <li>- Kapabilitas Pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan Wisata</li> <li>- Fasilitasi APBDes</li> <li>- Peningkatan Kapasitas</li> </ul>		

## LAMPIRAN 4

## DATA SEKUNDER

No	Rumusan Masalah	Teori	Aspek yang diukur	Sumber Data
1.	Bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan potensi wisata di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Implementasi Kebijakan (George C Edwards)	- Intensitas dan Metode - Potensi Sumber Daya - Komitmen Pengembangan - Rentang Kendali dan Tata Kelola	- Jadwal Pembinaan - Dokumen Anggaran - Dokumen Perencanaan - Surat Keputusan Pembentukan Tim
		BUMDesa (Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015)	- Karakteristik - Potensi Wisata - Kerjasama dan Kemitraan	- Perdes BUMDesa - Data BUMDes/BUMADes - Dokumen Kebijakan CSR
		Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009)	- Akses dan Layanan Kepariwisata	- Data Destinasi Wisata
2.	Bagaimana dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan wisata guna mewujudkan ketahanan Ekonomi Daerah pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BUMDesa (Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015)	- Pendanaan	- Dokumen APBDes
		Pariwisata (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009)	- Metode Pemasaran - Bentuk Lembaga Pariwisata	- Artikel/Berita Online - Data Pemetaan Wisata
		Ketahanan Ekonomi Daerah (Lemhanas)	- Kekayaan Alam - Perluasan Kesempatan Kerja - Kondisi Sarana Prasarana - Kapabilitas Pengelola	- Data Potensi Wisata - Data Tenaga Kerja - Jadwal Peningkatan Kapasitas

**LAMPIRAN 5****TRANSKRIP WAWANCARA**

Informan : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata  
Hari/Tanggal : Senin / 10 September 2018  
Waktu : 10.15 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Disbudpar Kabupaten Belitong Timur  
Kode Instrumen : A2

**I. Implementasi Kebijakan****A. Struktur Birokrasi**

- Bagaimana rentang kendali dan kewenangan instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : bahwa dinas pariwisata sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan fungsi tugas di bidang kepariwisataan hanya menetapkan dan memberikan fatwa teknis terkait pengembangan pariwisata daerah sesuai potensi dan keunikan masing-masing wilayah.

- Bagaimana struktur dan tata kelola instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : bahwa dinas pariwisata telah turut dilibatkan belum lama ini, salah satunya dalam tim perintisan, pembentukan dan pembinaan bumdesa di Kabupaten Belitong Timur melalui metode pembinaan terjadwal.

**II. Badan Usaha Milik Desa****A. Klasifikasi Jenis Usaha**

- Bagaimana potensi wisata mampu dikembangkan menjadi unit usaha BUMDesa

Jawab : Pengembangan potensi wisata tentunya menjadi peluang yang harus di tangkap oleh tiap desa melalui peningkatan wilayah melalui organisasi se tingkat desa maupun komunitas setempat yang mengoptimalkan hal tersebut.

**B. Kerjasama**

- Bagaimana upaya BUMDesa dalam mengelola objek wisata yang potensial

Jawab : sesuai dengan upaya tersebut, tiap unit setingkat desa yang mengenal potensi yang dimiliki dan bisa dikembangkan. Lokasi yang

mumpuni dan objek yang potensial menjadi sumberdaya yang dapat dikelola oleh seluruh masyarakat.

### III. Pariwisata

#### A. Destinasi Pariwisata

- Bagaimana strategi pemerintah dalam menyediakan akses dan layanan kepariwisataan

Jawab : Keterlibatan Pemerintah melalui organisasi kelembagaan dalam mensupport dan sekaligus mendukung pengembangan potensi wisata tentunya terbatas di tiap wilayah, dukungan penyediaan akses sarana prasarana dan layanan bisa lebih intensif disediakan oleh desa setempat melalui dukungan dana desa.

- Salah satu unit usaha BUMDesa adalah pengembangan potensi wisata, bagaimana menurut anda

Jawab : Kami sangat mengapresiasi bahwa bumdesa memiliki pemikiran dan dukungan terhadap pengembangan potensi wilayah sebagai wisata lokal karena inisiatif harus selalu dibangun dari bawah, di tingkat masyarakat dan dari level terendah sehingga pengembangan kearifan lokal menjadi wujud pengembangan wisata lokal.

#### B. Pemasaran

- Bagaimana upaya pemasaran wisata yang potensial bagi kemajuan perekonomian daerah

Jawab : upaya pemasaran merupakan proses dan tahapan yang sangat panjang. Ketika sarana prasarana berikut akses dan layanan sudah terbangun maka pemasaran dapat dikondisikan sesuai kebijakan dan langkah yang dapat ditetapkan bersama. Prasyarat sarana prasarana menjadi elemen penting pembangunan potensi wisata apalagi daya dukungnya bagi kemajuan daerah di masa depan.

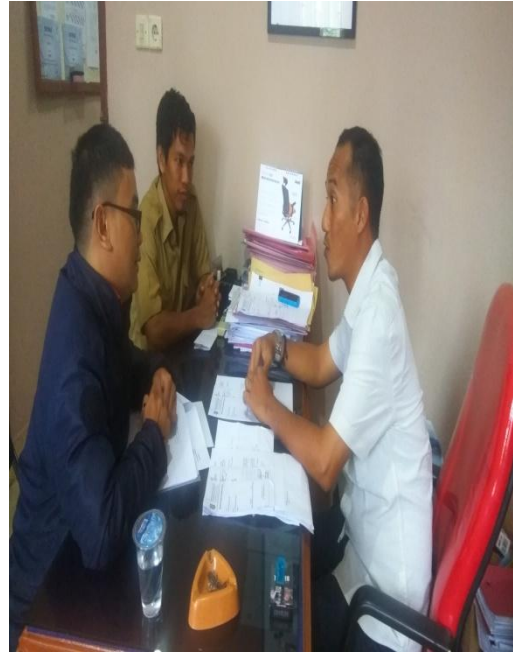
#### C. Kelembagaan Kepariwisataan

- Salah satu bentuk kelembagaan pariwisata adalah BUMDesa unit usaha wisata, bagaimana menurut anda

Jawab : Unit usaha bumdesa menambah lembaga unit yang mengembangkan wisata selain komunitas dan lembaga kemasyarakatan. Kami menanggapi positif dan berharap bahwa ke depan lembaga bumdesa

menjadi motor penggerak kemajuan pariwisata daerah terutama potensi wisata lokal sekaligus penggalian sejarah serta kearifan lokal.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Hari/Tanggal : Kamis / 13 September 2018  
Waktu : 09.15 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Camat Dendang  
Kode Instrumen : B1

### I. Implementasi Kebijakan

#### A. Komunikasi

- Bagaimana intensitas dan metode sosialisasi yang dilakukan instansi daerah untuk meningkatkan pemahaman BUMDesa

Jawab : Instansi pusat dan daerah telah beberapa kali melakukan bimbingan terhadap pengelolaan dan manajemen serta pendampingan dan pembinaan BUMDesa. Rutinitas tersebut selama ini belum efektif dalam proses pengembangan BUMDesa.

#### B. Struktur Birokrasi

- Bagaimana rentang kendali dan kewenangan instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : kendali instansi kecamatan terhadap pengelolaan BUMDesa sesuai porsi kewenangan kecamatan yang menyangkut fasilitasi, monitoring dan evaluasi tata kelola BUMDesa

- Bagaimana struktur dan tata kelola instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : Ruang lingkup kecamatan sesuai tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan saran dan masukan terkait pengembangan BUMDesa yang diarahkan sesuai dengan potensi lokal desa.

### II. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Bentuk Organisasi

- Menurut anda bentuk organisasi BUMDesa telah sesuai dengan karakteristik dan potensi kewilayahan daerah

Jawab : Organisasi BUMDesa saat ini memang terdiri dari beberapa unit usaha atau unit bisnis namun belum berorientasi pada potensi wilayah atau prioritas pengembangan usaha tiap desa.

### B. Klasifikasi Jenis Usaha

- Bagaimana potensi wisata mampu dikembangkan menjadi unit usaha BUMDesa

Jawab : unit usaha wisata sebagai salah satu unit bisnis BUMDesa merupakan keniscayaan mengingat potensi lokal merupakan peluang bisnis bagi BUMDesa setempat

### C. Kerjasama

- Bagaimana upaya BUMDesa dalam mengelola objek wisata yang potensial
- Jawab : Kesadaran pengelolaan objek wisata potensial mulai tumbuh atas prakarsa komunitas diluar organisasi BUMDesa, namun demikian peluang pengembangan potensi wisata dapat dilakukan melalui kerjasama dengan komunitas lokal setempat.

## III. Pariwisata

### A. Destinasi Pariwisata

- Bagaimana strategi pemerintah dalam menyediakan akses dan layanan kepariwisataan

Jawab : Pemerintah melalui instansi terkait belum memiliki strategi yang baku bagi perluasan pemasaran yang kadang-kadang seperti melakukan ekpose potensi wisata namun aksesibilitas masih sederhana dan sulit diterapkan.

- Salah satu unit usaha BUMDesa adalah pengembangan potensi wisata, bagaimana menurut anda

Jawab : Wisata memang menjadi aset dan andalan pengembangan usaha bagi BUMdesa kedepan namun potensi kepariwisaatan perlu menjadi prioritas dan diversifikasi jenis usaha oleh tiap BUMDesa masih serupa sehingga diharapkan ekstensifikasi dan intensifikasi usaha harus dilakukan.

### B. Pemasaran

- Bagaimana upaya pemasaran wisata yang potensial bagi kemajuan perekonomian daerah

Jawab : Kecepatan teknologi informasi memberikan ruang bagi upaya pemasaran seperti media sosial sehingga informasi dan potensi wisata menarik kian tersebar dan tergambar dengan jelas tanpa menghilangkan

keunikan objek. Bagi masyarakat potensi ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian setempat serta mendatangkan pendapatan.

### C. Kelembagaan Kepariwisata

- Salah satu bentuk kelembagaan pariwisata adalah BUMDesa unit usaha wisata, bagaimana menurut anda

Jawab : Sebagai salah satu unit bisnis atau unit usaha, sektor wisata menjadi primadona baru. Usaha wisata yang ditetapkan BUMDesa saja belum cukup guna mendukung potensi wisata secara kelembagaan namun diperlukan intervensi serta dukungan desa setempat dalam menjalankan usaha serta strategi bisnis yang berkelanjutan.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Tokoh Masyarakat  
 Hari/Tanggal : Kamis / 13 September 2018  
 Waktu : 10.03 WIB – selesai  
 Tempat : SMK Negeri 1 Dendang  
 Kode Instrumen : E2

### I. Ketahanan Ekonomi

#### A. Bumi dan Sumber Daya Alam

- Bagaimana kondisi kekayaan alam menjadi faktor penentu implementasi BUMDesa wisata

Jawab : Kekayaan alam merupakan potensi terbesar di kecamatan dendang. Organisasi di tingkat desa telah berusaha memaparkan konsep, ide serta gagasan terkait pemanfaatan sumber daya alam setempat. Terutama potensi wisata yang dimiliki oleh wilayah kecamatan dendang. Beberapa waktu lalu juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan pengenalan cinta lingkungan dan alam seperti perkemahan dan event serupa. Hal tersebut merupakan modal sekaligus peluang bagi pengembangan wisata. Hadirnya BUMDesa unit usaha wisata diharapkan akan mengakomodir pengelolaan potensi wisata pada saatnya nanti.

#### B. Tenaga Kerja

- Bagaimana pengaruh BUMDesa terhadap perluasan kesempatan kerja

Jawab : Tentunya pengembangan unit wisata akan otomatis memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Keberadaan warung dan rumah makan menjadi pemicu dan efek positif perkembangan wisata setempat. Diikuti munculnya kios serta tempat usaha mengikuti pola kunjungan. Namun perluasan kesempatan kerja akan lebih baik jika diutamakan bagi penduduk atau masyarakat lokal di sekitar lokasi wisata. Selain mendapat keuntungan, masyarakat juga mendapatkan nilai tambah serta perekonomian bergairah.

#### C. Prasarana

- Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana urgen terhadap pengembangan potensi wisata

Jawab : Upaya pengembangan sarana prasarana merupakan prasyarat pengelolaan potensi desa. Pembangunan sarana desa dan prasarana penunjang bersumber dari dana desa diharapkan mendukung pengembangan potensi wisata. Informasi yang berkembang bahwa beberapa hal telah berusaha dikoordinasikan antara pihak organisasi dan aparat desa setempat namun respon pemerintah desa masih minim dan perlu dukungan oleh organisasi pemerintah di lingkup lain.

#### D. Manajemen

- Upaya manajemen menunjukkan kapabilitas pengelola BUMDesa sesuai harapan

Jawab : Kemampuan aparatur terutama dukungan pemerintah desa setempat sangat mempengaruhi tata kelola organisasi di tingkat desa. Dukungan aparatur desa disertai kapabilitas akan meningkatkan skill dan manajerial setiap organisasi desa. Manajemen yang sekarang terbangun dari dukungan aparat setempat belum terlalu baik terhadap pengelolaan organisasi. Organisasi setingkat desa telah memiliki konsep pengembangan dan pembangunan desa namun dukungan manajemen aparatur desa masih rendah sehingga mempengaruhi tingkat capaian organisasi. Organisasi seperti BUMDesa dan beberapa organisasi lain di tingkat desa harus memiliki dukungan aktif pemerintah desa terutama dari sisi perencanaan dan pendanaan sehingga tata kelola organisasi dapat berjalan serta upaya kapabilitas dan tata kelola sesuai harapan.

#### FOTO KEGIATAN





## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Direktur Badan Usaha Milik Desa Pelingge  
 Hari/Tanggal : Kamis / 13 September 2018  
 Waktu : 11.59 WIB – selesai  
 Tempat : Kantor Desa Jangkang  
 Kode Instrumen : D3

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Dana desa selama ini sudah berkontribusi positif terhadap permodalan bagi penyertaan pendanaan BUMDesa. BUMDesa pelinge yang telah didirikan dan aktif pada tahun 2017 telah mendapatkan pendanaan dari SILPA APBDes disertai klausul perjanjian dan kontrak. Namun disadari bahwa dukungan pendanaan belum cukup karena harus dibekali kemampuan manajerial dan operasional dalam menjalankan BUMDesa sekaligus menginisiasi peluang usaha setempat yang sesuai dan berpotensi mendatangkan keuntungan.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah diberikan pihak desa pada saat penyertaan modal usaha, telah disepakati bahwa ada pembagian atau setoran dari keuntungan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa. Hal ini sesuai dengan tata kelola yang disyaratkan serta diatur oleh undang-undang beserta perjanjian yang dipayungi oleh peraturan kepala desa sehingga memiliki kekuatan hukum.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : Keberlanjutan usaha penting mengingat BUMDesa dan beberapa unit usahanya baru didirikan. BUMDesa Pelingge telah memiliki beberapa unit usaha sekaligus mempromosikan beberapa kegiatan yang mendukung usaha ekonomi seperti Usaha Sewa Tenda dan Kursi, Unit Simpan Pinjam dan di bidang perdagangan seperti distributor warung dan toko setempat.

Namun usaha tersebut dirasakan belum cukup, sehingga diperlukan pemetaan dan prioritas usaha BUMDesa pada tahapan jangka pendek dan menengah hingga panjang. Di jangka pendek BUMDesa telah berhasil menjalin kerjasama pelaksanaan proyek pembangunan dengan pemerintah desa. BUMDesa pelinge juga telah memberdayakan kerajinan setempat yang merupakan hasil usaha kelompok Senike seperti produk souvenir dan kerajinan berbahan kayu lainnya. Potensi wisata dapat menjadi capaian jangka menengah hingga panjang serta membutuhkan proses, namun tahapannya perlu diterapkan sehingga di masa mendatang dapat mendatangkan nilai lebih. Namun upaya BUMDesa di jangka pendek hingga panjang perlu didukung oleh lingkup pemerintah yang lebih tinggi sehingga capaian dan kelayakan serta prioritas bisnis akan lebih diutamakan. Hal tersebut dapat mendorong keberlanjutan BUMDesa di masa mendatang.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Desa Nyuruk  
 Hari/Tanggal : Kamis / 13 September 2018  
 Waktu : 14.32 WIB – selesai  
 Tempat : Kantor Desa Nyuruk  
 Kode Instrumen : C4

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Desa nyuruk selama ini telah memprioritaskan dana desa terutama bagi pendirian BUMDesa. Upaya ini merupakan wujud pemerintah desa dalam melakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. Selain pendanaan yang sifatnya berkesinambungan, pemerintah desa juga memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sehingga tersedianya keterampilan dan kemampuan yang memadai dalam mengembangkan unit usaha BUMDesa di kemudian hari.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Unit usaha BUMDesa yang terdiri dari beberapa aktivitas dan entitas bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini juga menyangkut operasionalisasi BUMDesa sehingga penyatuan unit usaha disertai pembukuan dan pelaporan sehingga pengelolaan lebih praktis dan dipahami sebagai satu kesatuan bisnis. Pembagian hasil usaha juga telah disepakati bahwa tertera pembagian antar unit usaha dan digabung menjadi satu serta pembagian kepada pemilik modal yang telah ditetapkan melalui kesepakatan serta diatur menurut peraturan kepala desa.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : Untuk mencapai kelanjutan usaha, seluruh aktivitas bisnis lebih mengutamakan kepentingan masyarakat serta bertumpu pada kebutuhan dasar masyarakat atau jika perlu mengembangkan potensi usaha yang telah dilakukan. Penting bagi BUMDesa agar usaha yang telah dimiliki oleh

masyarakat sebagai pelaku untuk didukung dan diberdayakan sehingga selain menggapai keuntungan entitas juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha yang telah dilaksanakan BUMDesa seperti perkebunan karet pada jangka pendek merupakan potensi usaha yang sedang diusahakan. Selain itu juga ada peluang usaha pengelolaan SPAM yang saat ini memasuki masa serah terima. Keberadaan sistem penyediaan air minum yang dapat dikelola BUMDesa selain menguntungkan juga memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa melalui pendistribusian dan pengelolaan air. Desa Nyuruk juga telah memiliki objek wisata Wangi Hijau yang sekarang dikelola oleh swasta, namun belum memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat sekitar. Namun di beberapa tempat terdapat spot atau area foto selfie yang sering didatangi sebagai objek wisata pada kawasan perkebunan sawit. Di masa mendatang potensi wisata dapat menjadi tumpuan dimana desa juga sedang membangun rumah kontrakan yang dapat dikelola BUMDesa sekaligus mendukung sarana prasarana pengelolaan potensi wisata di Desa Nyuruk.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Pendamping Desa  
Hari/Tanggal : Kamis / 13 September 2018  
Waktu : 14.57 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Desa Nyuruk  
Kode Instrumen : B2

### I. Implementasi Kebijakan

#### A. Komunikasi

- Bagaimana intensitas dan metode sosialisasi yang dilakukan instansi daerah untuk meningkatkan pemahaman BUMDesa

Jawab : Monitoring BUMDesa baru 2-3 kali dilakukan oleh tim kabupaten. Pembinaan BUMDesa lebih sering dilakukan oleh Pendamping Desa bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan pada P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dibandingkan Tim Perintisan, Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur. Pendamping Desa memang telah melakukan manajemen pengelolaan BUMDesa terkait keuangan dan pembukuan namun karena keterbatasan sehingga belum terakomodir semua. Sehingga rekan-rekan BUMDesa harus memiliki inisiatif dengan mencari peluang usaha dan mengkoordinasikan usahanya ke tiap-tiap dinas sesuai bidang usaha yang akan dikembangkan serta cakupan bidang.

### II. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Bentuk Organisasi

- Menurut anda bentuk organisasi BUMDesa telah sesuai dengan karakteristik dan potensi kewilayahan daerah

Jawab : Sesuai komitmen Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), bentuk organisasi BUMDesa pada beberapa desa memang dikategorikan sesuai karakteristik dan potensi seperti desa balok sebagai pengembangan wisata. Sementara desa nyuruk sebagai sentra kerajinan tangan dan desa jangkang sebagai sentra belanja serta desa dendang menjadi usaha kuliner. Unit usaha akan menyesuaikan kategori usaha yang menjadi karakteristik masing-masing desa. Sempat terjadi perubahan organisasi

pada bumdesa balok, namun sejak 2017 karena bumdesa menjadi prioritas dana desa maka setiap desa mulai mendirikan bumdesa.

#### B. Klasifikasi Jenis Usaha

- Bagaimana potensi wisata mampu dikembangkan menjadi unit usaha BUMDesa

Jawab : Beberapa usaha yang akan direalisasikan oleh BUMDesa Tebing Tinggi dalam mengelola objek wisata direncanakan melalui unit usaha wisata yang bergerak dibidang jasa transportasi dan pengembangan objek wisata situs balok lama. Sedangkan unit usaha yang sudah direalisasikan oleh BUMDesa Pelingge diantaranya simpan pinjam, pupuk, bahan material bangunan, kelompok pertanian dan perkebunan serta penjualan produk dan perdagangan. Bahkan usaha simpan pinjam beromset 14 juta salah satunya dari pupuk yang diperuntukkan bagi petani, pekebun dan umum sengan termin perbulan hingga 5 kali pembayaran. Namun akhirnya inisiatif tetap harus bumdesa.

#### C. Kerjasama

- Bagaimana upaya BUMDesa dalam mengelola objek wisata yang potensial
- Jawab : Upaya BUMDesa dalam mengembangkan objek wisata tentunya harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pihak bumdesa rutin mengadakan pertemuan seminggu sekali setiap hari jumat guna membahas konsep dan masalah bisnis usaha. Namun harus ada sorongan dan semangat atas upaya tersebut oleh aparat desa maupun kecamatan.

### III. Pariwisata

#### A. Destinasi Pariwisata

- Bagaimana strategi pemerintah dalam menyediakan akses dan layanan kepariwisataan

Jawab :. Pembangunan sarana prasarana harus didukung seperti Gazebo sebagai tempat singgah yang berada di selat balok. Namun harus ada kerjasama antara desa dan bumdesa memanfaatkan dukungan nelayan setempat dalam mengembangkan wisata tersebut. Strategi dan kebijakan pemerintah harus ditingkatkan dengan mendorong peningkatan infrastruktur pendukung oleh desa serta menggandeng pihak swasta guna menjadikannya sebagai lokasi kunjungan wisata yang menarik.

- Salah satu unit usaha BUMDesa adalah pengembangan potensi wisata, bagaimana menurut anda

Jawab : Unit usaha wisata justru akan menguntungkan BUMDesa. Sebagai contoh omset pada objek wisata Keretak Nibong menghasilkan 11 juta pada musim puasa hingga lebaran sehingga menutupi biaya operasional dari uang tiket masuk. Kedepan bagi para pengunjung akan disiapkan penjualan makanan dari desa setempat.

#### B. Pemasaran

- Bagaimana upaya pemasaran wisata yang potensial bagi kemajuan perekonomian daerah

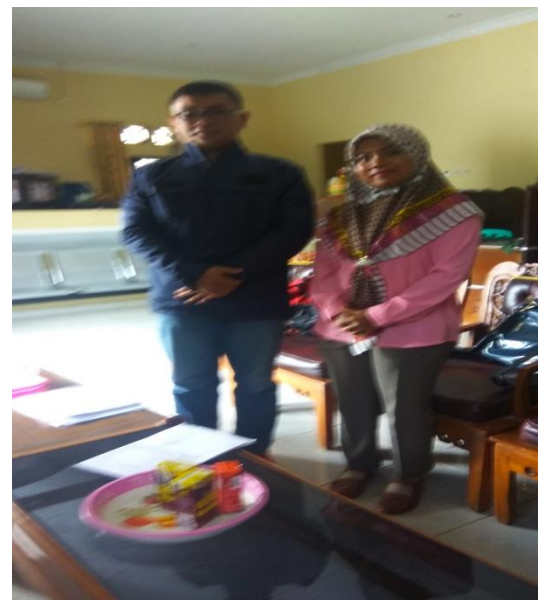
Jawab : Kehadiran pengunjung objek wisata diantaranya dari sosial media seperti facebook dan media cetak seperti koran. Dukungan pemerintah memang cukup baik dengan telah mempromosikan objek wisata Keretak Nibong di Koran Lokal Pos Belitung.

#### C. Kelembagaan Kepariwisata

- Salah satu bentuk kelembagaan pariwisata adalah BUMDesa unit usaha wisata, bagaimana menurut anda

Jawab : Ada beberapa objek wisata di kecamatan dendang salah satunya Keretak Nibong namun kepengurusannya bukan dibawah pengelolaan BUMDesa tetapi komunitas nelayan yang difasilitasi oleh desa untuk pengembangan wisatanya. Mungkin kedepannya ada kerjasama dengan BUMDesa dalam hal pengelolaan atau permodalannya sehingga sarana prasarana atau pembiayaan bisa dibantu pihak pemerintah desa.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Desa Jangkang  
 Hari/Tanggal : Jum'at / 14 September 2018  
 Waktu : 08.51 WIB – selesai  
 Tempat : Kantor Desa Jangkang  
 Kode Instrumen : C3

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Dana desa di Desa Jangkang memang telah disisihkan untuk penyertaan modal bagi BUMDesa Pelingge sekitar 200 an juta. Dimana komitmen desa memang mendukung perkembangan usaha BUMDesa dimulai dari pembentukan pada tahun 2017. Namun konsep pengembangan BUMDesa selain bisnis juga harus mengedepankan sosial sehingga sumber daya BUMDesa yang dijiwai oleh pengurus tetap mengedepankan keuntungan sekaligus manfaat.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

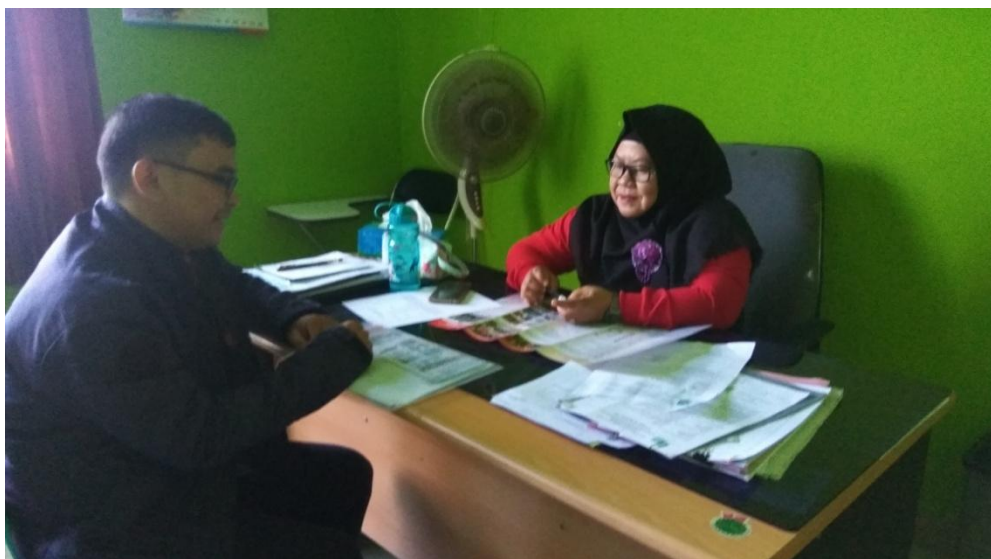
Jawab : Perjanjian atas pembagian keuntungan usaha telah disepakati bersama selama beberapa tahun antara pihak desa dan BUMDesa. Selama ini keuntungan baru masuk sebagai pendapatan BUMDesa sehingga belum diakui sebagai pendapatan desa. Kalau terdapat keuntungan berupa Sisa Hasil Usaha menjadi pertimbangan bagi desa.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : Pada saat ini unit usaha yang potensial bagi BUMDes yakni usaha perdagangan mencakup usaha pertokoan atau rumah makan. Adapun aset yang dimiliki desa saat ini berupa kios nantinya akan digunakan sebagai warung dan rumah makan atau cafe dimana pengelolaanya akan segera diserahkan pada BUMDesa. Aset desa telah diserahkan pengelolaan sepenuhnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai usaha sewa seperti kursi dan tenda. Unit usaha lain yakni kerajinan, bengkel dan simpan pinjam serta

peternakan juga sedang dikembangkan. Adapun usaha kerajinan memang sudah lama berjalan sehingga BUMDesa hanya mengakomodir usaha yang berkembang serta mendorong penjualan memanfaatkan hasil kerajinan. Unit usaha yang sedang dikembangkan ini memang menjadi penopang ekonomi masyarakat dimana BUMDesa menawarkan kebutuhan bahan di toko dengan mengambil langsung dari agen sehingga tidak bergantung dengan pemasok bahan dari luar. Sedangkan unit usaha kerajinan dapat dimanfaatkan ke depan untuk mendukung unit wisata dimana hasil kerajinan dibeli oleh BUMDesa sebelum dititipkan di galeri wisata sehingga modal masyarakat kembali relatif cepat dan menguntungkan secara distribusi produk dan pemasaran.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Desa Balok  
Hari/Tanggal : Jum'at / 14 September 2018  
Waktu : 09.44 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Desa Balok  
Kode Instrumen : C2

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Kami sudah menganggarkan penyertaan modal bagi BUMDesa Tebing Tinggi setiap tahun namun selalu menjadi dana SILPA, baru-baru ini BUMDesa dikembangkan lagi dengan melakukan penyegaran organisasi baru dimana unit-unit usaha telah mencakup beberapa jenis terutama unit usaha pariwisata. Pada tahun 2018 telah dialokasikan sebesar 112 Juta pada tahun ini dengan pencairan baru sekitar 40 % dimana pada tahun 2016 dan 2017, penyertaan modal tersebut tidak direalisasikan.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Adapun skema pengembalian modal belum terlalu jelas, sehingga desa belum berani menganggarkan terlalu besar. Sehingga klausul penganggaran modal melalui perjanjian antara desa dan BUMDesa masih berlaku umum tanpa persyaratan pengembalian dalam jumlah tertentu. Unit-unit bisnis yang dimiliki BUMDesa juga belum beroperasi sebagaimana mestinya sehingga pembagian keuntungan belum terlalu jelas serta belum berdampak pada pedapatan desa.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : BUMDesa Tebing Tinggi telah memiliki unit usaha perkebunan dimana dalam waktu dekat akan segera merealisasikan kerja sama kemitraan sawit dengan perusahaan perkebunan sawit setempat baik pengelolaan sawit maupun distribusi pengangkutan sawit. BUMDesa juga sudah memiliki unit wisata namun belum beroperasi. Sedangkan objek

wisata yang telah dikembangkan oleh masyarakat desa balok diantaranya Keretak Nibong yang dirintis melalui swadaya masyarakat. Dibandingkan pemerintah daerah atau pemerintah desa, perusahaan justru menyambut baik pengembangan oleh masyarakat atau komunitas lokal. Hal ini dikarenakan objek tersebut berada diatas HGU (Hak Guna usaha) milik perusahaan. Kedepan pemerintah desa maupun BUMDesa akan berusaha mendorong perusahaan agar melepaskan pengelolaan lokasi tersebut sehingga dukungan pembangunan sarana dan prasarana akan lebih memadai. Mediasi antara pihak perusahaan dan pemerintah desa serta BUMDesa dapat terlaksana dimana nantinya hak diberikan ke desa sementara pengelolaan menjadi tanggungjawab BUMDesa. Hal tersebut dapat mewujudkan langkah jangka panjang BUMDesa melalui unit pariwisata.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Direktur Badan Usaha Milik Desa Persada Berkah  
 Hari/Tanggal : Jum'at / 14 September 2018  
 Waktu : 10.22 WIB – selesai  
 Tempat : Kediaman Direktur BUMDesa  
 Kode Instrumen : D1

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Dukungan dana desa belum memadai hingga saat ini. Adapun BUMDesa Persada berkah baru didirikan pada tahun 2017 dimana penyertaan modal hanya sekitar 100 juta. Sampai sekarang dukungan tersebut belum terealisasi dengan baik sehingga BUMDesa kesulitan beroperasi. Operasional bumdesa ke depan masih menitikberatkan pada potensi usaha yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Selain itu unit usaha tersebut dengan dukungan dana yang ada dapat dijadikan pemicu pertumbuhan unit atau jenis usaha lainnya sehingga dapat menghidupi kegiatan BUMDesa. Penyertaan modal dari dana desa sementara dapat dimaksimalkan guna kebutuhan operasional organisasi.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Hasil usaha jika BUMDesa pada saat ini belum menghasilkan apapun karena organisasi BUMDesa baru didirikan sementara kemanfaatan dari hasil operasi belum diharapkan dapat memberikan kontribusi. Namun ke depan sangat diharapkan ada pembagian hasil usaha atas kegiatan atau unit usaha yang telah berjalan.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : Pada jangka pendek BUMDesa Persada Berkah telah berencana membangun unit usaha perdagangan mencakup beras dan gas. Selain itu, BUMDesa juga berencana memfasilitasi usaha kerupuk berbahan dasar ikan dan udang serta keripik guna mengakomodir hasil tangkapan nelayan atau

hasil petani setempat sebagai perantara bagi toko, swalayan atau galeri oleh-oleh. Namun tidak terlepas dari pelatihan keterampilan bagi pengelola. Upaya lain yakni mengelola aset desa diantaranya tarub, kursi serta kios yang telah terbangun namun hingga saat ini belum ada pelepasan aset dari pihak desa. Upaya lainnya yakni merintis usaha perternakan berupa penggemukan sapi. Selain itu pada jangka panjang rencana ke depan memanfaatkan potensi wisata berupa pelabuhan rakyat dendang. Adapun kegiatan meliputi pembangunan kios non permanen yang diperuntukkan untuk melayani pengunjung lokal setempat terutama anak muda setempat. Hingga saat ini sudah terbangun talud hingga pendirian tambak ikan untuk memfasilitasi nelayan setempat. Proses pengelolaan wisata nantinya akan melibatkan karang taruna atau organisasi setingkat desa lainnya. Kedepan strategi pemerintah daerah akan mulai memanfaatkan pelabuhan tanjung rising sebagai pelabuhan bongkar muat selain pelabuhan bagi kapal pengangkut sawit sedangkan pelabuhan rakyat dendang akan dijadikan rest area guna mendukung komersialisasi pelabuhan sebagai pelabuhan umum. Selain itu juga ke depan akan dikembangkan situs menarik karena berbau unsur sejarah yang merupakan objek vital pada jaman penjajahan belanda. Diantaranya Aik belande serta petunjuk lokasi 0 km yang terlihat dari kejauhan pada saat melaut dari pelabuhan dendang. Wisata yang cocok dikembangkan di dendang serta menjadi fokus pengembangan hanyalah wisata pelabuhan atau wisata mangrove. Hal tersebut telah ditindaklanjuti melalui upaya pendirian unit usaha wisata dibawah BUMDesa.

FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Direktur Badan Usaha Milik Desa Tebing Tinggi  
 Hari/Tanggal : Sabtu / 15 September 2018  
 Waktu : 14.48 WIB – selesai  
 Tempat : Terminal Tanjung Pandan  
 Kode Instrumen : D2

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Sebagai konsekuensi perubahan manajemen, BUMDesa Tebing Tinggi belum memiliki pelimpahan modal atau dana dari pengurus sebelumnya baik berupa dana atau berkas administratif. Sejak februari melalui perdes kembali dibentuk dengan komitmen dukungan dana desa sekitar 112 juta namun baru direalisasikan 40 % pada triwulan 2. Dana tersebut digunakan guna menyokong unit usaha BUMDesa diantaranya unit usaha kelautan dan perikanan, unit jasa dan transportasi dan unit usaha perkebunan. BUMDesa juga telah meminta dukungan bimbingan teknis dan manajemen serta studi banding ke BUMDesa di wilayah Belitung Timur dan telah disetujui serta dianggarkan pihak desa. Dengan dukungan dana desa diharapkan penyertaan modal terus berjalan sehingga unit usaha dapat terus berkembang.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Beberapa objek selama ini masih dikelola pihak diluar BUMDesa yakni komunitas nelayan yang selama ini mendapatkan 15% dari keuntungan atas tiket masuk objek wisata Keretak Nibong. Walau pengelolaan nanti diharapkan akan diserahkan ke BUMDesa sehingga nantinya pembagian persentase dari keuntungan atas penyertaan modal yang diserahkan oleh pihak desa akan menjadi kontribusi pendapatan desa. Kedepan pemetaan potensi desa harus dapat dilakukan bekerja sama dengan BUMDesa pada satu Kecamatan Dendang. Pembagian hasil juga

diharapkan didapat dari pengembangan destinasi menjadi penghasilan bumdesa sekaligus pendapatan asli desa.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : Organisasi BUMDesa Tebing Tinggi baru dirintis kembali sejak terjadinya perubahan manajemen. Adapun unit usaha kelautan dan perikanan diantaranya telah merangkul nelayan udang sementara unit jasa dan transportasi berupa kontrak dengan perusahaan sawit sedangkan unit usaha perkebunan berupa kebun kemitraan berupa MoU. Hingga saat ini sudah ada pelimpahan hak dari desa ke BUMDesa guna mengelola kebun tersebut. Dalam jangka pendek usaha kemitraan sawit serta jasa distribusi sawit inilah yang menjadi fokus BUMDesa melalui kesepakatan karena kesepakatan tersebut akan menguntungkan bagi desa, masyarakat serta BUMDesa. Selain itu BUMDesa juga berencana akan mengembangkan usaha wisata diantaranya membangun sarana prasarana pada objek wisata Keretak Nibong sekaligus wisata sejarah Makam Raja Balok berupa daya tarik destinasi seperti Jalan Lingkar Wisata, Kios sebagai resto hingga Home Stay namun terkendala HGU milik perusahaan. Namun solusi dalam waktu dekat sarana tersebut akan dibangun diatas tanah desa yang berada di sekitar jalan masuk objek wisata. Kemudian akses terbangun dari Keretak Nibong hingga wisata mangrove yang berada di muara sungai balok sehingga serasi dengan situs Makam. Tentunya keberlanjutan usaha membutuhkan proses dan waktu secara bertahap.

### **FOTO KEGIATAN**





## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Desa Dendang  
Hari/Tanggal : Rabu / 19 September 2018  
Waktu : 10.05 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Desa Dendang  
Kode Instrumen : C1

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Penyertaan Modal sudah mulai disertakan bagi BUMDesa Persada Berkah sebesar 100 juta guna kepentingan operasional. Diantaranya dapat digunakan untuk kepentingan kantor mencakup ATK, membangun unit usaha perdagangan yakni distributor atau penyalur isi ulang gas. Secara umum ada 3 unit usaha diantaranya unit pengelolaan jasa, perdagangan dan pengelolaan aset.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Pembagian hasil usaha diharapkan akan terjadi antara Desa dan BUMDesa diantaranya melalui peluang bagi hasil dari pengelolaan aset, pengelolaan sumber air baku serta dari pembudidayaan ikan dan peternakan sapi. Lebih lanjut dari penyertaan modal untuk sementara mampu mendukung operasional BUMDesa serta menghasilkan pendapatan desa di masa mendatang sesuai kesepakatan antara pihak desa dan BUMDesa.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : BUMDesa Persada Berkah telah mulai berjalan dimana rencananya desa akan menyerahkan pengelolaan aset berupa kios sejumlah 6 unit dan rumah kontrakan 4 unit untuk diserahkan. Pengelolaan aset desa diusulkan akan dilimpahkan kepada BUMDesa melalui proses verifikasi aset kepada BUMDesa melalui pelepasan aset. Selain itu aset yang mulai dapat diserahkan yakni tarub atau kursi. Pelimpahan aset dari desa ke

BUMDesa akan memakan waktu namun desa akan berusaha secepatnya melalui penerbitan SK Kades guna memulai proses penyerahan tersebut disaksikan oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan. Selain itu ada peluang usaha dari pengelolaan sumber air baku milik perusahaan yakni program pamsimas. Sumber tersebut berupa sanitasi air minum yang akan disalurkan kepada masyarakat. Ke depan air tersebut akan didistribusikan ke masyarakat melalui pengelolaan SPAM yang akan dikelola oleh BUMDesa. Usaha lainnya adalah perikanan berupa budi daya kerapu yang bekerjasama dengan nelayan, usaha peternakan berupa pembibitan sapi bekerja sama dengan pekebun yang memiliki lahan sebagai area peternakan.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
 Hari/Tanggal : Senin / 24 September 2018  
 Waktu : 08.41 WIB – selesai  
 Tempat : Kantor DPMPD Kab. Belitung Timur  
 Kode Instrumen : A1

### I. Implementasi Kebijakan

#### A. Komunikasi

- Bagaimana intensitas dan metode sosialisasi yang dilakukan instansi daerah untuk meningkatkan pemahaman BUMDesa

Jawab : Pembinaan dilakukan oleh tim perintisan, pembentukan dan pendampingan BUMDesa. Bentuk pembinaan seperti konsultasi dan turun ke lapangan menemui dan melihat langsung progress perkembangan BUMDesa. Adapun pembentukan tim merupakan bagian dari program kegiatan yang telah terencana pada anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu sosialisasi juga telah berjalan yang dipusatkan di Kabupaten baik dari dinas maupun dari Kementerian menyangkut manajemen dan pengelolaan BUMDesa. Setiap periode kegiatan memang tim melakukan sosialisasi berupa pembinaan turun ke lapangan dan juga bimbingan teknis. Penyuluhan juga dilakukan baik melalui prakarsa dinas sosial maupun undangan dari masing-masing desa yang melibatkan dinas teknis maupun penggerak swadaya masyarakat.

#### B. Sumber Daya

- Sejauh mana potensi alam, manusia dan modal dapat mendukung implementasi BUMDesa

Jawab : Motivasi dan semangat membangun BUMDesa masih kurang sementara sumber daya alam seperti kearifan lokal dimiliki dan menjadi peluang setiap desa dalam pengembangan. Sumber daya alam di Kecamatan Dendang yang bisa dikembangkan diantaranya hasil laut dan hasil hutan, karena wilayah dendang yang terdiri dari hutan yang sangat luas dan berada di pinggir sungai dan laut. Hasil kayu seperti rotan serta hasil perkebunan lainnya. Situasi yang terjadi di masyarakat banyak

ketergantungan usaha pada pengijon setempat dapat menjadi peluang. Peluang BUMDesa dengan kekuatan modal untuk mengambil alih dan mengurangi ketergantungan pada pemodal pribadi hingga membantu keberlanjutan usaha. Seperti usaha perdagangan yang memanfaatkan modal barang dari distributor dan perkebunan seperti lada dan sawit yang memanfaatkan modal pupuk dan insentif pengusaha dapat digantikan oleh BUMDesa. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan, kesepakatan yang menguntungkan serta tingkat pengembalian yang disepakati bersama. Sehingga diharapkan BUMDesa dapat mengambilalih peluang tersebut. Jangka pendek dapat digunakan sebagai pemetaan potensi yang ada di desa, peluang yang dapat ditangkap untuk BUMDesa dihubungkan dengan pengembangan kemajuan masyarakat serta pemanfaatan kekayaan alam sebagai langkah awal. Jangka panjang selain unit usaha tersebut diatas unit wisata bisa dikembangkan dalam jangka panjang. Kesadaran potensi tersebut harus disadari BUMDesa dan desa setempat.

### C. Struktur Birokrasi

- Bagaimana rentang kendali dan kewenangan instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa telah membentuk tim perintisan, pembentukan dan pendampingan BUMDesa yang beranggotakan instansi kabupaten hingga kecamatan. Dipimpin oleh Dinas Sosial, masing-masing anggota tim terdiri dari dinas lintas sektor seperti Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan yang dipayungi Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah. Hubungan masing-masing dinas pada bentuk atau jenis usaha BUMDesa yang akan dirintis dan didampingi serta pengelolaan manajemen seperti pembukuan. Adapun tim dibentuk untuk mensinergikan pengelolaan dan pengembangan BUMDesa. Tim ini bertugas merintis dan merekomendasikan pembentukan hingga mendampingi tata kelola unit BUMDesa. Pihak kecamatan juga yang menjadi perpanjangan tangan kabupaten harus mampu membaca dan menganalisa perkembangan BUMDesa sehingga dapat dibahas bersama tim mengenai rendahnya tingkat pengelolaan dan kekurangan dalam implementasi BUMDesa.

- Bagaimana struktur dan tata kelola instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : Tim perintisan, pembentukan dan pendampingan BUMDesa yang beranggotakan dinas/instansi hingga kecamatan memiliki gugus tugas masing-masing disesuaikan dengan bidang dinas yang dikuasai. Sesuai kewenangan tersebut dan keefektifan masing-masing tugas maka tim selalu memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada setiap BUMDesa dalam setiap kunjungannya ke lapangan. Selain itu memberikan pemahaman dan menyertakan contoh BUMDesa yang telah berjalan bagi masing-masing unit usaha pengembangan. Sehingga diharapkan setiap BUMDesa mampu mengadopsi dan mereplikasi unit tersebut. Selain itu juga masing-masing BUMDesa selalu diarahkan untuk berkoordinasi pada dinas/instansi terkait bidang atau unit usaha yang ingin dikembangkan. Seperti unit usaha peternakan pada Bidang Peternakan di Dinas Pertanian serta unit usaha perikanan pada Dinas Perikanan yang juga masuk serta ikut serta dalam tim pendampingan BUMDesa Kabupaten.

## II. Badan Usaha Milik Desa

### A. Bentuk Organisasi

- Menurut anda bentuk organisasi BUMDesa telah sesuai dengan karakteristik dan potensi kewilayahan daerah

Jawab : Bentuk usaha BUMDesa harus disesuaikan dengan desa jangan hanya mengikuti bentuk usaha desa lain. Pengenalan potensi setiap desa diperlukan dalam pengembangan BUMDesa. Setiap wilayah memiliki identitas dan keidentikan masing-masing sesuai karakteristik wilayah. Seperti unit usaha pertanian, perkebunan, peternakan yang cocok dengan kondisi wilayah di Belitung Timur. Usaha jenis lain juga mencakup pengelolaan aset desa oleh BUMDesa setempat. Ide dan gagasan memang telah banyak diinisiasi dari BUMDesa namun realisasi bentuk usaha masih rendah. Adapun beberapa usaha yang sekarang diprakarsai oleh komunitas atau masyarakat dapat menjadi bagian usaha BUMDesa melalui pola kerjasama. BUMDesa bisa mendukung pemasaran dan permodalan sementara komunitas atau masyarakat bisa memanfaatkan dukungan tersebut. Tentunya alternatif perlu disampaikan kepada komunitas tentang pentingnya kerja sama baik melalui BUMDesa, desa hingga perusahaan. Memanfaatkan kerja sama dan dukungan penting bagi peningkatan potensi yang telah dikembangkan seperti objek wisata maupun usaha di bidang

lain. Jika unit usaha maju melalui BUMDesa bukan tidak mungkin bantuan dari pusat berdatangan seperti stimulan dan bantuan pengembangan unit usaha. BUMDesa juga harus mampu menakar potensi wilayahnya baik melalui prakarsa maupun bermitra untuk mengembangkan unit usahanya.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Seksi Statistik Sosial  
Hari/Tanggal : Kamis / 27 September 2018  
Waktu : 08.33 WIB – selesai  
Tempat : Kantor BPS Kab. Belitung Timur  
Kode Instrumen : E1

### I. Ketahanan Ekonomi

#### A. Bumi dan Sumber Daya Alam

- Bagaimana kondisi kekayaan alam menjadi faktor penentu implementasi BUMDesa wisata

Jawab : Kondisi dan bentang alam kecamatan dendang terdiri dari hutan sehingga menjadi areal perkebunan dan pertanian. Dengan kondisi geografis tersebut, kekuatan ekonomi Kecamatan Dendang masih digerakkan oleh sektor pertanian dan perkebunan selain peternakan. Industri pengolahan juga masih menjadi tumpuan dimana pabrik CPO salah satunya di kecamatan dendang dan makanan menjadi penyumbang. Potensi wisata ke depan memang menjadi harapan namun dalam jangka waktu yang panjang lebih kurang sekitar 10 tahun. Adapun kekayaan alam yang sekarang masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan masih menjadi primadona. Namun mengingat lahan ke depan akan habis sehingga sektor yang memanfaatkan pengolahan sumber daya alam juga berkurang. Sementara itu perlu mencari alternatif lain diantaranya pengembangan wisata. Dengan sumber daya alam yang masih melimpah yang terkonsentrasi pada hutan dan tambang dapat digunakan sebagai ekowisata. Dendang bisa mewujudkan implementasi wisata berbasis ekowisata karena kaya akan hutan atau wisata mangrove dibawah pengelolaan BUMDesa. Ke depan tentunya sektor pariwisata menjadi penunjang utama perekonomian.

#### B. Tenaga Kerja

- Bagaimana pengaruh BUMDesa terhadap perluasan kesempatan kerja

Jawab : Kecamatan Dendang mayoritas mata pencahariannya pekebun yang bermitra dengan perusahaan setempat melalui plasma yakni sawit

serta mengelola tanaman lada. Hal ini menyebabkan serapan tenaga kerja diatas sekitar 60 % masih di sektor perkebunan. Sehingga untuk beralih ke sektor lain hampir tidak memungkinkan. BUMDesa bisa mengembangkan potensi pada sektor ini. Memanfaatkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan industri pengolahan selama beberapa tahun ke depan masih bisa dikelola dan berkontribusi bagi pendapatan masyarakat. BUMDesa bisa memfasilitasi dan mengakomodasi peluang tersebut sehingga bermanfaat bagi kemajuan perekonomian lokal. Terkait dengan unit wisata, sementara ini masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan misalnya kayu yang diolah sebagai kerajinan untuk memenuhi kebutuhan souvenir para pengunjung. Seperti daun lais, rotan sebagai gantungan kunci yang bisa diakomodir BUMDesa bekerja sama dengan galery dan toko oleh-oleh.

#### C. Prasarana

- Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana urgen terhadap pengembangan potensi wisata

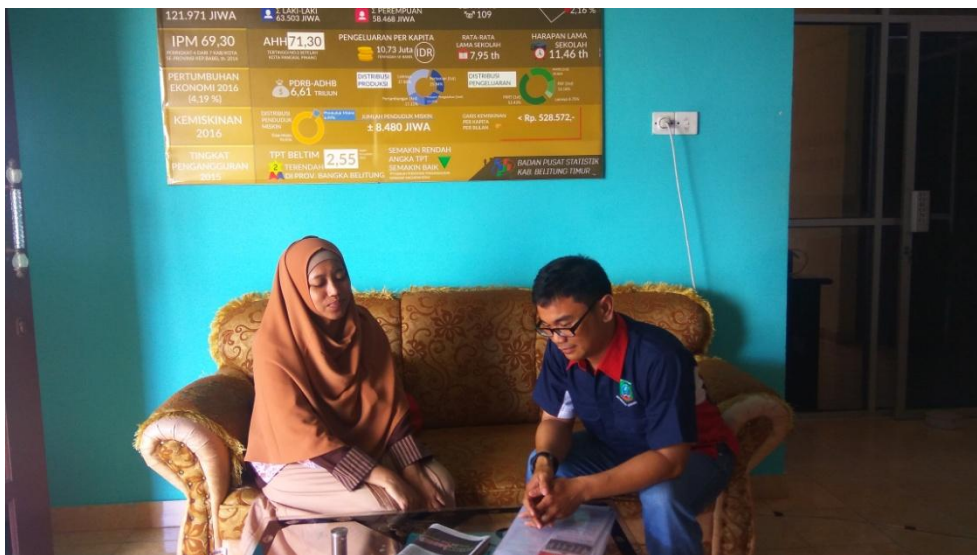
Jawab : Sarana penting bagi kemajuan wisata. Walau inisiatif masyarakat cukup baik dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai objek wisata dan sehingga pembangunan sarana dilakukan melalui swadaya. Namun dengan dukungan serta kerja sama antar pemerintah daerah, desa dan BUMDesa maka pengembangan wisata akan lebih baik. Pemerintah harus mampu mendorong tingkat kunjungan lebih baik sehingga tanpa pelaksanaan event pun orang tetap berkunjung.

#### D. Manajemen

- Upaya manajemen menunjukkan kapabilitas pengelola BUMDesa sesuai harapan

Jawab : Tentunya manajemen seperti pengelolaan permodalan bagi kelompok yang dibina unit usaha BUMDesa akan menunjukkan keberpihakan pada industri usaha kecil dan menengah. Keberpihakan tersebut seperti menjadi penyalur barang hasil kerajinan dengan harga yang disepakati antara pemilik dan BUMDesa sehingga modal terus jalan dan berputar. Pengelolaan manajemen permodalan menunjukkan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga memungkinkan keberlanjutan usaha dan ekspansi bisnis.

## FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Direktur Badan Usaha Milik Desa Bina Karya  
 Hari/Tanggal : Jum'at / 28 September 2018  
 Waktu : 19.59 WIB – selesai  
 Tempat : RS Utama Tanjung Pandan  
 Kode Instrumen : D4

### I. Badan Usaha Milik Desa

#### A. Modal

- Bagaimana dukungan Dana Desa selama ini terhadap BUMDesa

Jawab : Dukungan penyertaan modal selama ini terhadap pendanaan BUMDesa Bina Karya sebesar 85 juta pada tahun 2017 yang digunakan sebagai operasional. Pendanaan tersebut belum seluruhnya digunakan karena keterbatasan model dan unit bisnis serta organisasi yang baru didirikan pada tahun 2017. Namun kami telah mengajukan proposal pendanaan pada tahun depan untuk mengakomodir sejumlah unit usaha yang rencananya akan dijalankan mencakup usaha perkebunan dan pertanian. Selain itu kami juga akan melakukan perombakan manajemen karena beberapa struktur tidak efektif dan unit usaha yang dikembangkan belum sesuai karakteristik wilayah.

- Apakah pembagian hasil usaha yang diterapkan pada BUMDesa sesuai sistem tata kelola

Jawab : Pada prinsipnya BUMDesa Bina Karya yang baru dibentuk belum bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Hal ini ditenggarai karena operasional BUMDesa belum berjalan serta pendanaan yang ditetapkan hanya sebagai operasional kantor belum mengakomodasi unit bisnis. Upaya ini disadari bahwa pengurus masih merasa bahwa setiap usaha harus menuntut pengembalian modal ke dana desa. Namun pengurus BUMDesa paham akhirnya bahwa jika pengelolaan belum mencapai tingkat keuntungan tertentu maka pembagian hasil usaha tidak menjadi kendala.

- Upaya apa saja yang dilakukan guna mencapai keberlanjutan usaha BUMDesa

Jawab : Upaya pengembangan bisnis BUMDesa Bina Karya saat ini masih terbatas karena kekurangpahaman dan ketidakmengertian pengurus terhadap posisi dan upaya BUMDesa. Selain juga belum yakin terhadap unit usaha yang dapat dikembangkan. Namun usaha ke arah itu sudah ada diantaranya mengembangkan jenis usaha karet. Karena unit usaha perkebunan dianggap paling cocok dengan kondisi kewilayahan. Selain itu juga ke depan akan dikembangkan usaha wisata memanfaatkan bentang alam dan kondisi hutan seperti ekowisata dan eduwisata.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan  
Hari/Tanggal : Senin / 1 Oktober 2018  
Waktu : 08.33 WIB – selesai  
Tempat : Kantor BP4D Kab. Belitung Timur  
Kode Instrumen : E1

### I. Implementasi Kebijakan

#### A. Sumber Daya

- Sejauh mana potensi alam, manusia dan modal dapat mendukung implementasi BUMDesa

Jawab : Kita sadari bersama bahwa sumberdaya alam penting dan modal awal bagi pengembangan ekonomi desa. Pendirian BUMDesa pada tiap desa diharapkan dapat menggali potensi tersebut. Kekayaan alam didukung kemampuan sdm dan penyertaan modal melalui peran desa yang lebih efektif. Memanfaatkan ketiga sumber tersebut perintisan dan pendampingan bagi implementasi BUMDesa dapat diwujudkan.

#### B. Disposisi

- Upaya apa saja yang dilakukan instansi daerah dalam meningkatkan pengembangan BUMDesa

Jawab : Selama ini seluruh instansi baik secara bersama atau masing-masing telah melakukan upaya terhadap pengembangan ekonomi desa. Upaya yang dilakukan bappeda diantaranya melakukan perencanaan dan pengorganisasian serta mendorong setiap instansi yang membidangi serta memiliki keahlian dan kualifikasi teknis di bidang usaha tertentu. Usaha tersebut meliputi penyelenggaraan dan pembinaan berupa program kegiatan peningkatan kapasitas atau pendampingan secara langsung. Hal ini secara intensif dilakukan kepada pemerintah desa dan lembaga setingkat desa seperti karang taruna atau bumdes.

- Bagaimana keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi instansi dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan BUMDesa

Jawab : Sesuai tugas dan fungsi yang telah diinstruksikan oleh pimpinan daerah maka bappeda terlibat dalam kegiatan perencanaan dan

pembangunan serta penelitian dan pengembangan mencakup kebijakan daerah serta strategi peningkatan ekonomi daerah. Upaya pengembangan bumdesa menjadi sasaran kebijakan daerah dimana unit ekonomi atau organisasi usaha di tingkat desa terberdayakan. Selain itu bappeda selalu mendorong peningkatan upaya pemberdayaan ekonomi melalui unit usaha mikro. Pengembangan BUMDesa menjadi tolok ukur peningkatan unit-unit ekonomi di desa. Sebagai unit ekonomi desa cakupan BUMDesa cocok dan lingkupnya mencerminkan upaya membangkitkan ekonomi masyarakat.

### C. Struktur Birokrasi

- Bagaimana rentang kendali dan kewenangan instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : Sesuai amanat dan kewenangannya, bappeda melakukan upaya dalam merumuskan kebijakan daerah yang diarahkan pada usaha peningkatan kemajuan perekonomian serta pemanfaatan sumber daya, infrastruktur dan kreativitas dan inovasi menuju daya saing daerah. Terhadap bumdesa, bappeda selalu mengarahkan instansi untuk berperan aktif dalam memberdayakan dan meningkatkan potensinya untuk berkontribusi bagi pengembangan unit ekonomi desa. Selain itu desa turut serta didorong melahirkan rencana pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi desa serta potensial sebagai objek pengelolaan bumdesa ke depan.

- Bagaimana struktur dan tata kelola instansi daerah terhadap BUMDesa

Jawab : Terhadap struktur dan tata kelola bagi bumdesa, bappeda selalu merumuskan kebijakan yang mengakomodir perencanaan pembangunan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Penyusunan kebijakan kepala daerah yang merupakan domain bappeda selalu disinergikan dengan kebijakan lokal atau kebijakan desa yang bermuatan pengembangan pemberdayaan dan perekonomian lokal. Sehingga melalui perencanaan kebijakan dan perumusan strategi seluruh kebijakan daerah dan desa menjadi harmonis dan mencerminkan ruang lingkupnya masing-masing.

## II. Ketahanan Ekonomi

### A. Bumi dan Sumber Daya Alam

- Bagaimana kondisi kekayaan alam menjadi faktor penentu implementasi BUMDesa wisata

Jawab : Sulit dipungkiri bahwa kekayaan alam merupakan anugerah dan berkah bagi daerah. Tentu kekayaan perlu diorganisir dan diatur sehingga pemanfaatannya menjadi kelebihan tersendiri. Sebagai salah satu kelebihan maka keindahan serta pesona objek yang merupakan kekayaan alam dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan. Guna memenuhi kebermanfaatannya tersebut, kehadiran bumdesa cukup dalam mewakili masyarakat untuk mengembangkan objek yang jika digali lebih lanjut akan semakin bernilai. Bumdesa yang telah memiliki unit usaha wisata dapat merealisasikan dan menambah daya tarik lokasi. Bumdesa dapat mengembangkan sendiri atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar memanfaatkan desa sebagai pemodal awal. Dengan demikian lokasi yang semula dianggap objek yang berwujud keindahan, kearifan yang menjadi ciri khas lokal dapat dimanfaatkan sebagai usaha wisata serta direalisasikan sebagai objek wisata.

#### B. Tenaga Kerja

- Bagaimana pengaruh BUMDesa terhadap perluasan kesempatan kerja

Jawab : Otomatis ketika pengembangan usaha dilakukan akan memberi efek positif terhadap kesempatan berusaha. Setiap unit yang didirikan pasti memerlukan tenaga, hal ini akan berdampak bagi kebutuhan usaha masyarakat sekitar. Misalnya usaha warung yang membutuhkan penjaga atau peternakan yang membutuhkan peternak. Selain dari pengembangan usaha, kerjasama yang dilakukan juga membuka keran lapangan kerja. Kebutuhan akan keahlian tertentu di bidang jasa atau kebutuhan barang mendorong masyarakat sekitar membuka diri terhadap pemenuhan tenaga tersebut.

#### C. Prasarana

- Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana urgen terhadap pengembangan potensi wisata

Jawab : Patut diyakini bahwa hampir tinggi bahwa sekitar 50-70 persen sarana yang dimiliki mempengaruhi tingkat kunjungan wisata. Separuhnya bahkan mempertimbangkan ketersediaan dan ketergunaan. Penting bahwa kesediaan sarana dan tata guna serta fungsi dalam menunjang objek wisata setempat. Sehingga dukungan pemerintah daerah atau swasta dalam membangun sarana prasarana sangat berarti. Selain dukungan pemerintah,

keterbangunan sarana juga dapat memanfaatkan peran swasta melalui program pengembangan prasarana yang mereka miliki di tiap perusahaan. Tentunya bentuk dukungan pemerintah dan swasta penting serta menunjukkan keberpihakannya terhadap pengembangan potensi dan objek wisata setempat.

#### D. Manajemen

- Upaya manajemen menunjukkan kapabilitas pengelola BUMDesa sesuai harapan

Jawab : Manajemen yang solid menjadi nilai tambah bagi pengelolaan organisasi. Melihat bentuk dan ragam organisasi tersebut penting bahwa unit atau lembaga desa dimotori oleh sdm yang mumpuni. Kualitas sdm tersebut tercermin dari kemampuan serta kapabilitas pengurus yang baik. Tentu harapannya unit ekonomi selevel bumdesa memiliki modal tersebut. Selain itu kedepan bumdesa tidak segan-segan membuka ruang bagi peningkatan kapabilitas personilnya baik melalui keterlibatan instansi maupun desa sebagai upaya peningkatan sdm bumdesa.

#### FOTO KEGIATAN



**LAMPIRAN 6****TRANSKRIP OBSERVASI**

Hari/Tanggal	: Selasa / 11 September 2018
Waktu	: 08.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan Kantor Desa Kurnia Jaya
Acara	: Pelatihan Pengelolaan BUMDes Angkatan XXXII Tahun 2018
Penyelenggara	: Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Kemendes PDTT
Aspek	: Intensitas dan Metode

**IV. Dasar**

Berdasarkan pesan via Whatsapp oleh Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Kemendes PDTT yang menginformasikan bahwa akan diselenggarakan pelatihan pengelolaan BUMDesa pada tanggal 6-11 September 2018 bertempat di Manggar bagi Direktur dan Bendahara BUMDesa salah satunya BUMDesa Pelingge Jangkang dan BUMDesa Bina Karya Nyuruk.

**V. Pembahasan**

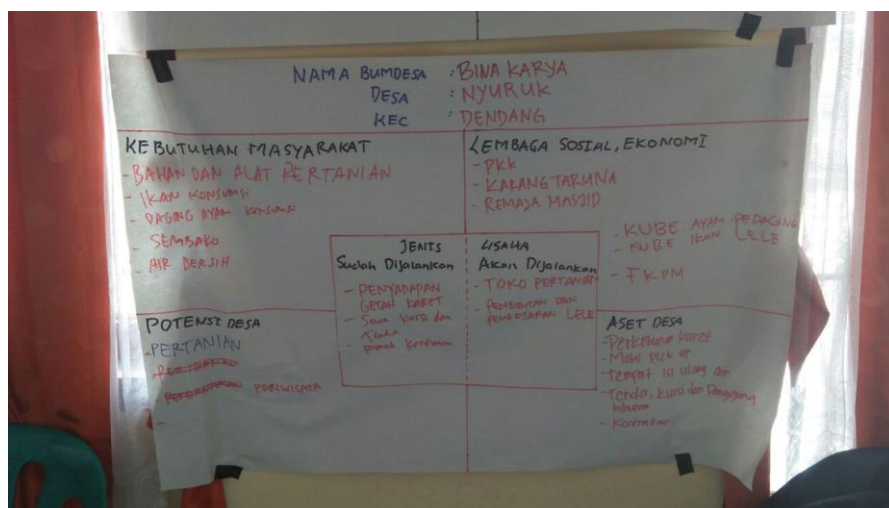
Kegiatan dilakukan oleh narasumber dari PSM dan panitia Kemendes PDTT didukung oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Turut hadir dalam pelatihan selama 6 hari yakni Direktur dan Bendahara BUMDesa se-Kabupaten Belitung Timur serta Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) pada hari penutupan. Pelatihan mencakup manajemen pengelolaan BUMDesa, menata laporan operasional serta memetakan dan menganalisa kelayakan potensi usaha. Pelatihan juga dilaksanakan secara interaktif dimana peserta mendapat kesempatan yang sama untuk langsung mengimplementasikan kegiatan.

**VI. Penutup**

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa pengelolaan dan penataan BUMDesa yang merupakan kebijakan prioritas dana desa sudah diimplementasikan secara nyata oleh Kementerian. Bersama dengan kabupaten langkah pemberian pelatihan merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong realisasi BUMDesa agar berjalan sesuai harapan serta ikut membantu meningkatkan perekonomian desa. Pelatihan bagi pengurus

BUMDesa juga memperlihatkan eksistensi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan realisasi BUMDesa. Melalui pelatihan didapatkan kesan yang baik oleh para peserta yakni berupa pemahaman tata kelola BUMDesa yang optimal.

### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal : Kamis / 13 September 2018  
Waktu : 10.41 WIB - selesai  
Tempat : Tanah Masyarakat Dendang  
Acara : Pemetaan Wisata Desa Dendang  
Penyelenggara : Tokoh Masyarakat Desa Dendang  
Aspek : Kekayaan Alam

### I. Dasar

Pada tanggal 13 September 2018 peneliti sedang mewawancarai tokoh masyarakat sebagai salah satu narasumber. Kemudian narasumber mengajak peneliti mengunjungi objek yang akan direalisasikan serta direncanakan oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua Karang Taruna. Kunjungan ke beberapa tempat tersebut sekaligus menjadi observasi awal peneliti ditemani oleh narasumber.

### II. Pembahasan

Adapun kunjungan ke beberapa lokasi yakni ke salah satu tanah milik warga Kecamatan Dendang yang dahulu menyimpan sejarah. Objek tersebut berupa Tugu 0 Km yang terletak paling tinggi. Tugu ini merupakan penunjuk arah dan tanda semasa penjajahan yang berarti daratan sudah semakin dekat. Selain itu peneliti juga diberi tahu mengenai objek lain yang berada persis dibawah Tugu yakni Aik Belande yang menurut sejarah merupakan tempat pemandian semasa penjajahan.

### III. Penutup

Setelah berkunjung ke salah satu tempat atau objek sejarah, peneliti menyadari bahwa dendang menyimpan potensi objek yang berupa situs sejarah yang layak dikembangkan. Pengembangan situs sejarah ini jika digali dan dikembangkan dapat menjadi wisata yang memanfaatkan sejarah maupun memanfaatkan kondisi alam yang berupa hutan seperti eduwisata atau ekowisata. Pengembangan wisata ini membutuhkan proses panjang, namun dapat dimulai dengan menjadikannya peluang bagi unit wisata yang diinisiasi oleh lembaga setingkat desa baik BUMDesa atau kerjasama dengan Karang

Taruna Desa. Selain itu ide untuk mengembangkan objek sudah menjadi gagasan tokoh masyarakat setempat sehingga kedepan harus direalisasikan.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Kamis / 13 September 2018
Waktu	: 12.00 WIB - selesai
Tempat	: Desa Jangkang
Acara	: Pendampingan dan Pembinaan BUMDesa Pelingge
Penyelenggara	: Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur
Aspek	: Rentang Kendali dan Tata Kelola

### I. Dasar

Berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Nomor 412/809/DSPMD-V/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Pendampingan BUMDesa yang ditujukan kepada Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur berupa Jadwal Pendampingan BUMDesa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018. Atas dasar tersebut peneliti melakukan observasi non partisipan pada BUMDesa di Kecamatan Dendang salah satunya pada BUMDesa Pelingge Desa Jangkang.

### II. Pembahasan

Pembinaan yang dilakukan oleh tim kepada BUMDesa Pelingge Desa Jangkang dihadiri oleh seluruh kepengurusan BUMDesa yakni Direktur melibatkan tim pendamping desa dan Kecamatan. Dari hasil pendampingan terlihat bahwa tim berupaya untuk mendorong supaya BUMDesa Pelingge membangun usaha dengan memperhatikan potensi dan karakter desa memanfaatkan dana desa, kerja sama dengan kelompok maupun CSR perusahaan setempat. Adapun inisiatif desa di bidang tertentu seperti usaha pertanian, peternakan atau perikanan dapat berkoordinasi dengan salah satu tim atau menghubungi dinas terkait. BUMDesa Pelingge juga telah menjalankan beberapa unit seperti perdagangan dan jasa serta kerajinan hingga memiliki konsep serta ide pengembangan unit usaha mencakup peternakan bebek.

### III. Penutup

Dari observasi yang dilakukan terlihat bahwa tim telah melakukan komunikasi yang efektif berupa pembinaan dan pendampingan kepada BUMDesa Pelingge

melalui struktur dan kewenangan serta upaya yang jelas serta mengarahkan BUMDesa memanfaatkan sumber daya, modal dan manusia guna mengembangkan unit usaha BUMDesa. Memberdayakan unit usaha yang ingin dikembangkan dengan kerjasama dengan desa, kelompok masyarakat dan perusahaan. Tim juga mampu mengarahkan BUMDesa untuk mengelola dan mengidentifikasi potensi yang cocok serta mengadopsi BUMDesa lain guna meningkatkan unit-unit usahanya.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Kamis / 13 September 2018
Waktu	: 14.00 WIB - selesai
Tempat	: Desa Nyuruk
Acara	: Pendampingan dan Pembinaan BUMDesa Bina Karya
Penyelenggara	: Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur
Aspek	: Rentang Kendali dan Tata Kelola

### I. Dasar

Berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Nomor 412/809/DSPMD-V/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Pendampingan BUMDesa yang ditujukan kepada Tim Perintisan, Pembentukan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Belitung Timur berupa Jadwal Pendampingan BUMDesa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018. Atas dasar tersebut peneliti melakukan observasi non partisipan pada BUMDesa di Kecamatan Dendang salah satunya pada BUMDesa Bina Karya Desa Nyuruk.

### II. Pembahasan

Pembinaan BUMDesa Bina Karya Desa Nyuruk melibatkan tim, kecamatan dan pendamping desa dihadiri oleh Kepala Desa namun tidak menghadirkan Direktur BUMDesa yang diwakili oleh Bendahara. Adapun BUMDesa belum memiliki arah dan strategi yang jelas dalam pengembangan unit usaha. Hal ini dikarenakan pengurus masih merasa takut memanfaatkan modal yang berasal dari dana desa. Selain itu, diketahui juga kepengurusan memang akan segera diperbaiki dengan merombak manajemen. Adapun unit yang baru dikembangkan belum ada namun BUMDesa sudah memiliki konsep pengembangan unit usaha diantaranya pada bidang perkebunan dan pertanian. Tim tidak henti-hentinya mendorong BUMDesa untuk merealisasikan usaha yang potensial bagi pengembangan unit usaha.

### III. Penutup

Dari pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terlihat bahwa tim telah berusaha mengarahkan operasional BUMDesa. Tim juga sangat terbuka jika

diminta kesediaan BUMDesa untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait pengembangan BUMDesa. Selain itu contoh pengembangan unit usaha BUMDesa diluar kecamatan dendang dapat menjadi opsi karena karakteristik wilayah yang tidak jauh berbeda. Tim juga meminta keseriusan dan peran serta pengurus yang sangat penting dalam pengembangan unit usaha serta berharap bahwa peluang usaha dapat diciptakan oleh BUMDesa sehingga masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap usaha-usaha diluar desa.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Rabu / 19 September 2018
Waktu	: 08.00 WIB - selesai
Tempat	: Desa Jangkang
Acara	: Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBDes
Penyelenggara	: Tim Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur
Aspek	: Potensi Sumber Daya

### I. Dasar

Berdasarkan surat Kecamatan Dendang Nomor 414.14/272/KCD tanggal 10 September 2018 perihal Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2018 berupa Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBDesa Semester 1 se-Kecamatan Dendang Tahun 2018 yang berlokasi di Desa Jangkang pada tanggal 19 September 2018.

### II. Pembahasan

Kegiatan monitoring dan evaluasi melibatkan tim kecamatan yang terdiri dari berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan. Acara dihadiri oleh seluruh perangkat desa dari Kepala Desa hingga Kepala Dusun serta perangkat desa lainnya. Setelah dilakukan pembinaan secara umum, tim berusaha menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan rutin guna menelusuri ketaatan pemerintah desa terhadap anggaran serta realisasi anggaran dan pembangunan fisik sekaligus administrasi dan kesesuaian dokumen pertanggungjawaban. Setelah pembinaan secara umum dilanjutkan dengan pengarahan secara khusus kepada masing-masing perangkat desa sesuai tanggungjawab per bidang tugas oleh masing-masing anggota tim.

### III. Penutup

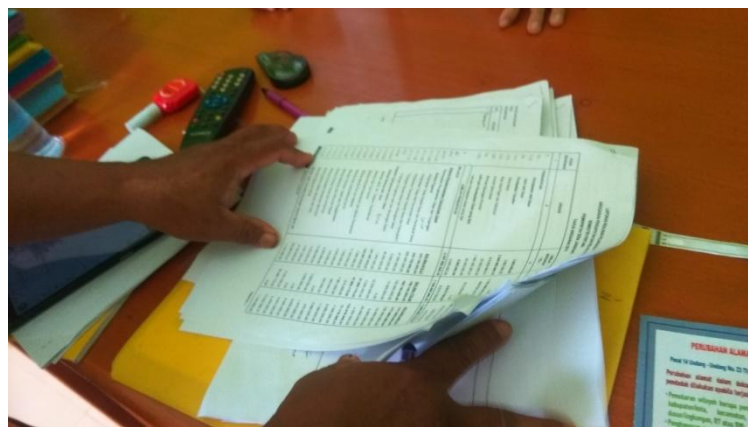
Menurut observasi yang dilakukan terlihat bahwa tim kecamatan telah secara serius berusaha mendampingi pelaksanaan APBDes serta mengarahkan realisasi APBDes sesuai peruntukan. Selain itu upaya tim juga mendorong agar

desa segera merealisasikan anggaran terutama yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selain pembangunan infrastruktur serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### JADWAL KEGIATAN

NO	DESA	HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1.	Dendang	Senin/17 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Dendang
2.	Balok	Selasa/18 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Balok
3.	Jangkang	Rabu/19 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Jangkang
4.	Nyuruk	Kamis/20 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Nyuruk

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Kamis / 20 September 2018
Waktu	: 08.00 WIB - selesai
Tempat	: Desa Nyuruk
Acara	: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes
Penyelenggara	: Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBDes Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur
Aspek	: Potensi Sumber Daya

### I. Dasar

Berdasarkan surat Kecamatan Dendang Nomor 414.14/272/KCD tanggal 10 September 2018 perihal Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBDesa Semester 1 Tahun Anggaran 2018 berupa Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBDesa Semester 1 se-Kecamatan Dendang Tahun 2018 yang berlokasi di Desa Nyuruk pada tanggal 20 September 2018.

### II. Pembahasan

Kegiatan monitoring dan evaluasi melibatkan tim kecamatan yang terdiri dari berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan. Acara dihadiri oleh seluruh perangkat desa dari Kepala Desa hingga Kepala Dusun serta perangkat desa lainnya. Pembinaan secara umum dilakukan oleh Camat, salah satunya mendorong inisiatif desa pada pemberdayaan ekonomi melalui implementasi BUMDesa. Beliau juga mendorong desa untuk selalu berusaha taat aturan serta memprioritaskan dana desa sesuai peruntukannya sekaligus mengarahkan agar dukungan terhadap usaha BUMDesa diperkuat. Kegiatan dilanjutkan dengan memeriksakan realisasi anggaran dan pembangunan fisik sekaligus administrasi dan kesesuaian dokumen pertanggungjawaban berupa pengarahannya secara khusus kepada masing-masing perangkat desa sesuai tanggungjawab per bidang tugas oleh masing-masing anggota tim.

### III. Penutup

Menurut observasi yang dilakukan terlihat bahwa tim kecamatan berusaha membina peningkatan pelaksanaan APBDes serta mengarahkan realisasi

APBDes sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu upaya tim juga mendorong agar desa memfokuskan kegiatan pada upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan usaha BUMDesa dan pengelolaan unit usaha ekonomi produktif yang berkembang di desa sebagai peluang bagi pendapatan masyarakat.

#### JADWAL KEGIATAN

NO	DESA	HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1.	Dendang	Senin/17 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Dendang
2.	Balok	Selasa/18 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Balok
3.	Jangkang	Rabu/19 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Jangkang
4.	Nyuruk	Kamis/20 September 2018	09.00 WIB - selesai	Kantor Desa Nyuruk

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Kamis / 27 September 2018
Waktu	: 08.30 WIB - selesai
Tempat	: Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Belitung Timur
Acara	: Bursa Inovasi Desa Tahun 2018
Penyelenggara	: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur
Aspek	: Komitmen Pengembangan

### I. Dasar

Berdasarkan surat Bupati Belitung Timur Nomor 005/964/DSPMD/IV/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Undangan pada Acara Bursa Inovasi Desa (BID) Tahun 2018 yang bertempat di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Belitung Timur kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Belitung Timur serta Kepala Desa, BPD, LPM dan Tenaga Ahli serta Pendamping Desa.

### II. Pembahasan

Kegiatan yang telah diadakan sejak 2 kali sejak tahun 2017 ini menghadirkan seluruh stakeholder dalam kebijakan program inovasi desa. Dimaksudkan untuk mendorong kualitas peningkatan program dana desa sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa. Acara ini juga menghadirkan beberapa inovasi desa dalam bidang pengembangan usaha ekonomi melalui BUMDesa diantaranya unit usaha perdagangan buah-buahan dan sayuran, unit usaha peternakan telur hingga unit usaha kerajinan. Momen kegiatan ini merupakan upaya daerah mendorong adopsi dan replikasi usaha serupa yang diwujudkan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif atau kreatif oleh BUMDesa. Selain itu desa juga diarahkan untuk memprioritaskan kegiatannya pada tahun 2019 di bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan usaha ekonomi produktif.

### III. Penutup

Dari observasi yang dilakukan menyiratkan bahwa daerah secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha untuk mengembangkan inovasi desa berbasis ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan yang diadakan oleh

daerah ini merupakan perwujudan komitmen dan inisiatif daerah mendukung usaha produktif dan kreatif yang dapat dijadikan pembelajaran serta menghidupkan kreativitas masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan kehadiran daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa sesuai tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut juga termasuk memprioritaskan dana desa bagi pengembangan BUMDesa.

#### JADWAL KEGIATAN

NO	ACARA	WAKTU	TEMPAT
1.	Seremonial Pembukaan	08.00 – 10.40 WIB	GOR Belitung Timur
2.	Pasar Bursa Inovasi Desa	10.40 – 16.30 WIB	GOR Belitung Timur
3.	Penyerahan Sertifikat Peserta Bursa Inovasi Desa	16.30- 16.50 WIB	GOR Belitung Timur
4.	Selesai/Penutup	16.50 – 17.00 WIB	GOR Belitung Timur

#### FOTO KEGIATAN





## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal : Sabtu / 29 September 2018  
Waktu : 07.30 WIB - selesai  
Tempat : Pulau Bayan, Desa Dendang  
Acara : Menggali Potensi Wisata Pulau Bayan  
Penyelenggara : Karang Taruna Desa Dendang didukung CSR PT SMM  
Aspek : Potensi Wisata

### I. Dasar

Pada tanggal 26 September 2018 peneliti mendapatkan pesan via Whatsapp dari seorang tokoh masyarakat yang mengajak untuk mengunjungi objek wisata pulau Bayan yang telah direncanakan oleh Karang Taruna Desa Dendang dengan dukungan PT SMM yang merupakan perusahaan sawit di Kecamatan Dendang. Kunjungan ke beberapa tempat tersebut merupakan realisasi pertemuan antara masyarakat dan perusahaan sebelumnya serta mengakomodir program CSR perusahaan di bidang wisata.

### II. Pembahasan

Kegiatan ini terwujud berkat gagasan dari masyarakat desa setempat terhadap pengembangan Pelabuhan Rakyat Dendang sebagai objek wisata terpadu yang memanfaatkan pulau yang berada diselilingnya sebagai wisata pemancingan atau perkemahan. Disponsori oleh PT SMM kegiatan kunjungan ke pulau bayan diikuti oleh Karang Taruna Desa Dendang, tokoh masyarakat serta perwakilan PT SMM. Dilakukan dengan menyusuri pelabuhan rakyat dendang menggunakan Kapal Boat hingga melewati Pelabuhan CPO Tanjung Rising sampai ke pulau Bayan. Menempuh perjalanan sekitar 60 menit, pulau Bayan yang terdiri dari 6 ha daratan serta hampir 20 ha berupa daratan dan bakau kunjungan dilaksanakan selama hampir 2 jam dengan mengelilingi pulau. Selain itu kunjungan juga menilai potensi yang dapat dikembangkan yang meliputi hamparan pasir pantai, pepohonan yang rindang serta tumbuhan. Pengembangan wisata akhirnya disepakati untuk segera menjadikan pulau Bayan sebagai area perkemahan atau wisata pulau di dendang.

### III. Penutup

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa upaya masyarakat untuk mengenali sumber daya alam yang dimiliki sudah cukup baik. Memanfaatkan kehadiran perusahaan serta bermitra bagi pemetaan dan pengembangan objek sebagai destinasi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Dengan mengikutsertakan perusahaan maka pengembangan wisata menjadi masukan yang optimal terhadap kemajuan wisata. Inisiasi dan kreatifitas warga desa yang dipelopori oleh Karang Taruna Desa sebagai konsep pengembangan objek yang perlu diadopsi dan direplikasi oleh organisasi lain pada bidang atau jenis usaha yang lain.

#### FOTO KEGIATAN





## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal : Selasa / 2 Oktober 2018  
Waktu : 08.30 WIB - selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan PKK Desa Balok  
Acara : Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga BUMDesa Tahun 2018  
Penyelenggara : TPK Desa Balok  
Aspek : Kapabilitas Pengelola

### I. Dasar

Berdasarkan Surat Tim Pengelola Kegiatan Desa Balok Nomor 08/TPK/BLK/IX/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Undangan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga BUMDesa Tahun 2018 yang ditujukan kepada seluruh pengurus BUMDesa.

### II. Pembahasan

Kegiatan pelatihan berlangsung selama 1 hari dimana bimbingan diberikan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur. Pelatihan mencakup pengetahuan tentang pendirian dan pengelolaan BUMDesa serta praktek penjelasan tentang peningkatan usaha serta pembuatan laporan operasional dan teknis penyampaian. Kegiatan juga dilaksanakan secara interaktif dimana diskusi dan tanya jawab berlangsung dan ditanggapi sesuai bentuk penanganannya. Penjelasan disertai video pelatihan dan simulasi yang menyampaikan salah satu bumdesa yang berhasil mengembangkan usaha disertai foto kegiatan pendampingan instansi terkait pada perintisan usaha bisnis salah satu bumdesa.

### III. Penutup

Dari pengamatan yang dilakukan, didapat bahwa pelatihan yang diadakan oleh TPK Desa Balok merupakan salah satu upaya desa dalam mendorong peningkatan kapasitas BUMDesa terutama dalam kegiatan administratif lembaga serta keterampilan usaha. Selain itu desa berusaha aktif agar pengelolaan BUMDesa berjalan dengan baik sesuai implementasi yang diprioritaskan dana desa. Kerjasama dan upaya ini juga terbangun sebagai

bentuk motivasi oleh desa dan instansi daerah serta tindak lanjut proses pendirian, perintisan dan pendampingan bumdesa.

### FOTO KEGIATAN





## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Oktober 2018  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Kantor Desa Lalang Jaya  
Acara : Kunjungan Kerja/Study Banding BUMDesa Sedulang Jaya  
Penyelenggara : TPK Desa Balok  
Aspek : Karakteristik

### I. Dasar

Berdasarkan Surat Tim Pengelola Kegiatan Desa Balok Nomor 06/TPK/BLK/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Kunjungan Kerja/Study Banding yang ditujukan kepada Kepala Desa Lalang Jaya Cq. Direktur Bumdes.

### II. Pembahasan

Kegiatan kunjungan BUMDesa diterima oleh segenap aparat desa lalang jaya yang diwakili oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Adapun kegiatan kunjungan bermaksud untuk melatih pembuatan dokumen administrasi dan pelaporan usaha serta berkunjung ke salah satu unit usaha peternakan telur ayam milik BUMDes. Kunjungan berlangsung selama hampir 5 jam, yang berlokasi di Kantor Desa, Kantor BUMDesa dan Kandang Usaha Peternakan Telur Ayam. Kepala Desa Lalang Jaya memberikan arahan kepada BUMDesa untuk berinovasi dalam usaha BUMDesa sesuai potensi dan karakter wilayah setempat. Sementara itu direktur BUMDesa memotivasi agar BUMDesa fokus menjalankan unit usahanya di bidang yang dikuasai dan layak dikembangkan.

### III. Penutup

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap kunjungan kerja/Studi Banding oleh BUMDesa Tebing Tinggi Desa Balok dapat diketahui bahwa ada minat dan kemauan para pengurus BUMDesa untuk memetakan lebih lanjut usaha bisnisnya. Upaya tindak lanjut ini merupakan proses yang berkesinambungan dari kegiatan pelatihan yang telah dipelajari pada pertemuan sehari sebelumnya. Kunjungan ini juga meliputi usaha BUMDesa mengadopsi teknik pelaporan, pembuatan proposal dan analisa kelayakan usaha. Sehingga BUMDesa mampu memetakan usaha bisnis yang akan dikembangkan di

kemudian hari. Dari kunjungan ini juga diketahui bahwa Desa memberikan porsi yang cukup besar bagi dukungan terhadap BUMDesa, berinvestasi pada pembangunan usaha serta menyertakan modal usaha sebagai operasional usaha. Hal ini tidak terlepas dari komitmen kepala desa beserta perangkat desa sebagai pendorong upaya dalam menggerakkan perekonomian desa serta tindak lanjut upaya pemberdayaan BUMDesa sehingga desa menjadi lebih mandiri dan memberikan efek terhadap pendapatan masyarakat sekaligus kebutuhannya.

#### FOTO KEGIATAN





## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal : Selasa / 9 Oktober 2018  
Waktu : 08.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Camat Dendang  
Acara : Fasilitasi Pertemuan BUMDesa, Desa dan Kecamatan  
Penyelenggara : Pemerintah Kecamatan Dendang  
Aspek : Kondisi Sarana Prasarana

### I. Dasar

Berdasarkan Surat Camat Dendang Kabupaten Belitung Timur Nomor 412.31/295/KCD tanggal 4 Oktober 2018 perihal Undangan pemetaan potensi usaha Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Dendang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Camat Dendang yang dihadiri oleh Camat Dendang, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDesa se-Kecamatan Dendang..

### II. Pembahasan

Kegiatan pemetaan potensi Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Dendang merupakan tindak lanjut atas penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi BUMDesa di Kecamatan Dendang. Kegiatan ini dimaksudkan guna melakukan diversifikasi unit usaha masing-masing BUMDesa sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Diikuti oleh direktur BUMDesa se-Kecamatan Dendang, kegiatan merumuskan tentang fokus unit usaha yang akan dibangun pada tahun 2019 serta menggali potensi objek wisata sebagai paket wisata Kecamatan Dendang sekaligus menginisiasi kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti penetapan wilayah kunjungan wisata pada jadwal yang telah ditentukan.

### III. Penutup

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan pemetaan potensi BUMDesa, dapat diketahui adanya upaya sinergi yang mempertemukan Desa, Kecamatan serta BUMDesa sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan desa dan kecamatan mendorong diversifikasi usaha serta fokus unit usaha menunjukkan bahwa pemerintah pada tataran bawah berkeinginan kehadiran BUMDesa sebagai usaha memperkuat lembaga ekonomi masyarakat. Selain

itu pemerintah berusaha terus mendorong upaya bersama merumuskan potensi wisata yang bisa di kembangkan serta dikelola oleh unit wisata BUMDesa.

#### FOTO KEGIATAN



## TRANSKRIP OBSERVASI

Hari/Tanggal	: Rabu / 17 Oktober 2018
Waktu	: 08.30 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Pertemuan Kantor Camat Dendang
Acara	: Asistensi APBDes Desa Balok Tahun 2019
Penyelenggara	: Pemerintah Kecamatan Dendang
Aspek	: Pendanaan

### I. Dasar

Berdasarkan Surat Camat Dendang Kabupaten Belitung Timur Nomor 900/291/KCD tanggal 1 Oktober 2018 perihal Udangan Asistensi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Dendang yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Dendang.

### II. Pembahasan

Kegiatan asistensi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Dendang merupakan agenda semesteran Tim Asistensi APBDes Kecamatan Dendang. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dimana tim melakukan kewajaran pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun 2019. Dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Kasi dan Bendahara Desa masing-masing desa dijadwalkan pendampingannya selama 1 hari. Adapun sasaran kegiatan yakni penyusunan RAPBDes 2019 sesuai mekanisme dan peruntukannya serta taat terhadap aturan hukum yang berlaku.

### III. Penutup

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan asistensi yang dilakukan oleh tim asistensi Kecamatan Dendang didapat bahwa pemerintah Kecamatan Dendang berusaha mendorong perencanaan dan perumusan anggaran APBDes sesuai dengan peruntukan. Berdasarkan penelusuran ketika pertemuan, tim asistensi menekankan RAPBDes yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) disesuaikan dengan prioritas. Adapun dana desa diprioritaskan bagi penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Dendang. Kegiatan asistensi menghasilkan keputusan bahwa desa

di Kecamatan Dendang setuju mengalokasikan dana bagi BUMDesa dengan persyaratan proposal serta analisa kelayakan usaha yang diajukan oleh pengurus.

#### FOTO KEGIATAN





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2465/IX/2018  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan  
Permintaan Data

Bogor, 18 September 2018

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran  
di

Bogor

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan atas nama Dony Setiawan, NIM: 120170203008, nomor HP: 081278409284, email: doni.setiawan@mp.id.ac.id/ donidandang@gmail.com/, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Kebijakan BUMDesa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ekonomi Daerah Pada Kecamatan Dandang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung."
3. Berkensen dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.



a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warak - Sek. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng  
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
3. Warak / Kasatwas Unhan
4. Ketua LPPM Unhan
5. Bupati Belitung Timur Prov. Bangka Belitung.



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Alamat : Komplek Pemerintahan Terpadu Manggapanon . J. Raja Mangsa Genteng, Belitong Timur

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 070 / 511 / KP / II / 2018**

**TENTANG**

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2010 Nomor 111);
  3. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitong Timur.
- b. Menimbang : Surat Rektor Universitas Pertahanan Nomor : B/201X/2018 Tanggal 3 September 2018.

BUPATI BELITUNG TIMUR, memberikan rekomendasi ke pada :

- a. Nama : DONY SETIAWAN
- b. Kegiatan : Penelitian/Studi
- c. Jabatan : Mahasiswa
- d. Untuk :
- 1) Melakukan kegiatan Penelitian dengan Judul Proposal "*Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitong Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*".
  - 2) Lokasi pelaksanaan : Kecamatan Dendang
  - 3) Waktu/ lama pelaksanaan : September s/d Nopember 2018

- Dengan ketentuan : 1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian/ survey/ riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati dan Dinas terkait setempat dengan menunjukkan rekomendasi penelitian ini.
2. Peneliti tidak dibenarkan melakukan penelitian/ survey/ riset yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/ survey/ riset dimaksud.
3. Peneliti wajib mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
4. Dalam hal penelitian dari waktu berakhirnya rekomendasi penelitian, peneliti wajib mengajukan perperjangan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitang Timur melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur.
5. Peneliti diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan hasil peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Belitang Timur melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitang Timur.
6. Peneliti yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat), serta penelitian yang dilaksanakan menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar  
 Pada tanggal : 12 September 2018  
 an. BUPATI BELITUNG TIMUR,  
 Kepala Kantor Kesbangpol  
 Kabupaten Belitang Timur



- Tambahan Kepada Yth ;
1. Bupati Belitang Timur (Sebagai laporan)
  2. Kepala SP4D Kab. Belitang Timur
  3. Camat Dendang
  4. Arsip

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



DONY SETIAWAN lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada tanggal 19 November 1986. Anak ke-1 dari pasangan Bapak H. Selani Salip dan Ibu Hj. Rohana Salim, S.Pd.SD. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri 5 Kelapa Kampit lulus tahun 1998, SMP Negeri 4 Pangkal Pinang lulus tahun 2001, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang lulus tahun 2004, Sarjana (S-1) Program Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Sriwijaya lulus tahun 2008 dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini menjabat sebagai Staf di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengawali pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2009.

Pengalaman tugas antara lain pernah ditempatkan sebagai Staf Kantor Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.

Menikah dengan Desi Iswanti, A.Md.Kep pada tahun 2011 di Simpang Rengiang Belitung Timur dan dikaruniai dua orang putra yang bernama Luthfi Eza Setiawan yang saat ini bersekolah di SDIT Bina Insani Tanjung Pandan, Belitung dan Fauzi Al-faqih Setiawan di TK Pembina Pangkal Balam, Pangkal Pinang.